Koneksi Politik & Manajemen Laba

Dr. Eva Herianti, S.E., M.Ak., Ak., CA.
Dr. Hj. Arna Suryani, S.E., M.Ak., Ak., CA.
Dr. Amor Marudha, S.E., M.Ak., Ak., CA.

Tentang Penulis

Eva Herianti

Merupakan Staff Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta. Lahir di Jakarta dan menyelesaikan pendidikan SD, SMP SMA di Kabupaten Solok Sumatra Barat. Melanjutkan Studi S1 Akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Jakarta dan menyelesaikan program Magister Akuntansi pada Universitas Persada Indonesia Y.A.I. kemudian menyelesaikan program Doktor pada Universitas Persada Indonesia Y.A.I. Aktif melaksanakan penelitian yang dipublikasikan di jurnal Internasional bereputasi dan jurnal nasional yang terakreditasi. Aktif sebagai anggota IAI KPD tahun 2020 sampai dengan 2022. Aktif menjadi pengurus di Kadin Training Center 2018 hingga sekarang.

Arna Suryani

Merupakan staff pengajar dan sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi. Lahir di Pangkalpinang, menyelesaikan pendidikan SD, SMP dan SMA di Kota Sungailiat Bangka. Melanjutkan Studi S1 Akuntansi di Universitas Sriwijaya, dan menyelesaikan program Magister Akuntansi di Universitas Padjajaran, kemudian menyelesaikan program Doktor pada Universitas Persada Indonesia. Aktif dalam menghasilkan berbagai karya ilmiah seperti melakukan penelitian yang terpublikasi pada jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi juga menulis buku-buku ekonomi dan keuangan. Penulis aktif menjadi narasumber. Diluar aktivitas akademik penulis juga aktif dalam berbagai organisai seperti ketua tim penasehat investasi provinsi Jambi, sebagai wakil ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) wilayah Jambi, sebagai wakil ketua di Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) wilayah XC dan juga sebagai pengurus berbagai organisasi.

Amor Marundha

Merupakan Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Lahir di Jakarta dan menyelesaikan pendidikan SD, SMP SMA di Jakarta Barat. Melanjutkan Studi S1 Akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Jakarta dan menyelesaikan program Magister Akuntansi pada Universitas Pancasila. kemudian menyelesaikan program Doktor pada Universitas Persada Indonesia Y.A.I. Aktif melaksanakan penelitian yang dipublikasikan di jurnal Internasional bereputasi dan jurnal nasional yang terakreditasi. Anggota IAI dan menjadi anggota Assosiasi Pengurus Tax Center seluruh Indonesia tahun 2020 hingga sekarang.

eureka
media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.
EC00202322255

ISBN 978-623-487-715-1
9 786234 877151

KONEKSI POLITIK DAN MANAJEMEN LABA

Dr. Eva Herianti, S.E., M.Ak., Ak., CA.
Dr. Hj. Arna Suryani, S.E., M.Ak., Ak., CA., CMA
Dr. Amor Marudha, S.E., M.Ak., Ak., CA.

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

KONEKSI POLITIK DAN MANAJEMEN LABA

Penulis : **Dr. Eva Herianti, S.E., M.Ak., Ak., CA.**
Dr. Hj. Arna Suryani, S.E., M.Ak., Ak., CA., CMA
Dr. Amor Marudha, S.E., M.Ak., Ak., CA.

Editor : Dwi Winarni, S.E., M.Sc., Ak.

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Herlina Sukma

ISBN : 978-623-487-715-1

No. HKI : EC00202322255

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, FEBRUARI 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku referensi ini. Penulisan buku referensi ini merupakan buah karya dari pemikiran dan penelitian penulis yang diberi judul "**Koneksi Politik dan Manajemen Laba**". Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku referensi ini mengkaji tentang pengaruh perusahaan yang terkoneksi politik terhadap manajemen laba akrual dan manajemen laba riil serta implikasinya terhadap kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan yang terkoneksi politik masih menjadi perdebatan dalam penelitian literature akuntansi dan manajemen keuangan dimana sebagian penulis berpendapat bahwa perusahaan yang terkoneksi politik dapat memberikan nilai tambah bagi kinerja keuangan perusahaan dan sebagian penulis lainnya berpendapat bahwa perusahaan yang terkoneksi politik cenderung melakukan manajemen laba untuk menyembunyikan atau mengaburkan kinerja perusahaan agar terlihat baik. Kajian ini di harapkan dapat memberikan referensi akan dampak perusahaan yang terkoneksi politik dalam pemilihan kebijakan manajemen laba yang berimplikasi pada kinerja keuangan perusahaan.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku referensi ini. Akhir kata penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku referensi ini akan membawa manfaat bagi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR TABEL ..... **v**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
BAB 2 DASAR KELEMBAGAAN DALAM PERUSAHAAN **31**
A. Teori Keagenan, Signaling Dan Kelembagaan 31
B. Kinerja Perusahaan 36
BAB 3 MANAJEMEN LABA **39**
A. Pengertian Manajemen Laba 39
B. Pengertian Manajemen Laba Akrual 42
C. Manajemen Laba Akrual Dan Kinerja Keuangan Perusahaan 45
D. Pengertian Manajemen Laba Riil 47
E. Manajemen Laba Riil Terhadap Kinerja keuangan Perusahaan 50
BAB 4 KONEKSI POLITIK UNTUK KEUANGAN PERUSAHAAN **54**
A. Pengertian Koneksi Politik 54
B. Koneksi Politik Dan Keuangan Perusahaan 56
C. Koneksi Politik Dan Manajemen laba Akrual 59
D. Koneksi Politik Dan Manajemen Laba Riil 64
BAB 5 KONEKSI POLITIK DALAM SEKTOR INDUSTRI **67**
A. Sektor *Agriculture* 67
B. Sektor *Basic Industry* 72
C. Sektor *Consumer Goods* 78
D. Sektor *Infrastructure* 82
E. Sektor *Mining* 86
F. Sektor *Miscellaneous* 90
G. Sektor *Property* Dan *Real Estate* 96
H. Sektor *Trade, Service* dan *Investment* 102
BAB 6 PENUTUP **107**
DAFTAR PUSTAKA **111**
TENTANG PENULIS **116**

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kriteria Pemilihan Sampel 10
Tabel 2 Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008 – 2015 Yang Memenuhi Kriteria Purpose Sampling 11
Tabel 3 Operasional variabel..... 19

KONEKSI POLITIK DAN MANAJEMEN LABA

Dr. Eva Herianti, S.E., M.Ak., Ak., CA.
Dr. Hj. Arna Suryani, S.E., M.Ak., Ak., CA., CMA
Dr. Amor Marudha, S.E., M.Ak., Ak., CA.

BAB 1 PENDAHULUAN

Peranan pasar modal sangatlah penting dalam perkembangan perekonomian suatu negara termasuk Indonesia. Keberadaan pasar modal yang semakin berkembang membuktikan bahwa pemerintah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat baik itu kebutuhan barang maupun jasa yang tercermin melalui realisasi anggaran. Kebutuhan perusahaan dalam memperoleh modal dapat terealisasikan ketika perusahaan terlibat dalam pasar modal Indonesia.

Perkembangan pasar modal tidak akan dapat terealisasikan ketika tidak ada campur tangan atau dukungan dari pemerintah. Peran pemerintah dapat menciptakan stabilitas politik dan hukum, stabilitas iklim investasi dan sebagai pelindung pelaksanaan kegiatan ekonomi. Semakin pentingnya peranan pasar modal dalam perekonomian suatu negara, maka pasar modal akan semakin sensitif terhadap berbagai faktor yang turut mempengaruhinya.

Politik merupakan salah satu faktor lingkungan yang turut mempengaruhi keberhasilan perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu yaitu memperoleh keuntungan dan memaksimumkan laba serta mengoptimalkan nilai perusahaan yang tercermin melalui harga saham. Dengan memaksimumkan laba dan mengoptimalkan nilai perusahaan, maka kinerja perusahaan akan tercapai sehingga kelangsungan hidup perusahaan dapat dipertahankan dan terus berkembang serta dapat memberikan return bagi pemegang saham atas investasi yang dilakukan dalam rangka memakmurkan pemegang saham.

Sumarni dan Soeprihanto (1999) menyatakan bahwa politik menyangkut tingkat pemusatan kekuatan politik, sifat organisasi politik, sistem partai, kesadaran dalam bermasyarakat. Selain itu, definisi politik menurut Budiardjo (1977) yaitu bermacam – macam kegiatan dalam suatu sistim politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan – tujuan dari sistem dan melaksanakan tujuan – tujuan tersebut. Untuk melaksanakan tujuan tersebut perlu ditentukan kebijaksanaan – kebijaksanaan umum (*public policies*) yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber – sumber dan resources yang ada. Politik selalu menyangkut tujuan – tujuan dari seluruh masyarakat (*public goals*) dan bukan tujuan pribadi seseorang. Politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik dan kegiatan orang seorang (individu).

Dari penjelasan mengenai politik secara singkat diatas, maka dapat dikatakan bahwa pada hakekatnya kegiatan bisnis dan politik merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dilepas-pisahkan. Tujuan dari politik adalah untuk merumuskan kebijakan publik termasuk untuk kepentingan dunia bisnis. Sebaliknya, dunia bisnis dapat menunjang politik suatu negara.

Untuk membiayai aktivitasnya, partai politik memerlukan sumber – sumber pendanaan. Dalam perspektif yang ideal, partai yang baik adalah partai yang didanai sendiri oleh anggota dan simpatisannya. Namun yang terjadi di Indonesia tidaklah demikian. Vermonte (2012) menyatakan bahwa di Indonesia, pada dasarnya partai politik lebih banyak bergantung pada bantuan pemerintah dan bantuan korporasi, jika dibandingkan pada iuran anggotanya sendiri.

Pendanaan terkait partai politik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 34 dan 35 tentang "sumber keuangan dan batas maksimum sumbangan untuk partai politik". Dalam Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa sumber keuangan partai politik meliputi iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, serta bantuan keuangan dari APBN/APBD dengan batas maksimum sumbangan untuk perseorangan yaitu Rp. 1 miliar per orang dalam satu tahun

anggaran dan batas maksimum sumbangan untuk perusahaan dan/atau badan usaha yaitu Rp.7,5 miliar per perusahaan dan/atau badan usaha dalam satu tahun anggaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan dan partai politik memiliki hubungan politik.

Vermonte (2012) menjelaskan bahwa semakin bergantungnya partai politik terhadap bantuan pihak ketiga, baik itu perseorangan maupun perusahaan yang memiliki modal besar memberikan peluang terjadinya praktek kecurangan (korupsi). Dengan adanya perubahan subsidi oleh negara kepada partai politik dari subsidi langsung menjadi subsidi tidak langsung menyebabkan partai politik mencari calon – calon anggota legislatif atau pemerintah daerah dari mereka yang memiliki modal besar walaupun tidak memiliki kaitan apapun dengan partainya.

Dengan adanya pemberian dana baik itu dari perseorangan maupun perusahaan kepada partai politik mengindikasikan adanya tujuan tertentu atas penyaluran dana tersebut, misalkan akan memperoleh manfaat di masa yang akan datang berupa kemenangan dalam tender proyek perusahaan, kebijakan dan peraturan terkait bisnis dari perusahaan dipermudah, adanya lobi politik, adanya keringanan dalam membayar pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik memiliki kesempatan untuk memperoleh banyak manfaat atas hubungan politik tersebut (Faccio, 2010; Pastor dan Veronesi, 2013).

Dengan adanya hubungan antara bisnis dan politik seperti yang telah dijelaskan di atas, maka munculah istilah perusahaan yang terkoneksi politik. Faccio (2006) menyatakan bahwa perusahaan dikatakan terkoneksi politik apabila setidaknya satu dari pemegang saham terbesar perusahaan (yaitu siapa pun baik secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan 10% suara) atau jajaran direksi (yaitu CEO) adalah seorang anggota parlemen, seorang menteri, atau seorang kepala negara, atau merupakan seseorang yang memiliki hubungan erat dengan politisi papan atas.

Perusahaan yang memiliki koneksi politik akan memperoleh beberapa manfaat diantaranya kemudahan untuk memperoleh

kontrak dalam memenangkan tender proyek pemerintah atau kemudahan dalam memperoleh pinjaman dari bank. Sebagai contoh kasus adanya hubungan politik diantaranya, adalah koneksi politik antara Grup Permai dengan M.Nazaruddin (seorang Bendahara Umum Partai Demokrat tahun 2010 dan mantan anggota DPR RI periode 2009 – 2014).

Beberapa proyek pemerintah yang dimenangkan oleh perusahaan Grup Permai antara lain proyek Pembangunan Fasilitas Teknologi Vaksin Flu Burung senilai Rp 718,8 miliar dari kementerian Kesehatan dimenangkan oleh PT Anugrah Nusantara, proyek Pengadaan Alat Bantu Belajar-Mengajar Dokter/ Dokter Spesialis di Rumah Sakit Pendidikan dan Rumah sakit Rujukan senilai Rp 492 miliar dari Kementerian Pendidikan dimenangkan oleh PT Mahkota Negara, proyek Pengadaan 13 Pesawat Latih dan 2 Simulator Sayap untuk STPI Curug senilai Rp 114,59 miliar dimenangkan oleh PT Anugrah Nusantara, dan beberapa proyek lagi dari Kementerian yang lain (Koran Tempo, 2012).

Dengan adanya koneksi politik di satu sisi dapat memberikan manfaat bagi individu atau perusahaan. Namun di sisi lain, keberadaan koneksi politik juga dapat mengancam nilai perusahaan. pengusaha yang kemudian menjadi seorang politisi disini mempunyai tujuan untuk meningkatkan status mereka di mata masyarakat tanpa harus meninggalkan profesi lamanya yakni sebagai seorang pengusaha. Dimana profesi sebagai politisi memiliki jangka waktu dalam jabatan sehingga ketika mereka tidak menjadi seorang politisi kembali,mereka tetap mempunyai status atau kasta yang lebih tinggi dibandingkan hanya sebagai seorang karyawan yang mempunyai kasta paling rendah (sudra). karena posisi mereka sebagai pengusaha juga memberikan kebermanfaatan dalam hal kegiatan mereka di dunia politik, maksudnya politisi yang juga berprofesi sebagai seorang pengusaha mampu membentuk suatu relasi jaringan yang kuat dalam masyarakat dimana hal ini termasuk dalam modal sosial. Modal sosial ini sangat penting sebagai sumberdaya yang mampu mendukung upaya politisi pengusaha tersebut untuk maju atau

bahkan mempertahankan kekuasaan mereka dilembaga legislative, Sari (2015)

Hal ini ditunjukkan oleh Shleifer dan Vishny (1994) menyatakan bahwa nilai perusahaan dapat terancam jika koneksi politik mendistorsi insentif, penempatan investasi yang salah, dan meningkatkan tingkat korupsi. Di Negara – negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, suap diperlukan ketika sebuah perusahaan akan didirikan. Semakin mudah suap dilakukan membuat tingkat korupsi semakin tinggi. Tingkat suap yang tinggi membuat para investor beranggapan bahwa suap merupakan bagian dari suatu kewajiban yang tidak bisa dihindari. Hal ini dapat mengurangi insentif untuk berinvestasi sehingga investasi menurun. Dismping itu juga perusahaan yang terkoneksi politik cenderung dimonitoring oleh publik (Chaney *et al.,* 2011).

Sebagai konsekuensinya, apabila perusahaan yang terkoneksi politik memiliki legalitas yang meragukan, maka mereka cenderung untuk menyembunyikan hubungan politik mereka (Fisman, 2011). Perusahaan dapat menggunakan beberapa strategi manajemen laba dalam mengelola laba, yaitu strategi manajemen laba akrual dan strategi manajemen laba riil (Badertscher, 2011). Strategi manajemen laba akrual dilakukan dengan tujuan untuk mengaburkan kinerja ekonomi melalui mengubah metode atau estimasi akuntansi dalam prinsip akuntansi berterima umum (Dechow dan Skinner, 2000). Sedangkan manajemen laba riil dilakukan dengan cara mengubah aktivitas bisnis normal perusahaan (Roychowdhury, 2006). Dengan adanya penataan transaksi bisnis perusahaan secara riil, seperti perubahan aktivitas operasi untuk memenuhi target jangka pendek perusahaan yang berdampak langsung pada aliran kas dan juga berdampak pada konsekuensi nilai ekonomi perusahaan. Salah satu indikasi adanya peningkatan kinerja perusahaan adalah manajemen laba yang dilakukan oleh manajer dalam mencapai target laba.

Perusahaan yang terkoneksi politik cenderung mengelola laba untuk mencapai target perusahaan, sehingga kinerja perusahaan akan terlihat baik bagi pemegang saham. Selain itu, perusahaan yang terhubung secara politik lebih cenderung untuk

menggunakan manajemen laba riil karena sulit dideteksi oleh auditor maupun regulator dibandingkan manajemen laba akrual untuk memperoleh keuntungan atas hubungan koneksi politik mereka (Cohen dan Zarowin, 2010; Cohen *et al.,* 2008; Ewert dan Wagenhofer, 2005; Graham *et al.,* 2005).

Masa pemerintahan Soeharto memang tampaknya hanya dinikmati oleh segelintir orang pada masa orde baru, mayoritas sector usaha dimonopoli oleh pengusaha yang dekat dengan rezim. Sejak menjalankan kekuasaan dictator di Indonesia tahun 1960-an, Soeharto berhasil mentransfer harta kekayaan Negara kedalam lingkaran kekuasaan, seperti Soedono Salim dan Soeharto dikenal mempunyai kedekatan yang spesial. salah satu bukti kedekatan antara Soedono Salim dan Soeharto adalah berdirinya sebuah perusahaan pengolahan tepung terigu, PT.Bogasari. Soedono Salim membangun perusahaan terigu terbesar di Indonesia tersebut bersama Sudwikatmono (Sepupu Pak Soeharto).

Perusahaan ini mendapatkan hak monopoli untuk melakukan distribusi terigu dan PT. Bulog hak monopoli itu membuat keuntungan Pt. Bogasari menanjak tajam. (Harian Kontan, 2014) berdasarkan majalah the economist edisi 15 maret 2014 menempatkan Indonesia di peringkat sepuluh dalam the crony-capitalism index. *Political connection* dapat dipandang sebagai sebuah situasi di mana setidaknya satu orang dari *top officer* sebuah perusahaan, pemegang saham besar perusahaan, atau kerabat mereka adalah pemegang jabatan politik tinggi atau seorang politikus yang menonjol (Faccio et.al., 2006). perusahaan yang terkoneksi politis dapat dengan mudah memperoleh pendanaan utang dengan mendapatkan "memo pinjaman" dari politisi.

Koneksi politik tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di Negara adidaya Amerika Serikat yang terkoneksi politik sebagai pejabat di pemerintahan dan juga menjabat sebagai CEO di perusahaan, yaitu Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Henry Paulson dan juga seorang bankir dalam hal ini menekan habis sembilan bank kakap di AS untuk menerima dana investasi 250 miliar dollar AS dari pemerintah AS. Henry Paulson adalah CEO dari Goldman Sachs Group Inc, sebuah bank investasi terbesar dan

tersukses didunia pada masa pemerintahan presiden George H. W. Bush. Terkait dengan masalah krisis keuangan Subprime (mencuat sejak tahun 2007). Krisis subprime berawal dari banyaknya pihak yang mengambil kredit rumah di Amerika, dan kebanyakan dari mereka tidak mampu membayar cicilan pinjaman karena memang tidak mampu membayar. Pada saat yang sama, AIG memiliki hutang kepada para pembeli CDS (*Credit Default Swap*) sebesar $13 miliar US dollar, dan pada saat itu AIG tidak memiliki uang untuk membayar CDS yang jatuh tempo karena CDO (*Collateralized Debt Obligation)* yang default.

Pada tanggal 17 September 2008, AIG diambil alih oleh pemerintah Amerika. Dan pada tanggal 18 September 2008, Henry Paulson dan Ben Bernanke meminta kongres Amerika untuk menggolkan dana darurat (bail out) untuk menyelamatkan bank-bank yang bermasalah. Mereka mengatakan kalau dana ini tidak dikeluarkan maka akan terjadi krisis ekonomi yang sangat besar dan berefek kepada seluruh negara di dunia. Padahal dahulu, dialah yang melobi kongress untuk membolehkan bank investasi untuk menaikan leverage mereka, dan dia juga yang meyakinkan kongress untuk tidak membuat peraturan yang mengatur mengenai CDS. Pada saat AIG di *bail out* , salah satu pemegang CDS AIG, yaitu Goldman Sachs, mendapat pembayaran sebesar $61 milyar US dollar pada keesokan harinya. Henry Paulson, Ben Bernanke, dan Tim Geithner memaksa AIG untuk membayar 100% hutang yang jatuh tempo tersebut dari pada mencoba untuk menegosiasikan pembayaran hutang tersebut pada nilai yang lebih rendah. Hal ini membuat pembayar pajak merugi lebih dari $150 miliyar US dollar. Disaat yang sama Henry Paulson juga memaksa AIG untuk tidak menuntut Goldman Sachs.(belajar forex.com, 2008).

Di Indonesia, penelitian mengenai pengaruh koneksi politik terhadap kinerja keuangan perusahaan atau pun pengaruh koneksi politik terhadap manajemen laba masih jarang dilakukan. Beberapa penelitian mengenai koneksi politik yang telah dilakukan di Indonesia antara lain oleh Wijantini (2007) meneliti hubungan antara koneksi politik dan biaya tidak langsung dari *financial distress*. Rizqi (2008) meneliti mengenai *expectation gap* pada audit

partai politik. Purwoto (2011) yang meneliti pengaruh koneksi politik, kepemilikan pemerintah, dan keburaman laporan keuangan terhadap kesinkronan dan risiko *crash* harga saham.

Keberhasilan sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnis tergantung dari salah satu faktor lingkungan yaitu politik. Politik merujuk pada kebijakan-kebijakan umum alokasi sumber daya untuk mencapai kesejahteraan bersama dan bukan sekedar untuk mencapai tujuan pribadi. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan juga dipengaruhi oleh politik negara.

Di Indonesia, pihak – pihak yang memiliki wewenang dalam merumuskan kebijakan sebagian besar berasal dari partai politik, baik itu pejabat pemerintah (Presiden dan para Menteri) sebagai pihak yang mengajukan kebijakan (dalam bentuk Rancangan Undang – Undang), maupun para anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pihak yang mengesahkan usulan kebijakan (menjadi Undang – Undang). Para pengusaha, mengharapkan rumusan kebijakan yang dapat memudahkan bisnis mereka. Di samping itu, partai politik membutuhkan sumbangan dana untuk aktivitas partai. Keadaan tersebut menimbulkan hubungan timbal balik antara pelaku bisnis dengan politik.

Perusahaan yang terkoneksi politik cenderung mengelola laba untuk mencapai target perusahaan, sehingga kinerja perusahaan akan terlihat baik bagi pemegang saham. Selain itu, perusahaan yang terhubung secara politik lebih cenderung untuk menggunakan manajemen laba riil karena sulit dideteksi oleh auditor maupun regulator dibandingkan manajemen laba akrual untuk memperoleh keuntungan atas hubungan koneksi politik mereka.

Bagian latar belakang telah menguraikan secara singkat adanya keterkaitan koneksi politik terhadap manajemen laba baik itu manajemen laba yang dilakukan oleh manajer melalui akrual maupun aktivitas riil dan implikasinya terhadap kinerja perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas maka buku ini bertujuan untuk menguji kembali apakah koneksi politik berpengaruh terhadap

manajemen laba akrual maupun manajemen laba riil serta implikasinya terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Untuk menguji sesuai dengan tujuan tersebut maka metode penelitian yang dihunakan adalah metode kausalitas yang menjelaskan kaitan hubungan sebab akibat antara dua variabel yaitu variabel bebas (*dependent*) dengan variabel tidak bebas (*independent*). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mendeskripsikan data yang telah terkumpul dengan tujuan untuk menguji kebenaran suatu fenomena yang terjadi pada sampel tertentu dengan menggunakan analisis kuantitatif untuk menguji hipotesis, sehingga akan diketahui pengaruh antara variabel-variabel yang diteliti untuk menghasilkan kesimpulan dalam memperjelas gambaran objek penelitian yang diteliti.

Buku ini menggunakan pendekatan longitudinal yaitu hanya meneliti pada objek-objek tertentu diamati dari waktu ke waktu. Data yang diteliti dan diolah merupakan data sekunder pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada bursa efek Indonesia (BEI) yang menerbitkan laporan keuangan auditor tahun 2008 sampai tahun 2015. Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data dan sumber informasi lainnya yang diperlukan dalam buku ini dilakukan melalui beberapa cara berikut ini.

1. Dokumentasi
   Pengumpulan data dilakukan melalui dokumen yang diperoleh dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang terdapat pada perusahaan khususnya laporan keuangan tahunan perusahaan dan data legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

2. Studi Kepustakaan
   Pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelaah buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan diteliti seperti buku-buku Akuntansi dan jurnal-jurnal ilmiah akuntansi.

Populasi dalam buku ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam buku ini adalah

sebagai berikut.

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menerbitkan laporan keuangan tahunan secara berturut-turut dari tahun 2008-2015.
2. Perusahaan tidak mengalami kerugian (laba negatif).
3. Data tersedia lengkap (secara keseluruhan tersedia pada publikasi periode 31 Desember 2008-2015), baik data mengenai manajemen laba, koneksi politik, dan kinerja perusahaan.

Proses seleksi sampel berdasarkan kriteria tersebut di atas dapat dilihat pada table 1 berikut ini.

Tabel 1 Kriteria Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah
Perusahaan manufaktur terdaftar di BEI periode 2008-2015	121
Perusahaan manufaktur yang tidak berturut-turut menerbitkan laporan keuangan dari tahun 2008-2015 (Tidak Lengkap)	(6)
Perusahaan yang memiliki kerugian	(56)
Jumlah Sampel Observasi (59 X 6)	354
Outlier (Nilai Z > 2,5 dan Z < -2,5)	(34)
Jumlah Observasi	320

Sumber: data sekunder diolah, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam buku ini berjumlah 320 observasi dari laporan keuangan dan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2008-2015. Akan tetapi data yang dianalisis dalam buku ini dari tahun 2010-2015. Hal ini dikarenakan dalam menghitung manajemen laba riil dibutuhkan data dua tahun sebelumnya yaitu data tahun 2008 dan 2009.

Tabel 2 Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008 – 2015 Yang Memenuhi Kriteria Purpose Sampling

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan Manufaktur
1	INTP	PT.Indonecement Tunggal Prakarsa Tbk.
2	SMCB	Holcim Indonesia Tbk.
3	SMGR	PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
4	AMFG	PT.Asahimas Flat Glass Tbk.
5	ARNA	Arwana Citramulia Tbk.
6	TOTO	PT.Surya Toto Indonesia Tbk.
7	BTON	Betonjaya Manunggal Tbk.
8	CTBN	PT.Citra Tubindo Tbk.
9	INAI	Indai Aluminium Industry Tbk.
10	LION	PT. Lion Metal Works Tbk.
11	LMSH	PT.Lionmesh Prima Tbk.
12	PICO	Pelangi Indah Canindo Tbk.
13	BUDI	PT. Budi Stach & Sweetener Tbk
14	DPNS	Duta Pertiwi Tbk.
15	EKAD	Ekadharma International Tbk.
16	SRSN	Indo Acidatama Tbk.
17	AKPI	PT.Argha Karya Prima Industry Tbk.
18	APLI	Asiaplast Industries Tbk.
19	IGAR	Champion Pacifik Indonesia Tbk.
20	TRST	PT.Trias Sentosa Tbk.
21	CPIN	PT.Charoen Pokphand Indonesia Tbk.
22	JPFA	PT. Japra Comfeed Indonesia Tbk.
23	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Corporation
24	KDSI	Kedawung Setia Industrial Tbk.
25	TKIM	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.
26	ASII	PT.Astra International Tbk.
27	AUTO	Astra Otoparts Tbk.
28	BRAM	Indo Kordosa Tbk.
29	INDS	Indospring Tbk.
30	NIPS	Nipress Tbk.

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan Manufaktur
31	PRAS	Prima Alloy Stell Universal Tbk.
32	SMSM	Selamat Sempurna Tbk.
33	PBRX	PT.Pan Brothers Tbk.
34	RICY	Ricky Puta Globalindo Tbk.
35	BATA	PT.Sepatu Bata Tbk.
36	KBLI	KMI Wire And Cable Tbk.
37	KBLM	Kabelindo Murni Tbk.
38	SCCO	PT.Supreme Cable Manufakturing & Commerce Tbk.
39	AISA	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.
40	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
41	DLTA	Delta Djakarta Tbk.
42	INDF	Indofood Sukses Makmur.
43	MLBI	PT.Multi Bintang Indonesia.
44	MYOR	Mayora Indah Tbk.
45	SKLT	Sekar Laut Tbk.
46	STTP	Siantar Top Tbk.
47	ULTJ	PT.Ultrajaya Milk Industry &Trading Company Tbk
48	GGRM	PT.Gudang Garam Tbk.
49	HMSP	Hanjaya Mandala Samporna.
50	DVLA	Darya-Varia Laboratoria Tbk.
51	KAEF	Kimia Farma (Persero) Tbk.
52	KLBF	PT.Kalbe Farma Tbk.
53	MERK	Merck Tbk.
54	PYFA	Pyridam farma Tbk.
55	SQBB	Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk.
56	TSPC	Tempo Scan Pacifik Tbk.
57	ADES	Akasha Wira International Tbk.
58	TCID	PT. Mandon Indonesia Tbk.
59	UNVR	PT. Unilever Indonesia Tbk.

Sumber : Indonesia Capital Market Directory

Pada buku ini penulis menggunakan alat analisis regresi linier berganda data panel dengan bantuan *Eviews* Versi 8 dan Ms. Excell. Pengolahan data dengan Ms. Excel meliputi pembuatan tabel dan grafik untuk analisis deskriptif. Sedangkan kegiatan pengolahan data dengan *Eviews* Versi 8 digunakan untuk melakukan pengujian signifikasi analisis regresi linier berganda data panel.

Persamaan matematis regresi linear berganda dalam buku ini dapat dirumuskan seperti berikut.

$$\mathbf{X_1MLA} = \alpha + \beta 1 CABIBOARD_{i,t} + \beta 2 MILIBOARD_{i,t} + \beta 3 GOVBANK_{i,j} + \beta 4 SIZE + \beta 5 LEV + \beta 6 SG + \lambda 1 CABIBOARD_{i,t} SIZE + \lambda 2 CABIBOARD_{i,t} LEV + \lambda 3 CABIBOARD_{i,t} SG + \lambda 4 MILIBOARD_{i,t} SIZE + \lambda 5 MILIBOARD_{i,t} LEV + \lambda 6 MILIBOARD_{i,t} SG + \lambda 7 GOVBANK_{i,j} SIZE + \lambda 8 GOVBANK_{i,j} LEV + \lambda 9 GOVBANK_{i,j} SG + e1 \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (1)$$

$$\mathbf{X_2MLR} = \alpha + \beta 7 CABIBOARD_{i,t} + \beta 8 MILIBOARD_{i,t} + \beta 9 GOVBANK_{i,j} + \beta 10 SIZE + \beta 11 LEV + \beta 12 SG + \lambda 10 CABIBOARD_{i,t} SIZE + \lambda 11 CABIBOARD_{i,t} LEV + \lambda 12 CABIBOARD_{i,t} SG + \lambda 13 MILIBOARD_{i,t} SIZE + \lambda 14 MILIBOARD_{i,t} LEV + \lambda 15 MILIBOARD_{i,t} SG + \lambda 16 GOVBANK_{i,j} SIZE + \lambda 17 GOVBANK_{i,j} LEV + \lambda 18 GOVBANK_{i,j} SG + e1 \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (2)$$

$$\mathbf{Y_{KIN}} = \alpha + \beta 13 CABIBOARD_{i,t} + \beta 14 MILIBOARD_{i,t} + \beta 15 GOVBANK_{i,j} + \beta_{16} MLA + \beta 17 MLR + \beta 18 SIZE + \beta 19 LEV + \beta 20 SG + \lambda 19 CABIBOARD_{i,t} MLA + \lambda 20 CABIBOARD_{i,t} MLR + \lambda_{21} CABIBOARD_{i,t} SIZE + \lambda 22 CABIBOARD_{i,t} LEV + \lambda_{23} CABIBOARD_{i,t} SG + \lambda_{24} MILIBOARD_{i,t} MLA + \lambda 25 MILIBOARD_{i,t} MLR + \lambda 26 MILIBOARD_{i,t} SIZE + \lambda 27 MILIBOARD_{i,t} LEV + \lambda 28 MILIBOARD_{i,t} SG + \lambda 29 GOVBANK_{i,j} MLA + \lambda 30 GOVBANK_{i,j} MLR + \lambda 31 GOVBANK_{i,j} SIZE + \lambda 32 GOVBANK_{i,j} LEV + \lambda 33 GOVBANK_{i,j} SG + e1 \quad \ldots\ldots (3)$$

Keterangan:

CABIBOARDi,t	=	*Dummy* Koneksi Politik dengan indikator pejabat tinggi. 1 jika anggota dewan perusahaan pernah atau sedang menjadi pejabat tinggi negara dalam tingkatan kabinet pemerintahan dan 0, jika tidak.
$MILIBOARD_{i,t}$	=	*Dummy* Koneksi Politik dengan indikator karir militer. 1, jika anggota dewan perusahaan mempunyai karir dalam militer (TNI atau POLRI) dengan pangkat setingkat jenderal, sebaliknya 0, jika tidak.
$GOVBANK_{i,j}$	=	Dummy Koneksi Politik dengan indikator hutang BUMN. 1, jika perusahaan mempunyai pendanaan hutang bank BUMN atau pinjaman pemerintah; sebaliknya 0, jika tidak.
MLR	=	Manajemen Laba Riil
MLA	=	Manajemen Laba Akrual KIN = Kinerja Perusahaan
SIZE	=	Ukuran Perusahan
LEV	=	*Leverage*
SG	=	Pertumbuhan Penjualan

Pada estimasi regresi data panel terdapat beberapa teknik yang di tawarkan dalam mengestimasi parameter model dengan data panel, yaitu: *Ordinary least square, fixed effect, random effect.*

Ordinary least square dimana teknik ini tidak ubahnya dengan membuat regresi dengan data *cross section* atau *time series.* Akan tetapi dalam data panel dilakukan penggabungan antara data *cross section* dan data *time series.* Data yang telah digabung diperlakukan sebagai satu kesatuan pengamatan yang digunakan untuk mengestimasi model dengan model *ordinary least square* (Nachrowi dan Usman, 2006: 311). Penggabungan data yang dilakukan mengakibatkan kita tidak dapat melihat melihat perbedaan baik antar individu maupun antar waktu (Nachrowi dan Usman, 2006: 312)

Persamaan regresi dengan metode *ordinary least square* dapat ditulis dengan:

$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \varepsilon_{it}$; i = 1,2,….., N; t = 1,2,…., T …….. (3.1)

Keterangan:

N = banyaknya observasi

T = banyaknya waktu

N x T = banyaknya data panel

Pada ***Fixed Effect*** pemikiran dasar dalam pembentukan metode ini ialah adanya variabel-variabel yang tidak semuanya masuk dalam persamaan model memungkinkan adanya *intercept* yang tidak konstan. Atau dengan kata lain, *intercept* ini mungkin berubah untuk setiap individu dan waktu. Mengacu kepada pemikiran dasar maka metode efek tetap adalah metode yang memungkinkan adanya perubahan α pada setiap individu (i) dan waktu (t) (Nachrowi dan Usman, 2006: 311). Secara matematis persamaan regresi model efek tetap dapat dinyatakan sebagai berikut.

$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \gamma_2 W_{2t} + \gamma_3 W_{3t} + \ldots + \gamma_N W_{Nt} + \delta_2 Z_{i2} + \delta_3 Z_{i3} + \delta_T Z_{iT} + \varepsilon_{it}$ ……..……..(3.2)

Keterangan:

Y_{it} = variabel terikat untuk individu ke-i dan waktu ke-t

X_{it} = variabel bebas untuk individu ke-i dan waktu ke-t

W_{it} dan Z_{it} variabel dummy yang di definisikan sebagai berikut:

W_{it} = 1 ; untuk individu i; i = 1, 2, …..., N

= 0 ; lainnya

Z_{it} = 1 ; untuk periode t; t = 1, 2, ……., T

= 0 ; lainnya

Pada ***Random Effect*** perbedaan karakterisktik individu dan waktu pada metode efek *random* (MER) diakomodasikan lewat *error.* Mengingat ada dua komponen yang berkontribusi pada pembentukan *error,* yaitu individu dan waktu, maka *random error* pada MER juga perlu diurai menjadi *error* untuk individu, waktu dan *error* gabungan (Nachrowi dan Usman, 2006: 316). Persamaan model efek random dapat diformulasikan sebagai berikut.

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \varepsilon it ; \quad \varepsilon it = ui + vt + wit$$

Keterangan:

u_i : Komponen *error cross-section*

v_t : Komponen *error time-series*

w_{it} : Komponen *error* gabungan

Berikutnya juga dilakukan memilih teknik model estimasi data panel yaitu dengan Uji *Chow – Test.* Uji *chow-test* digunakan untuk memilih salah satu model yang akan dipakai antara *ordinary least square* atau metode efek tetap. Pengujian ini dilakukan dengan uji statistik F atau *chi-kuadrat* dengan hipotesis yang digunakan sebagai berikut.

H_0 : Model mengikuti *ordinary least square*

H_1: Model mengikuti metode efek tetap

Jika nilai F test maupun *Chi-square* lebih besar dari α (0,05), maka H_0 diterima. Sehingga model yang digunakan adalah *ordinary least square*. Namun, jika nilai F test maupun *Chi-square* lebih kecil dari α (0,05), maka H_0 di tolak. Hal ini berarti model yang digunakan adalah metode efek tetap.

Uji *Langrage Multiplier* (LM) juga digunakan untuk mengetahui model mana yang lebih baik antara menggunakan model *ordinary least square* atau dengan model efek random. Hipotesis yang digunakan dalam uji LM adalah sebagai berikut.

H_0 : Model mengikuti *ordinary least square*

H_1: Model mengikuti model efek random

Nilai LM statistik dapat dihitung berdasarkan formula sebagai berikut.

$$\boldsymbol{LM = \frac{nT}{2(T-1)}\left[\frac{\sum_{i=1}^{n}(\sum_{t=1}^{T} e_{it})^2}{\sum_{i=1}^{n}\sum_{t=1}^{T} e_{it}^2} - 1\right]^2} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (3.3)$$

Keterangan:

n = jumlah individu

T = jumlah periode waktu

e = residual dari model OLS

Uji LM didasarkan pada *chi-squares* dengan *degree of fredom* (df) sebesar jumlah variabel bebas. Jika LM hitung statistik lebih kecil dari nilai *chi-squares* tabel, maka H_0 diterima. Sehingga model yang digunakan adalah *ordinary least square*. Akan tetapi, jika LM hitung statistik lebih besar dari nilai *chi-squares* tabel, maka H_0 ditolak. Hal ini, berarti model yang digunakan adalah model efek random.

Uji *Hausman test* dilakukan untuk memilih model mana yang lebih baik, apakah menggunakan model efek tetap atau model efek random. Hal ini dilakukan setelah melakukan pengujian sebelumnya. Hipotesis dalam pengujian Hausman test adalah sebagai berikut:

H_0 : Model mengikuti model efek random

H_1: Model mengikuti metode efek tetap

Jika nilai p-*value* lebih besar daripada α, maka H_0 diterima dan model yang digunakan adalah model efek random. Akan tetapi, jika nilai p-*value* lebih kecil α, maka H_0 ditolak. Ini berarti model yang digunakan adalah model efek tetap.

Pada buku ini selain dilakukan analisis juga dilakukan uji hipotesis. Adapun Langkah-langkah menguji hipotesis dalam buku ini adalah sebagai berikut.

1. Uji Statistik Deskriptif

   Statistik deskriptif dalam buku ini berfungsi untuk memberikan gambaran atau deskripsi terhadap obyek penelitian yang diteliti melalui data sampel yang digunakan untuk membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam buku ini statistik deskripitif terdiri dari variabel manajemen laba baik itu berbasis akrual maupun berbasis riil serta variabel kinerja perusahaan.

2. Uji Koefisien Determinasi

   Pengujian koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur peranan variabel independen dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen.

3. Uji F (Secara Simultan)

   Pengujian terhadap koefisien regresi secara bersama-sama untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas terhadap variabel

terikat dilakukan dengan menggunakan Uji-F. Adapun rumus Fhitung adalah sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / (k-1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Kriteria pengambilan keputusan dengan taraf signifikan $\alpha = 5\%$ adalah jika Fhitung > Ftabel berarti Ho ditolak dan Ha diterima.

4. Uji Parsial (Uji t)
   Uji parsial atau uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:
   a. Jika thitung > t_{tabel}, maka Ha terdukung yang artinya terdapat pengaruh.
      Jika thitung < t_{tabel}, maka Ha tidak terdukung yang artinya tidak terdapat pengaruh.
   b. Berdasarkan level signifikansi, kriterianya adalah: Jika signifikansi > 0,05 maka Ha tidak terdukung. Jika signifikansi < 0,05 maka Ha terdukung.

Untuk membantu dalam menganalisis maka diperlukan operasional varibel. Dalam buku ini juga dijelaskan langkah-langkah dalam mengoperasikan variable-variabel yang akan diuji tersebut yang dibuat secara sistematis yang dalam operasional variabel.

Pada Pengukuran Variabel dimana bagian ini menyajikan cara pengukuran variabel – variabel penelitian. Ada tiga kelompok variabel yaitu: Variabel independen, variabel dependen, variabel mediasi dan variabel Kontrol. Satu variabel independen adalah koneksi politik. Dua variabel mediasi adalah manajemen laba riil dan manajemen laba akrual. Satu Variabel Dependen adalah kinerja perusahaan. Beberapa variabel kontrol diantaranya adalah *Size*, *Leverage*, dan *Sales Growth.* Secara ringkas pengukuran variabel independen, variabel dependen, variabel variabel mediasi, dan variabel kontrol dalam buku ini sebagai berikut.

Tabel 3 Operasional variabel

Variabel	Penjelasan
Koneksi Politik	Diukur dengan variabel dummy: (1) CABIBOARDi,t = 1, jika anggota dewan perusahaan pernah atau sedang menjadi pejabat tinggi negara dalam tingkatan kabinet pemerintahan dan 0, jika tidak. MILIBOARDi,t = 1, jika anggota dewan perusahaan mempunyai karir dalam militer (TNI atau POLRI) dengan pangkat setingkat jenderal, sebaliknya 0, jika tidak. (2) GOVBANKi,j = 1, jika perusahaan mempunyai pendanaan hutang bank BUMN atau pinjaman pemerintah; sebaliknya 0, jika tidak.
Manajemen Laba Akrual	Manajemen laba akrual diukur dengan menggunakan *discretionarry accruals Modified* Jones.
Manajemen Laba Riil	Manajemen laba riil diukur dengan menggunakan tiga cara yaitu abnormal cash flow from operation, abnormal production, dan abnormal discretionary expenses (Roychowdhury, 2006), setelah itu digunakan Rem_Index untuk menghitung manajemen laba riil secara keseluruhan. cara yaitu *abnormal cash flow from operation*, *abnormal production*, dan *abnormal discretionary expenses* (Roychowdhury, 2006), setelah itu digunakan *Rem_Index* untuk menghitung manajemen laba riil secara keseluruhan (Cohen et al., 2008).

Variabel	Penjelasan
Kinerja Perusahaan	Diukur dengan Tobin's Q
Ukuran perusahaan (*Size*)	Diukur dengan logaritma natural dari total aset
Leverage	Diukur dengan total utang jangka panjang dibagi total aset.

Definisi operasional variabel digunakan untuk mengoperasionalkan konsep-konsep penelitian terkait variabel penelitian serta cara pengukurannya. Definisi opersional variabel penelitian dalam buku ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Koneksi Politik sebagai Variabel Independen

Gomez dan Jomo (1997) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai koneksi politik adalah perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah. Perusahaan ini sering disebut perusahaan risk taker karena sering menggunakan pengaruh politisnya untuk mendapatkan akses yang lebih mudah untuk memperoleh pinjaman (Yoshihara, 1998). Buku ini mengukur keberadaan koneksi politik pada perusahaan dengan dua cara, yaitu: (1) keberadaan anggota dewan perusahaan (direksi dan komisaris) yang mempunyai pengalaman politik tingkat nasional dan (2) keberadaan pendanaan hutang bank BUMN atau pinjaman pemerintah. Ukuran pertama memproksi melalui formasi dengan menjadi koneksi politik, sedangkan ukuran kedua memproksi melalui hasil (*outcomes*) dari koneksi politik. Kedua proksi yang berbeda tersebut diharapkan dapat menangkap keberadaan koneksi politik di Indonesia.

Proksi keberadaan koneksi politik yang pertama diidentifikasi melalui keberadaan anggota dewan perusahaan yang memiliki pengalaman politik tingkat nasional. Kelebihan proksi ini adalah dapat terobservasi secara langsung atau dapat diidentifikasi secara lebih eksplisit keberadaannya pada

perusahaan. Literatur koneksi politik sering kali menerapkan keberadaan dewan yang terkoneksi politik sebagai cara untuk mengidentifikasi perusahaan berkoneksi politis, seperti: Faccio (2006) pada perusaan dunia, Khwaja dan Mian (2005) pada perusahaan Pakistan, dan Goldman, Rocholl, dan So (2007) pada perusahaan Amerika Serikat. Adanya dewan perusahaan yang mempunyai latar belakang politik tingkat atas menyediakan satu kondisi yang mencukupi untuk terlibat dalam peran politik yang bisa berguna bagi perusahaan. Kehadiran politisi bisa diperlukan perusahaan, misalnya ketika menghadapi perebutan proyek atau pencarian dana pada sumber yang berbiaya murah.

Buku ini mengukur keberadaan koneksi politik pada perusahaan dengan mengindentifikasikan keberadaan dewan perusahaan yang sebelumnya pernah atau sedang menjadi pejabat tinggi negara baik dalam posisi tinggi pemerintahan (setingkat kabinet) maupun militer (pangkat jenderal) di Indonesia. Sumber data adalah susunan dewan komisaris dan direksi dari seluruh perusahaan dalam sample penelitian. Nama-nama dewan komisaris dan direksi tersebut ditelusuri sejarah karir berdasarkan berbagai informasi. Sumber informasi penting ialah susunan kabinet pemerintahan pada periode Yudhoyono dan Jokowidodo. Menariknya, keberadaan dewan perusahaan yang mempunyai pengalaman politik tingkat nasional nampaknya merupakan satu fenomena baru di indonesia sesudah masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada deskripsi sample perusahaan Indonesia oleh Faccio (2006) keberadaan koneksi politik yang diidentifikasikan melalui *directorship* adalah nol. Sementara pada era pertengahan 2000-an, nama-nama mantan pejabat tinggi negara telah muncul sebagai dewan komisaris pada perusahaan terbuka.

Variabel koneksi politik diukur secara tahunan untuk tiap perusahaan dan merupakan variabel indikator (*dummy*), yang bernilai 1 untuk perusahaan yang mempunyai dewan perusahaan yang berkonesi politis. Guna penyelidik mendalam mengenai keberadaan koneksi politis melalui dewan perusahaan, buku ini membedakan antara dewan yang

berkonksi secara murni politik (berpengalam dalam posisi kabinet atau sederajat) dan dewan berkarir militer (pangkat pada perwira tinggi atau pada tingkat jenderal baik TNI atau Polri). Dua ukuran koneksi politis yang pertama dinyatakan sebagai variabel indikator *(dummy)* sebagai.

CABIBOARDi,t = 1, jika anggota dewan perusahaan pernah atau sedang menjadi pejabat tinggi negara dalam tingkatan kabinet pemerintahan dan 0, jika tidak.

MILIBOARDi,t = 1, jika anggota dewan perusahaan mempunyai karir dalam militer (TNI atau POLRI) dengan pangkat setingkat jenderal, sebaliknya 0, jika tidak.

Prosedur tersebut akan menghasilkan masing-masing satu observasi CABIBOARD dan MILIBOARD untuk tiap tahun tiap perusahaan. Nilai-nilai yang mungkin akan terbatas hanya pada nilai 0 atau 1. Nilai 1 menunjukkan adanya anggota Dewan yang mempunyai kedekatan politik sehingga mencerminkan keberadaan koneksi politis pada perusahaan.

Proksi perusahaan berkoneksi politis yang kedua diidentifikasi melalui pendanaan hutang yang diperoleh perusahaan dari BUMN/BUMD atau pinjaman pemerintah. Proksi ini diajukan dengan mengindentifikasi hasil (*outcomes*) dari keberadaan koneksi politik. Studi-studi koneksi politik menunjukkan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik mendapatkan akses yang lebih besar pada pinjaman bank. Claessens, Feijen, dan Laeven (2008) menemukan adanya peningkatan hutang bank pada perusahaan yang terkoneksi politik selama satu periode setelah pemilihan umum. Selain itu, Khwaja dan Mian (2005) menunjukkan adanya perlakuan istimewa dalam akses pendanaan bank hanya terjadi pada bank pemerintah dan tidak pada bank privat. Penelitian yang dilakukan oleh Khwaja dan Mian menemukan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik meminjam 45 persen lebih besar dan mempunyai tingkat gagal bayar 50 persen lebih tinggi atas pinjaman tersebut. Selain itu, Dinc (2005) menunjukkan bahwa para politisi di negara berkembang mempengaruhi bank pemerintah agar mendistribusikan pinjaman kepada para

pendukungnya. Menurut Dinc, politisi bisa menghadiahi rekanan dan menghukum penentang dengan menggunakan pengaruh pada bank milik pemerintah.

Hasil – hasil studi tersebut mengindikasikan bahwa pendanaan bank terlebih lagi bank pemerintah merupakan satu saluran penting dari beroperasinya koneksi politis pada perusahaan. Lebih besarnya hutang bank pemerintah bisa diinterpretasikan sebagai lebih mudahnya sumber pendanaan perusahaan dari bank pemerintah. Oleh karena itu, adanya kedekatan dengan bank BUMN atau pinjaman pemerintah bisa dikatakan secara longgar sebagai hasil dari keberadaan koneksi politis. Proksi koneksi politis yang kedua dinyatakan sebagai variabel indikator (*dummy*) berikut.

GOVBANKi,j = 1, jika perusahaan mempunyai pendanaan hutang bank BUMN atau pinjaman pemerintah; sebaliknya 0, jika tidak.

GOVBANK untuk tiap tahun per perusahaan. Nilai *GOVBANK* = 1 menunjukan adanya pendanaan hutang bank BUMN atau peminjaman pemerintah perusahaan sehingga mencerminkan kedekatan perusahaan dengan pemerinatah, dan karenya memiliki derajat tinggi dalam koneksi politik.

2. Manajemen Laba Akrual sebagai Variabel Mediasi

Manajemen laba (*earnings management*) terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan (*judgment*) dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk merubah laporan keuangan dengan tujuan untuk menyesatkan beberapa *stakeholders* tentang kinerja ekonomi perusahaan atau mempengaruhi hasil perjanjian (kontrak) yang bergantung pada angka- angka akuntansi yang dilaporkan (Healy dan Wahlen, 1999).

Ukuran manajemen laba pada buku ini adalah nilai *discretionary accrual* (DA) yang dideteksi dengan menggunakan *modified* Jones (1991). *Discretionary accrual* merupakan selisih *total accrual* dengan *non discretionary accrual*. Penggunaan *modified* Jones dalam mendeteksi manajemen laba dikarenakan model ini paling baik dibandingkan model lainnya (Dochow *et al.*,1995).

Penggunaan *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba dihitung dengan menggunakan *Modified Jones Model* dengan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{TAit = NIit - OCFit}$$

Nilai *total accrual* (TA) yang diestimasi dengan persamaan regresi *ordinary least square* (OLS) sebagai berikut:

$$\mathbf{TAit/A\ it\text{-}1 = \alpha1\ (1/A\ it\text{-}1) + \alpha2\ (\Delta REVit - \Delta RECit/\ A\ it\text{-}1) + \alpha3(PPEit/A\ it\text{-}1) + \varepsilon}$$

Dengan menggunakan koefisien di atas, nilai *non discretionary accruals* (NDA) dapat dihitung dengan rumus:

$$\mathbf{NDA = \alpha1\ (1/A\ it\text{-}1) + \alpha2(\Delta REVit - \Delta RECit/\ A\ it\text{-}1) + \alpha3\ (PPEit/A\ it\text{-}1}$$

Selanjutnya, *discretionary accrual* (DA) dapat dihitung sebagai berikut.

$$\mathbf{DAit = (TAit/A\ it\text{-}1) - NDAit}$$

Keterangan:

DA_{it} = *Discretionary Accruals* perusahaan I pada Periode ke t

NDA_{it} = *Non Discretionary Accruals* perusahaan I pada periode ke t

TA_{it} = Total akrual perusahaan i pada periode t

N_{it} = Laba bersih perusahaan i pada periode t

A_{it-1} = Total aktiva perusahaan i pada periode t-1

ΔREV_t = Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode t

ΔREC_t = Perubahan piutang perusahaan pada periode t

PPE_t = Aktiva tetap perusahaan pada period t

e = *error*

3. Manajemen Laba Riil sebagai Variabel Mediasi

Manajemen laba riil terjadi ketika adanya perubahan dalam praktik aktivitas operasi normal perusahaan yang dimotivasi oleh keinginan manajer untuk menyesatkan para pemangku kepentingan dengan meyakinkan bahwa tujuan pelaporan keuangan telah tercapai (Roychowdhury, 2006). Ada tiga model yang digunakan oleh Roychowdhury (2006) dalam mengukur manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil.

Tiga model tersebut yang digunakan dalam buku ini dan dapat dijelaskan seperti berikut:

1. Manipulasi Aktivitas Riil melalui Arus Kas kegiatan Operasi

Model regresi untuk mencari arus kas kegiatan operasi normal perusahaan sebagai berikut.

$$\mathbf{CFO_t/A_{t-1} = \alpha_0 + \alpha_1(1/A_{t-1}) + \beta_1(S_t/A_{t-1}) + \beta_2(\Delta S_t/A_{t-1}) + \epsilon_t}$$

Keterangan:

a. CFO_t/A_{t-} : Arus kas kegiatan operasi pada tahun t yang diskala dengan total aktiva pada tahun t-1.

b. $A_1(1/A_{t-1})$: Intersep yang diskala dengan total aktiva pada tahun t-1 dengan tujuan supaya arus kas kegiatan operasi tidak memiliki nilai 0 ketika penjualan dan lag penjualan bernilai 0.

c. S_t/A_{t-1} : Penjualan pada tahun t yang diskala dengan total aktiva pada tahun t-1.

d. $\Delta S_t/A_{t-1}$: Penjualan pada tahun t dikurangi penjualan pada tahun t-1 yang diskala dengan total aktiva pada tahun t-1.

e. A_0 : Konstanta.

f. ϵ_t : *Error term* pada tahun t.

Regresi untuk mencari nilai arus kas kegiatan operasi normal perusahaan tidak dilakukan dengan uji asumsi klasik karena nilai yang dibutuhkan adalah nilai koefisien dari hasil regresi tersebut. Dalam buku ini yang digunakan adalah arus kas kegiatan operasi abnormal perusahaan yangmerupakan selisih

dari nilai arus kas kegiatan operasi aktual dengan arus kas kegiatan operasi normal yang dihitung dengan menggunakan koefisien estimasi yang diperoleh dari model persamaan diatas.

$$\mathbf{ABN_CFO = CFO_t - CFO_{t/At-1}}$$

2. Manipulasi Aktivitas Riil melalui Biaya Produksi

Biaya produksi dalam buku ini didefinisikan sebagai jumlah dari harga pokok penjualan (HPP) dan perubahan nilai persediaan sepanjang tahun penelitian atau selisih persediaan tahun aktual dengan tahun sebelumnya. Model untuk menentukan harga pokok penjualan merupakan fungsi linear yang dinyatakan sebegai berikut.

$$\mathbf{COGS_{t/At-1} = \alpha 0 + \alpha 1(1/At-1) + \beta(St/At-1) + \epsilon t}$$

Untuk menghitung pertumbuhan perusahaan digunakan model sebagai berikut:

$$\mathbf{\Delta INV_{t/At-1} = \alpha 0 + \alpha 1(1/At-1) + \beta 1(\Delta St/At-1) + \beta 2(\Delta St-1/At-1) + \epsilon t}$$

Dengan menggunakan dua model persamaan diatas, maka biaya produksi normal perusahaan dapat diestimasi dengan model sebagai berikut.

$$\mathbf{PROD_{t/At-1} = \alpha 0 + \alpha 1(1/At-1) + \beta 1(St/At-1) + \beta 2(\Delta St/At-1) + \beta 3(\Delta St-1/At-1) + \epsilon t}$$

Keterangan:

$PROD_{t/At-1}$	:	Biaya produksi pada tahun t yang diskala dengan total aktiva pada tahun t-1, dimana $PROD_t = COGS_t + \Delta INV_t + \alpha (1/A_{t-1})$: Intersep yang diskala dengan total aktiva pada tahun t-1 dengan tujuan supaya nilai biaya produksi tidak memiliki nilai 0 ketika penjualan dan lag penjualan bernilai 0.
$S_{t/A_{t-1}}$	:	Penjualan pada tahun t yang diskala dengan total aktiva pada tahun t-1.

$\Delta St/At\text{-}1$	:	Penjualan pada tahun t dikurangi penjualan pada tahun t-1 yang diskala dengan total aktiva pada tahun t-1.
$\Delta St\text{-}1/At\text{-}1$	:	Perubahan penjualan pada tahun t-1 yang diskala dengan total aktiva pada tahun t-1.
$\alpha 0$	:	Konstanta
ϵt	:	*Error term* pada tahun t.

Seperti halnya dengan arus kas kegiatan operasi normal perusahaan, nilai estimasi koefisien dari persamaan regresi diatas dapat digunakan untuk menghitung nilai biaya produksi normal perusahaan. Untuk mencari nilai biaya produksi abnormal peruusahaan dapat diperoleh dengan cara mengurangkan antara nilai biaya produksi aktual dengan biaya produksi normal yang dihitung dengan menggunakan koefisien estimasi dari model di atas.

$$\mathbf{ABN_PROD = PROD_t - PROD_t/A_{t-1}}$$

3. Manipulasi Aktivitas Riil melalui Biaya Diskresioner

Dalam buku ini, biaya diskresioner didefenisikan sebagai jumlah biaya iklan, biaya riset dan pengembangan, biaya penjualan, dan administrasi dan umum. Model regresi yang digunakan untuk menghitung tingkat normal biaya diskresioner perusahaan sebagai berikut.

$$\mathbf{DISEXP_t/A_{t-1} = \alpha 0 + \alpha 1(1/A_{t-1}) + \beta(S_{t-1}/A_{t-1}) + \epsilon t}$$

Keterangan:

$DISEXPt/At\text{-}1$	:	Biaya diskresioner pada tahun t yang diskala dengan total aktiva tahun t-1
$\alpha(1/At\text{-}1)$	:	Intersep yang diskala dengan total aktiva pada tahun t-1 dengan tujuan supaya biaya diskresioner tidak memiliki nilai 0 ketika penjualan dan lagi penjualan bernilai 0.
$St\text{-}1/At\text{-}1$	:	Penjualan pada tahun t-1 yang diskala dengan total aktiva pada tahun t-1.

Dalam buku ini akan dihitung nilai biaya diskresioner abnormal. Nilai koefisien estimasi persamaan regresi di atas dapat digunakan untuk menghitung nilai biaya diskresioner normal, sehingga untuk mencari nilai biaya diskresioner abnormal dapat diperoleh dengan cara menguragkan nialai biaya diskresioner aktual dengan biaya diskresioner normal yang dihitung dengan menggunakan koefisien estimasi dari persamaan di atas.

ABN_DISEXP = DISEXPt – DISEXPt/At-1

Ketiga proksi manajemen laba riil di atas memiliki arah yang berbeda-beda. Untuk proksi manajemen laba riil melalui arus kas aktivitas operasi dan biaya diskresioner mempunyai arah yang negatif, artinya bahwa semakin kecil nilainya (semakin negatif) maka menunjukkan semakin besar manajemen laba dilakukan. Sedangkan untuk proksi manajemen laba melalui biaya produksi mempunyai arah yang positif, artinya bahwa semakin besar nilainya (semakin positif) maka menunjukkan semakin besar manajemen laba dilakukan.

Dengan mengikuti Cohen *et al.* (2008) untuk menangkap manajemen laba riil secara keseluruhan maka digunakan *Rem_Index* yang dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

Rem_Index = -standardized Abn_CFO + standardized Abn_Prod – standardized Abn_Disexp

Keterangan:

standardized Abn_CFO	:	(Abn_CFO – rata-rata Abn_CFO)/standar deviasi Abn_CFO
standardized Abn_Prod	:	(Abn_Prod – rata-rata Abn_Prod)/standar deviasi Abn_Prod standardized
Abn_Disexp	:	(Abn_Disexp – rata-rata Abn_Disexp)/standar deviasi Abn-Disexp

4. Kinerja Perusahaan sebagai variabel Independent

Kinerja perusahaan yang digunakan dalam buku ini diukur dengan menggunakan Tobin's Q. Tobin's Q dipilih sebagai proksi dalam pengukuran kinerja perusahaan berdasarkan nilai pasar dengan mengikuti penelitian yang dilakukan oleh McConnel dan Servaes (1990) dan Morck *et al.* (1988) yang menyatakan bahwa Tobin's Q adalah ukuran penting dan diterima secara luas untuk kinerja perusahaan. Selain itu, Anderson dan Reeb (2003) serta Demesetz dan Villalonga (2002) memilih Tobin's Q sebagai proksi utama dari kinerja perusahaan untuk mengestimasi nilai pasar perusahaan.

Sukamulja (2004) menyatakan bahwa Tobin's Q sebagai proksi kinerja perusahaan dinilai dapat memberikan informasi yang paling baik karena mememasukan semua unsur hutang dan modal saham perusahaan, tidak hanya saham biasa dan ekuitas perusahaan tetapi juga seluruh aset perusahaan. Selain itu, Brealey dan Myers (2000) menyatakan bahwa perusahaan dengan Tobin's Q yang tinggi biasanya memiliki *brand image* perusahaan yang kuat. Untuk menghitung kinerja perusahaan dengan menggunakan Tobin's Q dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{Q = (EMV + D) + (EBV + D)}$$

Keterangan:

Q : Kinerja Perusahaan

EMV : Nilai pasar ekuitas (*closing price* X jumlah saham beredar)

D : Nilai buku dari total hutang

EBV : Nilai buku dari total aset

5. Ukuran perusahaan (Size) sebagai Variabel Control

Ukuran perusahaan adalah gambaran mengenai besar kecilnya suatu perusahaan (Ferry dan Jones, 1979). Variabel yang digunakan untuk mengukur size adalah dengan menggunakan Natural Logarithm total asset yang dimiliki perusahaan (Guire *et al.,* 2011).

6. *Leverage* sebagai Variabel Control

Leverage didefinisikan sebagai sumber pendanaan eksternal perusahaan melalui hutang. Untuk mengukur variabel leverage digunakan hurtang jangka panjang dibagi dengan total aset perusahaan (Badertscher *et al.,* 2009).

7. *Sales Growth* (Pertumbuhan Penjualan) sebagai Variabel Control

Pertumbuhan penjualan ditunjukkan dengan adanya perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Perkembangan tingkat penjualan dalam perusahaan dapat mengalami peningkatan ataupun penurunan. Sehingga, dalam buku ini pertumbuhan penjualan diukur dengan cara penjualan akhir periode dikurangi dengan penjualan awal periode dibagi dengan penjualan awal periode (Badertscher *et al.,* 2009).

BAB 2

DASAR KELEMBAGAAN DALAM PERUSAHAAN

A. Teori Keagenan, Signaling Dan Kelembagaan

1. Teori Keagenan

Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana ada satu atau lebih orang (yaitu *principal* atau pemegang saham atau pemilik) melibatkan pihak lain (yaitu *agen* atau manajemen) untuk bertindak atas nama pemilik dalam menjalankan aktivitas bisnis perusahaan. Dengan diberikan wewenang kepada manajemen perusahaan maka pemilik perusahaan berharap bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan mereka dengan menggunakan sumber daya yang dipercayakan oleh pemilik secara efektif dan efisien. Dengan demikian, para pemilik berharap manajemen dapat memaksimumkan nilai pemegang saham dalam jangka waktu pendek maupun panjang.

Namun, dalam suatu bisnis tetap saja ada berbagai konflik yang terjadi. Konflik tersebut berupa konflik kepentingan, yaitu konflik antara manajer dengan pemegang saham. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa jika kedua pihak yaitu principal dan agent berusaha untuk memaksimumkan *utilitas* masing - masing, maka ada alasan kuat untuk percaya bahwa agen tidak akan selalu bertindak untuk kepentingan *principal*. Prinsipal dapat membatasi divergensi kepentingannya dengan memberikan insentif

yang sesuai untuk agen. Selain itu Prinsipal bersedia untuk mengeluarkan biaya pengawasan (*monitoring expenditure*) guna membatasi penyimpangan yang dilakukan oleh agen. Semua itu disebut dengan biaya keagenan (*agency costs*), Komari dan Faisal (2006).

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan biaya keagenan (*agency cost*) dari tiga sisi, yaitu.

a. Biaya pengawasan oleh prinsipal (*the monitoring expenditures by principal*)
b. Biaya sumber daya oleh agen (*the bonding expenditures by agent*)
c. *Residual loss*

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Gunarsih (2004), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa biaya *monitoring* (*monitoring expenditure*) dikeluarkan oleh *principal* untuk membatasi aktivitas agen yang berbeda dengan kepentingan *principal*. Biaya sumber daya (*bonding expenditure*) merupakan biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk memastikan kepada *principal* bahwa agen tidak akan melakukan tindakan yang merugikan *principal*. Contoh dari *bonding expenditure* adalah biaya yang dikeluarkan oleh *owner – manager* untuk memberikan jaminan kepada para pemegang saham luar (*outside equity holder*) bahwa manajer akan membatasi tindakan yang dapat menimbulkan keuntungan non kas bagi manajer (*non pecuniary benefits*).

Kerugian *residual (residual loss)* merupakan nilai uang yang ekuivalen dengan penurunan kesejahteraan yang dialami oleh principal sebagai akibat dari adanya divergensi, yaitu perbedaan antara keputusan agen dengan keputusan – keputusan yang akan memaksimumkan kesejahteraan *principa*l. Gunarsih (2004) memberikan contoh dari kerugian *residual* yaitu menurunnya nilai pasar perusahaan yang ditimbulkan dari penjualan ekuitas oleh *outside blockholder* yang disebabkan oleh tidak terlaksananya kegiatan monitoring dan bonding.

Untuk mengatasi masalah keagenan dan *agency cost*, maka terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan, antara lain, adanya kontrak yang baik antara *principal* dan agen yang mampu menjelaskan spesikasi hal – hal apa saja yang menjadi tugas manajer dalam mengelola kekayaan milik pemegang saham dan kontrak yang jelas mengenai pembagian hasil antara pemegang saham dengan manajer. Selain itu ialah dengan meningkatkan jumlah kepemilikan manajerial (Rahmayani, 2010). Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa meningkatkan jumlah kepemilikan manajerial akan memberikan derajat kesamaan kepentingan antara *principal* dengan agen. Biaya *agency* dapat juga dikurangi dengan peningkatan kegiatan pengawasan dengan cara memberikan kesempatan bagi investor – investor institusional. Namun, dengan memberikan kesempatan pada pihak institusional untuk memiliki saham perusahaan juga perlu diperhatikan oleh pemilik perusahaan.

Hal ini terutama ketika terjadi kompromi antara investor institusional mayoritas dengan pihak manajemen sehingga mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas. Hal ini dijelaskan oleh Pound (1998) dalam Pakaryaningsih (2008) sebagai *The strategic alignment hypothesis*. Pound (1998) menyatakan bahwa investor institusional mayoritas memiliki kecenderungan untuk berkompromi atau berpihak kepada manajemen dan mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas. Anggapan bahwa manajemen sering mengambil tindakan atau kebijakan yang non-optimal dan mengarah pada kepentingan pribadi, mengakibatkan strategi aliansi antara investor institusional mayoritas dengan manajemen, ditanggapi secara negatif oleh pasar. Hal tersebut dapat berdampak pada penurunan harga saham perusahaan di pasar modal. Hipotesis lain dari Pound (1998) dalam Pakaryaningsih (2008) yaitu *the conflict of interest hypothesis.* Hipotesis ini pada dasarnya memiliki konsep yang sama dengan the *strategic alignment hypothesis,* yaitu

kecenderungan investor institusional mayoritas untuk mengurangi konflik dengan melakukan kompromi dan aliansi dengan pihak manajemen. Dengan demikian strategi yang dilakukan oleh investor institusional dapat dinilai negatif oleh pasar sehingga berdampak pada penurunan nilai perusahaan.

Dua hipotesis yang disampaikan oleh Pound (1998) dapat terjadi pada perusahaan manapun baik yang berkoneksi politik maupun perusahaan yang tidak terkoneksi politik. Konflik antara manajemen dengan pemegang saham menjadi lebih rumit ketika aliansi terjadi pada perusahaan yang terkoneksi politik sebab pihak yang terlibat menjadi lebih luas. Oleh karena itu, teori agensi juga dapat digunakan untuk menjelaskan konflik yang terjadi antara manajemen dan pemegang saham pada perusahaan yang terkoneksi politik.

2. Teori *Signaling*

Signal atau isyarat adalah suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Teori signaling menyatakan bahwa perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja akan memberikan signal pada pasar dengan demikian pasar diharapkan dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk (Brigham dan Houston, 2001).

Jogiyanto (2009) menyatakan bahwa informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan volume perdagangan saham.

Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis

informasi tersebut sebagai signal baik (*good news*) atau signal buruk (*bad news*). Hasil dari interpretasi informasi inilah nantinya yang akan mempengaruhi permintaan dan penawaran dari investor. Jika banyak investor berpandangan pesimis akibat *bad news* dari informasi yang diterima, maka ia akan mengurangi jumlah pembelian yang terjadi dan akan menambah penawaran di pasar sehingga harga akan terdorong turun. Sebaliknya jika investor memandang optimis akibat *good news* dari informasi yang diterima, maka ia akan menambah jumlah pembelian yang terjadi dan akan menurunkan penawaran di pasar sehingga harga akan terdorong naik (Sharpe, Alexander dan Bailey, 2000).

3. Teori Kelembagaan

Indonesia sebagai Negara demokrasi memiliki salah satu konsekuensi dari pelaksanaan demokrasi yaitu adanya jarak antara rakyat yang berdaulat dengan pemerintahan yang dibentuk untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Untuk itu diperlukan instrumen yang dapat mewakili rakyat, baik di parlemen maupun yang duduk sebagai pejabat publik pemerintahan yang demokratis membutuhkan mekanisme dan institusi dari kehendak yang di wakili. Paling tidak terdapat dua instrumen yang saling berhubungan, yaitu keberadaan partai politik dan pelaksanaan pemilihan umum (Asshidiqie, 2006). Sebagai negara berkembang, Indonesia memerlukan adanya institusi atau lembaga untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial, dan ekonomi rakyat (North, 1991). Aturan-aturan tersebut terdiri dari aturan-aturan formal dan informal. Seperti teori kelembagaan yang di kemukakan oleh Meyer dan Rowan (1977) bahwa organisasi berada dalam lingkungan sosial sehingga keputusan yang diambil dalam sebuah organisasi akan dipengaruhi oleh organisasi atau institusi yang lain, termasuk pemerintah.

Menurut North (1991), peran institusi formal maupun informal sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Tanpa adanya institusi yang baik, biaya transaksi dalam

setiap kegiatan ekonomi akan menjadi lebih tinggi. Kehadiran institusi sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan para pelaku ekonom di dalam pasar sangat menentukan kemajuan ekonomi suatu bangsa. Institusi tersebut mencakup tradisi sosial, budaya, politik, hukum, dan ideologi. Oleh karena itu, peran institusi sangat sentral dalam pembangunan ekonomi (North, 1991).

B. Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Nuraeni (2010) berpendapat bahwa kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola mengalokasikan sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian, kinerja merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nuraeni (2010) juga menjelaskan bahwa tujuan dari penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membedakan hasil dan tindakan yang diinginkan.

Ada beberapa pihak yang berkepentingan terhadap penilaian kinerja suatu perusahaan yaitu pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Pihak – pihak tersebut diantaranya, pemilik (investor), manajer, pemberi pinjaman dan kreditor, karyawan, organisasi pekerja, agen pemerintah dan masyarakat umum (publik). Untuk menilai kinerja tersebut, maka pihak internal dan eksternal menilai berdasarkan tujuan mereka.

Pihak pertama yang berkepentingan terhadap penilaian kinerja perusahaan adalah manajemen perusahaan. Hal ini dikarenakan manajemen perusahaan yang bertanggung jawab atas kinerja perusahaan. Mereka bertanggung jawab atas efisiensi operasi, profitabilitas jangka pendek dan jangka panjang, serta penggunaan yang efektif dan efisien atas sumber

daya yang dikelola. Selanjutnya, pihak yang berkepentingan terhadap penilaian kinerja perusahaan adalah pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan secara khusus berkepentingan atas profitabilitas baik jangka pendek maupun jangka panjang dari modal yang telah ditanamkan. Pemilik mengharapkan laba perusahaan dan dividen yang dibagikan meningkat.

Pemberi pinjaman atau kreditor yang memberikan dana bagi perusahaan untuk berbagai jangka waktu. Mereka berkepentingan pada kemampuan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman yang jatuh tempo serta kemampuan untuk membayar kembali pokok pinjaman.

Karyawan berkepentingan untuk menilai kemampuan perusahaan membayar upah. Pemerintah berkepentingan dalam hal kemampuan perusahaan membayar pajak. Masyarakat umum (publik) berkepentingan dalam hal kemampuan perusahaan untuk memenuhi berbagai kewajiban sosial dan lingkungan.

Dari berbagai kepentingan tersebut, secara garis besar kinerja perusahaan dapat diukur menggunakan rasio – rasio berikut.

1. Rasio likuiditas,
2. Rasio aktivitas,
3. Rasio profitabilitas,
4. Rasio solvabilitas/ *leverage,* dan
5. Rasio pasar (*market ratio*).

Rasio likuiditas terkait dengan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek kepada pemberi pinjaman atau kreditor. Rasio aktivitas terkait dengan kemampuan perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki seoptimal mungkin yang kemudian dibandingkan dengan industri sejenis sehingga dapat diketahui tingkat efisiensi perusahaan dalam industri.

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang terkait penjualan, asset, atau pun laba atas modal sendiri. Ada beberapa macam rasio profitabilitas, antara lain *gross profit margin* (GPM),

net profit margin (NPM), *return on asset* (ROA), *return on equity* (ROE), dan *operating ratio*.

Rasio solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka panjangnya. Nuraeni (2010) berpendapat bahwa *financial leverage* menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasinya. Perusahaan yang tidak mempunyai leverage berarti bahwa perusahaan tersebut 100% menggunakan modal sendiri. Rasio pasar memberikan indikasi bagi manajemen mengenai penilaian investor terhadap kinerja perusahaan di masa lampau dan prospeknya di masa depan. Rasio pasar tercermin dari harga saham perusahaan. Beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur nilai pasar perusahaan antara lain *price earning ratio* (PER), *market- to- book ratio*, Tobin's Q, dan *price/ cash flow ratio*. Masing – masing rasio di atas memiliki karakteristik yang berbeda dan masing – masing rasio tersebut memberikan informasi yang berbeda pula bagi manajemen serta investor.

BAB 3 MANAJEMEN LABA

A. Pengertian Manajemen Laba

Earning management dapat didefinisikan sebagai "adanya campur tangan manajemen dalam penentuan laba. Schipper (1989) menyebutkan: "*earning management* merupakan upaya-upaya manajemen dalam menggunakan pertimbangannya dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat menyesatkan para pengambil keputusan dalam menilai kinerja perusahaan atau dapat mempengaruhi kontrak-kontrak pendapatan yang telah ditetapkan berdasarkan angka-angka laporan keuangan (Healy dan Wahlen, 1998).

Menurut Sugiri (1998) manajemen laba atau *earning management* dapat dibagi menjadi dua definisi yaitu

1. Definisi sempit, *earning management* erat kaitannya dengan pemilihan metode akuntansi dan perilaku manajer dalam menentukan besarnya laba seputar komponen *discretionary accrual*s yaitu komponen akrual yang berada dalam kebijakan manajemen atau manajer untuk melakukan intervensi dalam proses pelaporan keuangan.

2. Definisi luas merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan atau mengurangi laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit dimana manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan pening katan/penurunan profitabilitas ekonomis jangka panjang unit tersebut.

Definisi-definisi di atas menjelaskan bahwa *earning management* merupakan tindakan dari manajer untuk memperbaiki kinerja dari perusahaan, baik manajer dan perusahaan akan memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. Terdapat berbagai motivasi yang mendorong dilakukannya *earning management* (Subramanyam dan Wild, 2010) antara lain meningkatkan kompensasi, menghindari persyaratan utang, memenuhi ramalan analysis, dan mempengaruhi harga saham. Menurut Scott (2009) yang menjadi motivasi dilakukannya manjemen laba adalah motivasi bonus, motivasi kontrak, motivasi politik, motivasi pajak, penggantian direktur dan mengkomunikasikan informasi ke investor. Lain halnya menurut Watts dan Zimmerman (1990) Teori akuntansi positif (*Positif Accounting Theory*) mengusulkan tiga hipotesis motivasi *earning management*, yaitu:

1. Hipotesis program bonus (*the bonus plan hypotesis*),
2. Hipotesis perjanjian hutang (*the debt covenant hypotesis*), dan
3. Hipotesis biaya politik (*the political cost hypotesis*)

Einsenhardt dalam Wibisono (2004) menjelaskan bahwa teori agency menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu (1) mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) menghindari resiko (*risk-averse*). Dalam teori keagenan ini, manajemen selalu berusaha untuk memaksimumkan fungsi utilitasnya. Mengingat manajemen memiliki keleluasaan untuk memilih salah satu kebijakan akuntansi dari prinsip yang berlaku umum, maka wajar saja jika kemudian muncul pemikiran bahwa manajemen akan memilih metode akuntansi yang secara spesifik akan membantu manajemen dalam meraih tujuannya.

Sesuai dengan teori agensi yang menyatakan bahwa management akan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan investor di pasar modal yang lebih dikenal dengan kondisi *asymmetric information*. Jika manajemen ingin memaksimumkan nilai untuk pemegang saham saat ini

(*current stockholder*), bukan pemegang saham baru, maka ada kecendrungan

1. Jika perusahaan memiliki prospek yang cerah, manajemen tidak akan menerbitkan saham baru tetapi menggunakan laba di tahan, dan
2. Jika prospek kurang baik, manajemen menerbitkan saham baru untuk memperoleh dana (atmaja, 2008).

Tiga jenis strategi dalam *earning management* (Subramanyam dan Wild, 2010) yaitu

1. *Increasing Income,* meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode kini untuk membuat perusahaan dipandang lebih baik.
2. *Big Bath,* dilakukan melalui penghapusan (*Write-Off*) sebanyak mungkin pada satu periode. Periode yang dipilih biasanya periode dengan kinerja yang buruk (sering kali pada masa resesi di mana perusahaan lain juga melaporkan laba yang buruk) atau pada saat terjadi perubahan manajemen, merger ataupun restrukturisasi.
3. *Income smoothing*, manajer meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi fluktuasinya, dengan cara tidak melaporkan bagian laba pada periode yang baik dan menciptakan cadangan laba kemudian melaporkan laba tersebut pada saat periode buruk.

Rahayu (2009) ada dua cara yang dilakukan perusahaan seputar *earning management* yaitu

1. Manipulasi akuntansi/manipulasi laba akrual, merupakan selisih antara kas masuk bersih dari hasil operasi perusahaan dengan laba yang dilaporkan dalam laporan rugi/laba, yang dapat bersifat *non discretionay accrual* dan *discretionay accrual.*
2. Manipulasi non akuntansi/ manipulasi aktivitas nyata, perbedaan praktik operasi yang dilakukan dengan praktik operasi normal perusahaan di motivasi oleh keinginan manajemen untuk memberikan pemahaman yang salah kepada *stakeholder* agar mereka percaya bahwa tujuan pelaporan keuangan telah di capai sesuai dengan praktik

operasi normal perusahaan.

Tindakan tersebut tidak selalu memberikan kontribusi terhadap nilai perusahaan meskipun memungkinkan para manajer untuk memenuhi tujuan pelaporan. Beberapa metode manipulasi aktivitas nyata seperti diskon harga, pengeluaran discretionary, dan juga tindakan optimal dalam keadaan ekonomi tertentu (Roychowdhury, 2006).

Beberapa penelitian memberikan bukti tentang adanya *earning management* untuk tujuan pasar modal yaitu: Hastoro dan Yuliana (2010) penerapan *earning management* sangatlah penting terutama pada periode sebelum *IPO.* Sokarina (2006) Earning management yang diproksikan dengan akrual diskresioner berpengaruh negative terhadap return saham. (Beneish dan Vargus, 2002) yang menunjukkan bahwa persistensi income-increasing accrual lebih rendah jika diikuti oleh *abnormal insider selling* terindikasi dilakukannya *earning management* oportunistik untuk mendapatkan keuntungan dari pembelian atau penjualan saham.

B. Pengertian Manajemen Laba Akrual

Metode akrual merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengetahui adanya *earning management*. Metode akrual ini merupakan selisih antara kas masuk bersih dari hasil operasi perusahaan dengan laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Terdapat dua konsep akrual yaitu: *discretionary accrual* (akrual diskresioner) yaitu pengakuan akrual laba atau beban yang bebas tidak diatur dan merupakan pilihan kebijakan manajemen dan non *discretionary accrual* (akrual non diskresioner) adalah pengakuan akrual laba yang wajar, yang tunduk pada suatu standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Akrual diskresioner merupakan salah satu ukuran dari *earning management* sehingga biasanya digunakan untuk mendeteksi adanya *earning management*. Akrual diskresioner terdiri dari akrual diskresioner jangka pendek dan akrual diskresioner jangka panjang (Whelan dan McNamara 2004).

Menurut (Dechow, 1994) Akrual diskresioner jangka pendek memiliki waktu yang relatif pendek misalnya satu tahun atau kurang dari satu tahun (satu periode akuntansi) dan merupakan akrual yang melibatkan akun modal kerja dan menggambarkan perubahan dalam akun aktiva lancar dan utang lancar, sedangkan akrual diskresioner jangka panjang memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun (satu periode akuntansi) dan akrual diskresioner jangka panjang meliputi depresiasi, revaluasi aktiva, dan penyesuaian nilai wajar atas instrumen keuangan. Menurut Teoh *et al.* (1998) total akrual dibagi dalam akrual diskresioner jangka pendek atau disebut juga *working capital accruals* (WKA) dan akrual diskresioner jangka panjang atau disebut juga *non-working capital accruals* (NWKA). Alasannya karena para manajer memiliki beberapa pertimbangan yang besar pada beberapa akun tertentu dibanding lainnya. Whelan dan McNamara (2004), mengatakan kegunaan relatif atas komponen akrual diskresioner tergantung pada interval *return* yang akan diuji. Akrual jangka pendek yang waktunya kurang dari atau sampai satu tahun maka akrual tersebut paling relevan untuk interval *return* satu tahun, sedangkan akrual jangka panjang akan menjadi relevan pada interval *return* yang meningkat karena mempunyai periode waktu yang lebih panjang. Hasil kajian ini menunjukkan akrual jangka pendek dan akrual jangka panjang mempunyai pengaruh yang berbeda khususnya terhadap relevansi informasi laba dan nilai buku.

Motivasi manajemen akrual dalam sudut pandang *agency theory* dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori: *opportunistic* dan *signaling* (Beaver, 2002). Pada motivasi *opportunistic*, manajemen cenderung menyajikan laba lebih tinggi daripada yang sesungguhnya, karena berhubungan dengan kompensasi. Sementara pada motivasi *signaling*, manajemen cenderung manyajikan laba yang mempunyai kualitas karena berhubungan dengan evaluasi kinerja dan selanjutnya digunakan sebagai sinyal kepada pemegang saham.

Menurut Dechow dan Ilia (2001), Sejumlah studi menggunakan model kebijakan akrual untuk meneliti manipulasi dari akrual dalam mencapai tujuan *earning management*. Pendekatan yang paling banyak digunakan dalam pengujian *earning management* adalah model yang dikembangkan oleh Jones, dan dikenal dengan model Jones 1991. Menurut (Jones, 1991 dalam Rahayu, 2009) metode jones 1991 yaitu melakukan *firm specific regression* yang berarti akrual diskresioner diperoleh dengan membandingkan akrual tahun t, saat terjadinya manipulasi laba, dengan rata-rata. Pada prinsipnya pendekatan yang digunakan tidak jauh berbeda. Perbedaan penggunaannya biasanya tergantung pada konteks dimana penelitian tersebut dilakukan. Tetapi, secara umum penelitian tentang *earning management* menggunakan pengukuran berbasis akrual dalam mendeteksi ada atau tidaknya manipulasi. Penelitian sebelumnya yang mengungkapkan adanya *earning management* melalui akrual pada penawaran saham tambahan dilakukan oleh Teoh *et al*. (1998) bahwa perusahaan yang melakukan penawaran dengan cara menaikkan laba memiliki *return* saham yang rendah setelah periode penawaran tersebut.

Purnomo dan Pratiwi (2009) kemampuan menghasilkan laba suatu perusahaan dapat mendorong pihak manajemen untuk melakukan modifikasi laba baik dengan cara *income increasing* ataupun *accrual income decreasing accrual,* namun pengaruh tersebut cenderung lemah. Sedangkan Utomo dan Bachruddin (2005) menyatakan bahwa Penerapan *earning management* yang terjadi pada saat penawaran perdana saham yang tidak didukung kenaikan laba bersih dan arus kas dari operasi, bisa jadi karena *issuers* tidak ingin *earning management* yang diterapkan terdeteksi, dengan mendistorsi laporan keuangan pada prospektus. Peningkatan laba bersih dan arus kas dari kegiatan operasi pada periode- periode setelah penawaran perdana saham tetapi tidak dibuktikan adannya penerapan *earning management* disebabkan karena sifat *accruals* itu sendiri, dan kemungkinan adanya kewajiban pembayaran

dividen kepada para pemegang saham. Spohr (2002) mengatakan *earning management* dilakukan dengan akrual tetapi tidak terjadi sebelum IPO.

C. Manajemen Laba Akrual Dan Kinerja Keuangan Perusahaan

Manajer yang diberikan mandate oleh pemilik untuk mengelola suatu perusahaan lebih banyak memiliki informasi lebih terkait prospek perusahaan dimasa yang akan datang bila dibandingkan dengan pemilik perusahaan. Hal ini menimbulkan adanya kesenjangan informasi diantara pemilik dan manajer. Dengan adanya kesenjangan informasi informasi (asimetri informasi) sehingga manajer cenderung memanfaatkan kondisi tersebut dengan memanfaatkan fleksibilitas yang ada pada standar akuntansi untuk melakukan manajemen laba.

Manajemen perusahaan yang memiliki peranan penting dalam mengelola perusahaan percaya bahwa pasar modal akan mengkapitalisasi laba dan perusahaan tidak memiliki peranan penting dalam mempengaruhi pasar kecuali melalui laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, manajemen perusahaan akan berupaya untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui teknik akuntansi yang dapat mempengaruhi laba yang akan dilaporkan.

Dengan demikian, manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan melalui celah dari standar akuntansi akan memberikan sinyal positif bagi pemegang saham maupun kreditur bahwa kinerja perusahaan telah tercapai.Manajer berupaya untuk melakukan manajamen laba untuk meningkatkan kinerja perusahaan pada saat tertentu sehingga dapat menyesatkan pemilik mengenai kinerja. Yang sebenarnya. Ayres (1994) menjelaskan bahwa alasan dilakukannya manajemen laba yaitu

1. Manajemen laba dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham
2. Manajemen laba dapat memperbaiki hubungan dengan kreditor, dan

3. Manajememn laba dapat membuat investor tertarik untuk melakukan investasi terutama pada perusahaan yang telah *listed* di pasar modal.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardekani et al., (2012) menunjukkan bahwa manajemen laba akrual berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Selain itu, Darwis (2012) menyatakan bahwa manajemen laba disatu sisi dapa tmeningkatkan kinerja perusahaan dalam jangka pendek, namun disisi lain dapat berimplikasi negatif pada kinerjaj angka panjang perusahaan.

Perusahaan yang memanfaatkan akrual diskresioner dalam mengelola laba memiliki dampak negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Scott (2009) menjelaskan bahwa penggunaan akrual diskresioner dalam mengelola laba memiliki aturan tersendiri, yaitu *accrual reverse*. Jika perusahaan mencatat akrual dalam jumlah tertentu sehingga mengakibatkan laba naik pada periode berjalan, maka pada periode berikutnya nilai akrual tersebut berbalik dan akan mengurangi laba periode berikutnya. Hal ini menyebabkan manajemen perusahaan untuk tidak berperilaku oportunistik dalam mengelola laba karena berdampak pada kinerja keuangan perusahaan periode berikutnya.

Pae (1999) dan Felthem dan Pae (2000) menunjukkan bahwa manajemen laba akrual tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaaan. Hal ini disebabkan karena kinerja keuangan yang diukur dengan *return on asset* merupakan salah satu ukuran kinerja keuangan perusahaan dalam kategori pengukuran arus kas yang dapat meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap suatu transaksi. Arus kas menunjukkan hasil yang dananya telah diterima tunai oleh perusahaan serta dibebani dengan beban yang bersifat tunai yang telah dikeluarkan oleh perusahaan.

Inkonsisten dengan Pae (1999) dan Felthem dan Pae (2000), Ardekani *et al*. (2012) menunjukkan bahwa manajemen laba akrual berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Selain itu, Darwis (2012) menyatakan bahwa manajemen laba

disatu sisi dapat meningkatkan kinerja perusahaan dalam jangka pendek, akan tetapi disisi lain dapat berimplikasi negatif pada kinerja jangka panjang perusahaan.

D. Pengertian Manajemen Laba Riil

Teknik *earning management* melalui metode manipulasi aktivitas nyata di definisikan oleh Roychowdhury (2006) sebagai perbedaan praktik operasi yang dilakukan dengan praktik-praktik operasi normal, yang dimotivasi oleh keinginan manajemen untuk memberikan pemahaman yang salah kepada pemegang saham agar mereka percaya bahwa tujuan pelaporan keuangan tertentu telah dicapai sesuai praktik operasi normal perusahaan. Perbedaan yang dilakukan ini tidak memberikan kontribusi terhadap nilai perusahaan meskipun dengan tindakan ini memungkinkan manajer mencapai tujuan pelaporan. Metode *earning management* aktivitas nyata dapat dicontohkan seperti memberikan diskon harga, penurunan pengeluaran diskresioner, yang mungkin merupakan tindakan normal pada kondisi ekonomi tertentu, namun jika manajer melakukan aktivitas ini secara lebih ekstensif daripada aktivitas normal berdasarkan situasi ekonominya, dengan tujuan untuk mencapai target laba, maka tindakan seperti ini masuk dalam kategori *earning management* aktivitas nyata.

Praktik *earning management* oleh perusahaan melalui manipulasi aktivitas nyata dimotivasi oleh keinginan manajer untuk menyesatkan pemegang saham dalam kepercayaan tertentu bahwa tujuan laporan keuangan telah terpenuhi dalam operasi normal. Adapun yang menjadi motivasi utama atas manipulasi aktivitas nyata adalah waktu (*timing*) *earning management*. Dimana manipulasi aktivitas nyata dapat dilakukan kapan saja selama periode akuntansi, maka hal ini sulit untuk dideteksi oleh auditor dan *earning management* akrual terbatas pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP).

Roychowdhury (2006) ada tiga aktivitas yang bisa dilakukan untuk melakukan *earning management* melalui aktivitas nyata yaitu:

1. Manipulasi Penjualan, usaha melakukan peningkatan penjualan secara temporer dengan memberikan kredit atau diskon harga sehingga volume penjualan meningkat. Diskon harga akan menyebabkan arus kas masuk besar tetapi arus kas masuk per penjualan kecil, diskon bersih dari tambahan penjualan lebih rendah dari arus kas operasi normal perusahaan sehingga marjin turun.
2. Melakukan produksi besar- besaran, tujuan dilakukannya produksi besar-besaran agar harga pokok penjualan lebih rendah. Semakin banyak produksi maka biaya akan naik tetapi harga rata-rata lebih rendah sehingga marjin lebih besar.
3. Mengurangi biaya diskresioner, biaya yang dapat dikurangi adalah biaya iklan, biaya penelitian dan pengembangan, dan biaya penjualan umum dan administrasi. Biaya ini pada akhir periode menyebabkan rekening utang berkurang dibawah normal dan berdampak pada akrual abnormal yang positif sehingga biaya berkurang dan laba naik. Manajer mengurangi biaya riset dan pengembangan yang lebih, jika memiliki kepemilikan institusional yang rendah (Bushee, 1998)

Sejalan dengan Roychowdhury (2006) dan Cohen, et. al (2004) tiga metode yang harus dipertimbangkan untuk mempelajari manipulasi aktivitas nyata yaitu tingkat abnormal arus kas dari operasi (CFO), biaya discretionary (DISEXP) dan biaya produksi (PROD). Penelitian tentang metode aktifitas nyata ini diteliti antara lain Thomas dan Zhang (2002) memberikan bukti manipulasi kegiatan riil melalui over produksi (PROD) dimana manajer menghasilkan barang lebih dari jumlah yang diperlukan untuk memenuhi penjualan dan tingkat target normal persediaan untuk menurunkan HPP, yang mengakibatkan peningkatan laba yang dilaporkan. Meskipun marjin keuntungan meningkat, tetapi diikuti juga dengan timbulnya biaya-biaya baru dan lebih rendah dari CFO normal.

Roychowdhury (2006) menemukan bahwa manajer menawarkan diskon harga, memberikan diskon besar menjelang akhir tahun fiskal untuk meningkatkan penjualan. Peningkatan volume penjualan yang dihasilkan kemungkinan akan hilang ketika perusahaan kembali pada harga lama. Tindakan ini pada kenyataannya, menggerakkan profitabilitas masa depan dalam periode berjalan. Akibatnya, profitabilitas masa depan mungkin dirugikan oleh manajemen penjualan. Secara keseluruhan, perusahaan biasanya dirugikan ketika manajer memanipulasi laba melalui aktivitas nyata. Pertama, ketika manajer memanipulasi laba untuk memenuhi target pendapatan, kontrak mengharuskan perusahaan untuk memberikan imbalan finansial yang lebih besar untuk para manajer. Kedua, manajer lebih sering mencurahkan waktunya untuk memanipulasi dan sedikit mereka curahkan untuk kegiatan produktif. Ketiga, Bar-Gill dan Bebchuk (2003) menunjukkan bahwa kemungkinan memanipulasi aktivitas nyata memiliki biaya ekonomi riil. Artinya, perusahaan mungkin tidak mengejar proyek-proyek yang efisien untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

Konsekuensi dilakukannya manipulasi aktivitas nyata yang dijabarkan oleh Gunny (2005), Empat aktivitas utama *earning management* aktivitas nyata yang digunakan adalah: a) mengurangi biaya diskresioner riset dan pengembangan, b) mengurangi biaya diskresioner penjualan dan biaya administrasi dan umum, c) melakukan *timing* penjualan aktiva tetap untuk menaikkan laba, dan *overproduction*, diskon harga atau keringanan kredit untuk menaikkan penjualan atau mengurangi biaya produksi. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa *earning management* aktivitas nyata berhubungan sangat signifikan dengan laba dan arus kas masa depan yang rendah. Selain itu, aktivitas *earning management* aktivitas nyata secara ekonomis signifikan menurunkan kinerja operasi perusahaan. Sedangkan menurut Zang (2007) menduga bahwa manajer perusahaan menggunakan *earning management* akrual dan *earning management* aktivitas nyata untuk saling menggantikan. Buku ini menemukan bahwa *earning management* akrual

cenderung menurun dan *earning management* aktivitas nyata naik setelah penyelesaian penuntutan perkara hukum perusahaan. Akan tetapi kedua teknik *earning management* tersebut berhubungan positif dengan insentif atas melakukan *earning management*. Oktorina (2008) berhasil menemukan bukti bahwa perusahaan melakukan manipulasi aktivitas nyata melalui arus kas kegiatan operasi dan mempengaruhi kinerja pasar pada kelompok 50 perusahaan terbaik menurut Swa 100 yang memiliki total aktiva diatas Rp 1 triliun dan EVA terbaik pada periode tahun 2001 sampai dengan 2006. Lain halnya dengan Annisaa'rahman dan Hutagaol (2007) yang mengatakan bahwa *earning management* ditemukan melalui akrual tetapi tidak pada aktivitas nyata dan *earning management* mempengaruhi kinerja saham setelah IPO.

E. Manajemen Laba Riil Terhadap Kinerja keuangan Perusahaan

Manajemen perusahaan yang bertindak sebagai pengelola perusahaan akan memiliki informasi yang lebih terkait kondisi perusahaan saat ini maupun yang akan datang bila dibandingkan dengan pemilik perusahaan.

Manajemen perusahaan memiliki kewajiban untuk mengungkapkan informasi laporan keuangan perusahaan kepada pemilik sebagai sinyal informasi. Sinyal informasi yang diberikan oleh manajemen perusahaan seringkali tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya yang menyebabkan adanya asimetri informasi. Hal ini menyebabkan manajemen perusahaan akan bertindak oportunis untuk memaksimumkan keuntungan pribadi melalui manajemen laba.

Informasi laba sebagai parameter kinerja perusahaan memiliki peranan penting bagi pemegang saham dan kreditur dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit. Pemegang saham dan kreditur menggunakan informasi laba untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Oleh karena itu, manajemen perusahaan akan berusaha untuk mengoptimalkan laba agar kinerja perusahaan terlihat baik melalui manajemen laba. Akan

tetapi, informasi laba tersebut tidak mencerminkan kondisi kinerja perusahaan yang sebenarnya yang dapat menyesatkan pemegang saham dan kreditur dalam menilai kinerja perusahaan. informasi laporan keuangan akan menjadi semakin berguna jika informasi tersebut dapat membantu pemegang saham dalam membedakan manajemen perusahaan yang baik dan kurang baik sehingga pengambilan keputusan investasi yang dilakukan oleh pemegang saham tepat (Bushman dan Smith, 2001).

Manajer melakukan manajemen laba melalui aktivitas riil akan memperlihatkan kinerja jangka pendek perusahaan yang baik, akan tetapi kinerja jangka panjang akan terlihat buruk (Gunny, 2005). Tindakan-tindakan manajemen perusahaan yang menyimpang dari praktik bisnis normal perusahaan dengan tujuan utama adalah untuk mencapai target laba merupakan konsep dari manajemen laba riil (Roychowdhury, 2006; Cohen dan Zarowin, 2010).

Manajemen perusahaan memiliki potensi untuk melakukan manajemen laba riil karena adanya tekanan atau dorongan dari manajer untuk menghasilkan laba jangka pendek tanpa mempedulikan kinerja jangka panjang. Hal ini disebabkan karena manajemen laba riil tidak menjadi sorotan regulator maupun auditor karena sulit untuk dideteksi (Gunny, 2005).

Hasil penelitian Cohen dan Zarowin (2010) menunjukkan bahwa manipulasi aktivitas riil berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan melakukan manajemen laba melalui aktivitas riil untuk menaikan laba yang dilaporkan sehingga kinerja perusahaan akan terlihat baik.

Arus kas operasi abnormal merupakan proksi dari manajemen laba riil yang dilakukan oleh manajemen perusahaan melalui pengelolaan penjualan. Temuan ini tidak konsisten dengan temuan Cohen dan Zarowin (2010) yang menunjukkan bahwa pengelolaan penjualan mampu menurunkan kinerja keuangan perushaaan. Hal ini disebabkan

karena perusahaan tidak melakukan manajemen laba riil melalui arus kas operasi abnormal dengan cara mempercepat penjualan, sehingga tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Tabassum *et al.* (2015) menjelaskan bahwa sekitar 30-50 persen perusahaan manufaktur yang terdaftar di Karachi Stock Exchange (KSE) dengan kapitalisasi pasar tertinggi dari tahun 2004-2011 melakukan manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan. Hal ini menunjukkan adanya dampak negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan masa depan. Hasilnya menunjukkan bahwa manajemen perusahaan melakukan manipulasi laba riil pada tahun ini untuk melaporkan kinerja keuangan perusahaan, Akan tetapi, perusahaan akan menghadapi konsekuensi sebagai akibat dilakukannya manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan. Manajer menawarkan potongan harga dan persyaratan kredit yang lebih rendah kepada pelanggan untuk meningkatkan pendapatan. Akan tetapi, di masa depan manajemen perusahaan akan menanggung biaya dalam bentuk ROA, ROE, EPS dan PE ratio yang lebih rendah menyebabkan manajemen berusaha untuk memitigasi perilaku manajemen laba riil karena memiliki dampak negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan periode berikutnya.

Hasil kajian ini tidak konsisten dengan penelitian Cohen dan Zarowin (2010) menunjukkan bahwa manipulasi aktivitas riil berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Perusahaan melakukan manajemen laba melalui aktivitas riil untuk menaikan laba yang dilaporkan sehingga kinerja perusahaan akan terlihat baik. Konsisten dengan penelitian Gunny (2005) menyatakan bahwa manajer melakukan manajemen laba melalui aktivitas riil akan memperlihatkan kinerja jangka pendek perusahaan yang baik, akan tetapi kinerja keuangan jangka panjang akan terlihat buruk. Hal ini disebabkan karena tindakan manajemen laba riil merupakan tindakan manajemen perusahaan yang menyimpang dari praktek bisnis normal perusahaan yang akan mengorbankan kinerja keuangan jangka panjang perusahaan, selain itu

informasi keuangan tersebut tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya sehingga dapat menyesatkan pemangku kepentingan dalam menilai kinerja keuangan perusahaan.

BAB 4

KONEKSI POLITIK UNTUK KEUANGAN PERUSAHAAN

A. Pengertian Koneksi Politik

Purwoto (2011) menyatakan bahwa negara Indonesia dan Presiden Soeharto telah menjadi populer dalam pengembangan awal literatur koneksi politis (*political connection*). Menurut Purwoto (2011) perusahaan berkoneksi politik ialah perusahaan yang dengan cara – cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah.

Political connection bagaikan pedang bermata dua. Hal tersebut dapat meningkatkan atau justru membahayakan nilai perusahaan. Hasil penelitian Xu et. al., (2002) di Cina menunjukkan bahwa ketika kontrol politik dibatasi, kinerja perusahaan membaik. Hal ini terjadi ketika ada peningkatan hasil dalam fleksibiltas perusahaan dalam hal penempatan tenaga kerja dan penegakkan mekanisme *corporate governance* yang lebih efektif. Fan et. al., (2004) melaporkan hasil penelitian bahwa perusahaan yang memiliki CEO berkoneksi politik memiliki kinerja lebih rendah sekitar 37% dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik apabila diukur dengan *stock return* perusahaan mereka tiga tahun pasca IPO. Selain itu, ukuran kinerja (seperti *market-to-book value* dan *return on asset* (ROA)) bagi perusahaan - perusahaan yang dikuasai oleh negara berhubungan negatif dengan tingkat kepemilikan negara (Fan et. al., 2007).

Hasil penelitian Faccio (2006) menunjukkan bahwa perusahaan yang berkoneksi politik memiliki kinerja lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik pada basis akuntansi. Hal ini dimungkinkan karena ketika politisi menyalurkan sumber daya ke perusahaan yang dituju, dapat menimbulkan distorsi insentif, dan misalokasi investasi serta meningkatkan korupsi (Shleifer dan Vishny, 1994 dalam Ang et. al., 2010).

Faccio (2006) berpendapat bahwa, *political connection* bisa meningkatkan nilai perusahaan jika hal tersebut berhasil mencabut rente ekonomi yang tidak adil dengan mengorbankan pesaing dan konsumen. Namun demikian, apabila semua atau sebagian besar dari nilai perusahaan dikonsumsi oleh para politisi dan manajer yang terhubung dengan para politisi tersebut maka para pemegang saham hanya akan mendapatkan sedikit dari sisa nilai yang tersedia. Hal tersebut adalah salah satu masalah keagenan. Menurut Faccio (2006) hal tersebut dapat dibantu dengan penggunaan struktur tata kelola yang tepat (*proper governance structure*).

Faccio (2006) menyatakan bahwa apabila *political connection* sebagai penentu utama keputusan investasi yang terdistorsi, akan mengakibatkan nilai perusahaan yang lebih rendah jika tanpa ada *political connection*. Leuz dan Oberholzer (2006) memberikan bukti bahwa di Indonesia, perusahaan – perusahaan yang menghadapi kesulitan dalam membangun hubungan dengan pemerintah baru saat *patron* mereka jatuh dari kekuasaan, menyebabkan perusahaan – perusahaan tersebut memiliki kinerja rendah dan kemudian beralih ke pembiayaan luar negeri.

Keuntungan lain yang di dapat oleh perusahaan yang berkoneksi politik adalah akses yang lebih mudah untuk pembiayaan hutang, pajak yang lebih rendah, dan kekuatan pasar yang lebih kuat. Friedman (1999) memberikan contoh dari hasil laporan penelitiannya bahwa bankir sering dipaksa untuk memberikan pinjaman bagi proyek – proyek yang dilakukan oleh perusahaan yang berkoneksi politik meskipun proyek

tersebut diperkirakan tidak menguntungkan. Bukti lain dari Friedman yang dilakukan bersama penulis yang lain (seperti Jhonson, Kochhar, Mitton, dan Tamirisa (2006), Khwaja dan Mian (2004), dan Sapienza (2004)) memberikan dukungan lebih lanjut bahwa perbedaan dalam perilaku pinjaman dari bank BUMN dipengaruhi oleh hasil pemilihan partai yang berafiliasi dengan bank. Tindakan tersebut merupakan transfer kekayaan dari warga negara atau konsumen untuk perusahaan, yang menyebabkan peningkatan nilai perusahaan.

B. Koneksi Politik Dan Keuangan Perusahaan

Pasar modal sebagai salah satu instrumen ekonomi tidak dapat dipisahkan dari berbagai faktor yang turut mempengaruhi aktivitas yang terjadi di pasar modal. Salah satu faktor tersebut adalah peristiwa ekonomi atau adanya koneksi politik antara perusahaan dengan pemerintah atau partai politik. Koneksi politik dan bisnis merupakan dua hal yang selalu berjalan berdampingan karena dapat memberikan manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik memiliki kesempatan untuk memperoleh banyak manfaat atas hubungan politik tersebut (Faccio, 2010; Pastor dan Veronesi, 2013).

Vermonte (2012) menyatakan bahwa di Indonesia, pada dasarnya partai politik lebih banyak bergantung pada bantuan pemerintah dan bantuan korporasi, jika dibandingkan pada iuran anggotanya sendiri. Lebih lanjut lagi, Vermonte (2012) menjelaskan bahwa semakin bergantungnya partai politik terhadap bantuan pihak ketiga, baik itu perseorangan maupun perusahaan yang memiliki modal besar maka akan memberikan peluang terjadinya praktek kecurangan (korupsi). Selain itu, dapat mengurangi insentif untuk berinvestasi sehingga investasi menuru serta perusahaan yang terkoneksi politik cenderung dimonitoring oleh publik (Chaney et al., 2011). Sebagai konsekuensinya, apabila perusahaan yang terkoneksi politik memiliki legalitas yang meragukan, maka mereka cenderung untuk menyembunyikan hubungan politik mereka (Fisman,

2011).

Badertscher (2011) menyatakan bahwa perusahaan dapat menggunakan beberapa strategi manajemen laba dalam mengelola laba, yaitu strategi manajemen laba akrual dan strategi manajemen laba riil. Strategi manajemen laba akrual dilakukan dengan tujuan untuk mengaburkan kinerja ekonomi melalui mengubah metode atau estimasi akuntansi dalam prinsip akuntansi berterima umum (Dechow dan Skinner, 2000). Sedangkan manajemen laba riil dilakukan dengan cara mengubah aktivitas bisnis normal perusahaan (Roychowdhury, 2006). Dengan adanya penataan transaksi bisnis perusahaan secara riil, seperti perubahan aktivitas operasi untuk memenuhi target jangka pendek perusahaan yang berdampak langsung pada aliran kas dan juga berdampak pada konsekuensi nilai ekonomi perusahaan. Salah satu indikasi adanya peningkatan kinerja perusahaan adalah manajemen laba yang dilakukan oleh manajer dalam mencapai target laba. Perusahaan yang terkoneksi politik cenderung mengelola laba untuk mencapai target perusahaan, sehingga kinerja perusahaan akan terlihat baik bagi pemegang saham. Selain itu, perusahaan yang terhubung secara politik lebih cenderung untuk menggunakan manajemen laba riil karena sulit dideteksi oleh auditor maupun regulator dibandingkan manajemen laba akrual untuk memperoleh keuntungan atas hubungan koneksi politik mereka (Cohen dan Zarowin, 2010; Cohen et al., 2008; Ewert dan Wagenhofer, 2005; Graham et al., 2005).

Ketika perusahaan mampu menjalankan aktivitas bisnisnya secara efektif dan efisien maka kinerja perusahaan akan semakin baik,sehingga tingkat keuntungan yang diperolehakan semakin tinggi dalam rangka memakmurkan pemegang saham. Kinerja perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalkan koneksi politik maupun manajemen laba. Perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik jika setidaknya satu dari pemegang saham utama (orangyangmemiliki setidaknya 10 persen hak suara berdasarkan jumlah saham yang dimiliki) atau seorang jajaran

direksi yaitu CEO, presiden direktur, wakil presiden direktur, kepala bagian, atau sekretaris memiliki hubungan dengan politisi atau partai politik (Faccio,2006). Perusahaan yang terkoneksi politik cenderung memperoleh akses yang mudah untuk memperoleh pinjaman dari bank dalam mendanai proyek meskipun proyek tersebut diperkirakan tidak menguntungkan. Dengan adanya sumber pembiayaan tersebu tmenyebabkan adanya peningkatan nilai perusahaan sehingga berimplikasi pada meningkatnya kinerja perusahaan (Friedman, 1999).

Braam *et al*., (2015) menyatakan bahwa baik itu perusahaan yang terkoneksi politik maupun tidak terkoneksi politik dapat menggunakan manajemen laba berbasis akrual maupun riil untuk meningkatkan nilai perusahaan selama memberikan manfaat marginal yang lebih bila dibandingkan biaya marginal. Dengan demikian, perusahaan yang terkoneksi politik cenderung menggunakan strategi pengelolaan laba untuk menyembunyikan atau mengaburkan kinerja perusahaan sehingga informasi perusahaan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya (Chaney *et al*., 2011; Faccio, 2006; Faccio *et al*., 2006; Watts dan Zimmerman, 1990).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik memiliki banyak manfaat akibat adanya hubungan politik tersebut (Faccio, 2010; Pastor dan Veronesi, 2013). Namun, perusahaan yang terkoneksi politik umumnya dimonitoring oleh publik jika dibandingkan perusahaan yang tidak terkoneksi politik (Chaney *et al*.,2011) apalagi ketika legalitas dari koneksi politik itu meragukan (Fisman, 2001). Selain itu, perusahaan akan kehilangan manfaat dari koneksi politik yang terjalin ketika media maupun partai politik mengetahui bahwa perusahaan mengelola laba untuk kepentingan pribadi (Faccio, 2006).

Apa bila manajemen laba akrual dapat terdeteksi maka akan merusak reputasi perusahaan bahkan reputasi para politisi yang terhubung secara politik, meningkatkan adanya biaya politik, serta kemungkinan adanya intervensi dari pihak luar (Faccio, 2006; Kothari *et al*., 2012; Ramanna dan

Roychowdhury,2010; Wattz dan Zimmerman,1990). Oleh karena itu, perusahaan yang terhubung secara politik cenderung untuk mengubah manajemen laba berbasis akrual ke manajemen laba berbasis riil sebagai strategi pengelolaan laba karena manajemen laba riil lebih sulit terdeteksi dibandingkan manajemen laba akrual.

C. Koneksi Politik Dan Manajemen laba Akrual

Laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat oleh manajemen perusahaan untuk pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait aktivitas perusahaan guna pengambilan keputusan bisnis. Oleh karena itu, informasi yang ada pada laporan keuangan haruslah mencerminkan kondisi informasi yang sebenarnya atau informasi yang berkualitas. Informasi akuntansi yang ada pada laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh pihak eksternal perusahaan yang memiliki keterbatasan informasi karena pihak eksternal perusahaan berada pada kondisi ketidakpastian informasi yang tinggi (Ali, 2002).

Informasi yang sering digunakan oleh pemangku kepentingan eksternal terkait pengambilan keputusan bisnis adalah informasi laba karena laba merupakan ukuran kinerja keuangan secara periodik dalam suatu perusahaan (FASB, 1978). Hal ini menyebabkan manajer sebagai pengelola perusahaan berusaha untuk mengoptimalkan laba agar dapat menarik minar para pemegang saham. Oleh karena itu, manajemen perusahaan seringkali melakukan manajemen laba untuk tujuan tertentu.

Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang tidak terindikasi adanya manipulasi laba. Dechow dan Schrand (2004) menyatakan bahwa laba yang berkualitas tinggi adalah laba yang secara akurat menggambarkan kinerja operasi perusahaan saat ini dan yang akan datang, sebaliknya laba yang berkualitas rendah akan menggangu pemegang saham dan pengguna laporan keuangan lainnya yang dapat mengakibatkan adanya kesalahan alokasi

modal (Schipper dan Vincent, 2003). Dengan demikian, informasi laporan keuangan akan menjadi semakin berguna jika informasi tersebut dapat membantu pemegang saham dalam membedakan manajemen perusahaan yang baik dan kurang baik sehingga pengambilan keputusan investasi yang dilakukan oleh pemegang saham tepat (Bushman dan Smith, 2001).

Perusahaan yang terkoneksi politik memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Hung *et al*., (2012) menunjukkan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik memperoleh manfaat yang lebih berupa kemudahan dalam melakukan listing dipasar modal luar negeri jika dibandingkan perusahaan yang tidak terkoneksi politik.

Teori Kelembagaan *(institutional theory)* menjelaskan bahwa keputusan yang diambil dalam organisasi dipengaruhi oleh organisasi lainnya termasuk pemerintah karena organisasi berada dalam lingkungan sosial (Meyer dan Rowan 1977) pemerintah menerapkan aturan – aturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan dan pejabat pemerintah kebanyakan berasal partai politik sehingga secara tidak langsung keputusan pejabat itulah yang didengar. Dalam kenyataannya pejabat pemerintah yang menjabat merupakan simbol status kelas sosial (terutama pejabat pemerintahan yang senior) sampai batas tertentu dapat meningkatkan citra perusahaan dan reputasi operasi yang sah serta mendapatkan pengakuan yang baik dari masyarakat (Wei, 2006; Luo dan Tang,2009).

Manajemen laba akrual merupakan suatu bentuk praktik pengelolaan laba melalui komponen akrual yang merefleksikan keinginan manajer dari pada kinerja perusahaan yang dilakukan dengan cara menurunkan atau menaikan laba dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Manajemen laba akrual seringkali dianggap negatif oleh banyak pihak karena menyebabkan informasi laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya akibat adanya perilaku opportunistic manajer yang bertindak untuk kepentingan pribadinya. Perusahaan yang terhubung secara politik maupun tidak terhubung secara politik

dapat menggunakan praktik pengelolaan laba melalui kebijakan akrual maupun riil untuk meningkatkan nilai perusahaan selama manfaat marjinal lebih besar dari pada biaya marjinal Bram et al., (2015). Perusahaan yang terhubung secara politik lebih cenderung untuk melakukan manajemen laba untuk menyembunyikan atau mengaburkan kinerja perusahaan terutama ketika koneksi politik memiliki legalitas yang meragukan(Chaney *et al*., 2011; Faccio, 2006; Faccio *et al*., 2006; Watts and Zimmerman, 1990).

Wu *et al*., (2012) melakukan penelitian terhadap perusahaan swasta yang manajernya memiliki koneksi politik. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa manajer perusahaan swasta yang memiliki koneksi memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan manajer perusahaan swasta yang tidak memiliki koneksi politik. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang manajernya terkoneksi politik akan memperoleh manfaat positif berupa adanya dukungan akibat koneksi politik untuk mencapai sumber daya utama termasuk pinjaman bank, pajak yang rendah dan kekuatan pasar.

Selain itu juga, Perezetal., (2013) melakukan penelitian terkait pengaruh koneksi politik terhadap nilai perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik memiliki dampak positif berupa adanya nilai tambah pengetahuan dan pengaruh terhadap perkembangan hukum yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Chaney, Faccio, dan Parsley (2011) menunujukkan bahwa terdapat tiga hal dilakukan oleh perusahaan yang memiliki koneksi politik. Pertama, perusahaan mengambil manfaat dari hubungan politik dengan melakukan penggelapan atas pembayaran, atau melakukan penundaan pelaporan keuangan bertujuan untuk menyesatkan investor melalui *judgment*. Kedua, perusahaan yang terkoneksi politik akan merasa aman dari sanksi atau hukuman jika perusahaan melaporkan kondisi keuangan perusahaan dengan

kualitas rendah. Ketiga, perusahaan yang memiliki kualitas laba yang rendah lebih mungkin membangun koneksi politik karena dapat memberikan manfaat yang menguntungkan bagi perusahaan.

Perusahaan yang terkoneksi politik cenderung melakukan manajemen laba akrual dengan cara menaikan laba. Hal ini dapat dilihat bahwa rata-rata nilai *discretionary accrual* perusahaan yang terkoneksi politik adalah positif. Selain itu, perusahaan yang terkoneksi politik juga memiliki rata-rata perbedaan *discretionnary accruals* untuk menaikan laba lebih tinggi dari perusahaan yang tidak terkoneksi politik yaitu untuk total perusahaan yang terkoneksi politik sebesar (0,868) dan perusahaan yang tidak terkoneksi politik sebesar (0,151) selama periode 2010-2015. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik lebih agresif dalam mengelola laba secara akrual untuk menaikan laba jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terkoneksi politik.

Perusahaan yang terkoneksi politik lebih agresif dalam mengelola laba secara akrual karena memiliki keyakinan berlebih (*overconfidence*) atas manfaat dari adanya koneksi politik tersebut. Hal ini dapat dilihat bahwa walaupun penerapan IFRS telah membatasi manajemen perusahaan untuk mengurangi diskresi manajemen tetapi manajemen perusahaan yang terkoneksi politik masih agresif dalam melakukan manajemen laba akrual.

Chaney *et al*. (2011) menunjukkan bahwa ada tiga hal yang dilakukan oleh perusahaan yang terkoneksi politik. Pertama, perusahaan biasanya mengambil manfaat dari adanya hubungan politik dengan melakukan penggelapan atas pembayaran, menyembunyikan, mengaburkan, atau paling tidak melakukan penundaan pelaporan keuangan dengan tujuan untuk menyesatkan investor melalui *judgment*. Kedua, perusahaan yang terkoneksi politik akan merasa aman dari sanksi atau hukuman jika perusahaan melaporkan kondisi keuangan perusahaan dengan kualitas rendah. Ketiga, perusahaan yang memiliki kualitas laba yang rendah lebih

mungkin untuk membangun koneksi politik karena dapat memberikan manfaat yang menguntungkan bagi perusahaan. Informasi yang sering digunakan oleh pemangku kepentingan eksternal terkait pengambilan keputusan bisnis adalah informasi laba karena laba merupakan ukuran kinerja keuangan secara periodik dalam suatu perusahaan (FASB, 1978). Hal ini menyebabkan manajer sebagai pengelola perusahaan berusaha untuk mengoptimalkan laba agar dapat menarik minat para pemegang saham. Oleh karena itu, manajemen perusahaan seringkali melakukan manajemen laba untuk tujuan tertentu.

Perusahaan yang terkoneksi politik memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Hung *et al*., (2012) menunjukkan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik memperoleh manfaat yang lebih berupa kemudahan dalam melakukan listing dipasar modal luar negeri jika dibandingkan perusahaan yang tidak terkoneksi politik. Teori Kelembagaan *(institutional theory)* menjelaskan bahwa keputusan yang diambil dalam organisasi dipengaruhi oleh organisasi lainnya termasuk pemerintah karena organisasi berada dalam lingkungan sosial (Meyer dan Rowan 1977) pemerintah menerapkan aturan-aturan dan kebijakan yang harus dipatuhi oleh perusahaan dan pejabat pemerintah kebanyakan berasal partai politik sehingga secara tidak langsung keputusan pejabat itulah yang didengar.

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang masih kurang transparan dan kurang tegas dalam menerapkan aturan diantaranya mengenai pendanaan partai politik dan aturan yang terkait dengan perusahaan yang terkoneksi politik karena antara bisnis dan politik tidak bisa dipisahkan untuk memanfaatkan peluang dalam lingkungan bisnis. Berdasarkan hasil revisi UU Parpol tahun 2008 batas sumbangan perusahaan atau badan usaha dalam waktu satu tahun anggaran sebesar empat milyar perperusahaan, tapi setelah direvisi UU Parpol tahun 2011, batas sumbangan naik menjadi Tujuh setengah milyar perperusahaan hal ini dapat berpotensi semakin bertambah banyaknya dana kampanye yang berasal dari perusahaan yang menjadi donator

dana kampanye terhadap kebijakan regulasi dan menguntungkan perusahaan dan berprilaku oportunistik untuk melakukan manajemen laba akrual dengan *discretionary accrual*.

D. Koneksi Politik Dan Manajemen Laba Riil

Tujuan pelaporan keuangan perusahaan adalah untuk menyajikan informasi yang memiliki daya guna bagi keputusan bisnis (FASB, 1978). Informasi yang sering digunakan oleh pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan bisnis adalah informasi laba. Hal ini membuat manajemen perusahaan akan berusaha memaksimalkan laba untuk tujuan tertentu karena laba merupakan tolok ukur kinerja operasi perusahaan selama suatu periode tertentu. Dengan demikian, manajemen perusahaan akan berusaha menggunakan berbagai cara untuk memaksimumkan laba, misalkan melalui manajemen laba riil.

Manajemen sebagai agen dan pemilik sebagai prinsipal memiliki kepentingan yang berbeda-beda sehingga munculnya praktik manajemen laba. Teori agensi yang melatar belakangi tindakan manajemen laba ini memberikan gambaran bahwa terdapat konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham dengan tujuan untuk memaksimumkan kepentingannya masing-masing. Hal ini dikarenakan pemegang saham tidak dapat memonitor manajemen perusahaan secara langsung sehingga memungkinkan terjadinya tindakan manajemen laba.

Manajemen laba riil terjadi ketika manajer melakukan pengelolaan laba untuk menyesatkan para pemangku kepentingan dengan meyakinkan bahwa bahwa tujuan pelaporan keuangan telah tercapai melalui perubahan dalam praktik aktivitas operasi normal perusahaan (Roychowdhury, 2006). pengelolaan laba melalui aktivitas riil dilakukan dengan motivasi utama adalah waktu (*timing*) *earning management*. Artinya bahwa manipulasi aktivitas riil dapat dilakukan kapan saja selama periode akuntansi.

Teori kelembagaan menyatakan bahwa Parpol dibentuk oleh kalangan eksekutif dan legislatif karena ada kebutuhan para anggota parlemen untuk mengadakan kontak dengan

masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat. Parpol terakhir biasanya dibentuk kelompok kecil masyarakat karena parpol yang dibentuk pemerintah tidak mampu menampung dan memperjuangkan kepentingan mereka. Chen, Dang, dan Kim (2010) menunjukkan bukti bahwa prediksi analisa akan kurang akurat jika perusahaan memiliki hubungan politik dibandingkan perusahaan yang tidak terkoneksi politik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai akibat dari adanya koneksi politik maka akan berdampak pada munculnya asimetri informasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Braam, Nandy dan Lodh (2015) menunjukkan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik memiliki peranan penting dalam mengubah strategi manajemen untuk mengelola laba perusahaan dari berbasis akrual ke berbasis riil yang relative berbiaya lebih karena sulit terdeteksi.

Dengan adanya manajemen laba riil maka akan membantu perusahaan yang terkoneksi politik dalam memperoleh manfaat yang lebih (Chaney *et al*., 2011; Faccio, 2006; Faccio *et al*., 2006).

Perilaku manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan umumnya mulai bergeser dari manajemen laba berbasis akrual ke manajemen laba berbasis riil karena sulit terdeteksi oleh regulator, auditor maupun pemegang saham. Selain itu dengan adanya penerapan *International Reporting Standar* (IFRS) maka akan meningkatkan transparansi dan komparibilitas pelaporan keuangan karena mampu mengurangi diskresi manajemen perusahaan. Akan tetapi, hasil temuan dalam kajian ini membuktikan bahwa manajemen perusahaan yang terkoneksi politik tidak bergeser dari prilaku manajemen laba berbasis akrual ke manajemen laba berbasis riil melainkan perusahaan yang terkoneksi politik mampu memitigasi manajemen laba riil melalui *abnormal cash flow operational*.

Hal ini disebabkan karena koneksi politik antara manajemen perusahaan dengan pemerintah memiliki keyakinan yang berlebih (*overconfidence*) atas pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kebijakan perusahaan. Hasil kajian ini

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh fast *et al*. (2012) bahwa perusahaan yang terkoneksi politik mengarah kepada *overconfidence* atas pengambilan keputusan, sehingga perusahan yang terkoneksi politik tidak bergeser dari manajemen laba berbasis akrual yang mudah dideteksi oleh Regulator dan Auditor ke manajemen laba berbasis riil yang sulit terdeteksi. Kajian ini tidak konsisten dengan penelitian Cohen dan Zarowin (2010); Cohen *et al., (*2008); Ewert dan Wagenhofer (2005); Graham *et al., (*2005) menyatakan perusahaan yang terhubung secara politik lebih cenderung untuk menggunakan manajemen laba riil karena sulit dideteksi oleh auditor maupun regulator dibandingkan manajemen laba akrual untuk memperoleh keuntungan atas hubungan koneksi politik.

Judge *et al.* (1977) menyatakan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik yang kuat dapat membantu sebuah perusahaan dalam memperoleh informasi yang ekslusif. Manajemen sebagai *agent* dan pemilik sebagai *principal* memiliki kepentingan yang berbeda-beda sehingga munculnya praktik manajemen laba riil. Teori agensi yang melatar belakangi tindakan manajemen laba ini memberikan gambaran bahwa terdapat konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham dengan tujuan untuk memaksimumkan kepentingannya masing-masing. Hal ini dikarenakan pemegang saham tidak dapat memonitor manajemen perusahaan secara langsung sehingga memungkinkan terjadinya tindakan manajemen laba.

BAB 5 KONEKSI POLITIK DALAM SEKTOR INDUSTRI

A. Sektor *Agriculture*

Perusahaan yang terkoneksi politik lebih intens dalam mengelola laba secara akrual karena memiliki keyakinan berlebih (*overconfidence*) atas manfaat dari adanya koneksi politik tersebut. Hal ini dapat dilihat bahwa walaupun perusahaan telah mengadopsi IFRS yang membatasi manajemen perusahaan untuk memitigasi diskresi manajemen tetapi manajemen perusahaan yang terkoneksi politik masih intens dalam melakukan manajemen laba akrual.

Chaney *et al.* (2011) menjelaskan bahwa ada tiga hal yang dilakukan oleh perusahaan yang terkoneksi politik. Pertama, perusahaan biasanya mengambil manfaat dari adanya hubungan politik dengan melakukan penggelapan atas pembayaran, menyembunyikan, mengaburkan, atau paling tidak melakukan penundaan pelaporan keuangan dengan tujuan untuk menyesatkan investor melalui *judgment*. Kedua, perusahaan yang terkoneksi politik akan merasa aman dari sanksi atau hukuman jika perusahaan melaporkan kondisi keuangan perusahaan dengan kualitas rendah. Ketiga, perusahaan yang memiliki kualitas laba yang rendah lebih mungkin untuk membangun koneksi politik karena dapat memberikan manfaat yang menguntungkan bagi perusahaan.

Informasi yang sering digunakan oleh pemangku kepentingan eksternal terkait pengambilan keputusan bisnis adalah informasi laba karena laba merupakan ukuran kinerja

keuangan secara periodik dalam suatu perusahaan (FASB, 1978). Hal ini menyebabkan manajer sebagai pengelola perusahaan berusaha untuk mengoptimalkan laba agar dapat menarik minat para pemegang saham. Oleh karena itu, manajemen perusahaan seringkali melakukan manajemen laba untuk tujuan tertentu.

Perusahaan yang terkoneksi politik memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Hung *et al*. (2012) menunjukkan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik memperoleh manfaat yang lebih berupa kemudahan dalam melakukan listing dipasar modal luar negeri jika dibandingkan perusahaan yang tidak terkoneksi politik.

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang masih kurang transparan dan kurang tegas dalam menerapkan aturan diantaranya mengenai pendanaan partai politik dan aturan yang terkait dengan perusahaan yang terkoneksi politik karena antara bisnis dan politik tidak bisa dipisahkan untuk memanfaatkan peluang dalam lingkungan bisnis. Berdasarkan hasil revisi UU Parpol tahun 2008 batas sumbangan perusahaan atau badan usaha dalam waktu satu tahun anggaran sebesar empat milyar perperusahaan, tapi setelah direvisi UU Parpol tahun 2011, batas sumbangan naik menjadi Tujuh setengah milyar perperusahaan hal ini dapat berpotensi semakin bertambah banyaknya dana kampanye yang berasal dari perusahaan yang menjadi donator dana kampanye terhadap kebijakan regulasi dan menguntungkan perusahaan dan berprilaku oportunistik untuk melakukan manajemen laba akrual melalui *discretionary accrual*.

Fast *et al*. (2012) menjelaskan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik memiliki *overconfidence* atas pengambilan keputusan bisnis. Sehingga perusahan yang terkoneksi politik tidak bergeser dari manajemen laba berbasis akrual yang mudah dideteksi oleh regulator dan Auditor ke manajemen laba berbasis riil yang sulit terdeteksi. kajian ini tidak konsisten dengan penelitian Cohen dan Zarowin (2010); Cohen *et al., (*2008); Ewert danWagenhofer (2005); Graham *et al., (*2005) menyatakan perusahaan yang terhubung secara politik lebih

cenderung untuk menggunakan manajemen laba riil karena sulit dideteksi oleh auditor maupun regulator dibandingkan manajemen laba akrual untuk memperoleh keuntungan atas hubungan koneksi politik.

Sektor industri *Agriculture* yang terkoneksi politik terutama koneksi politik dengan pemerintah (KPP) memanfaatkan hubungan tersebut untuk melakukan manajemen laba riil terutama melalui *abnormal cash flow from operation* (ACFO). Hal ini dibuktikan dengan jumlah perusahaan yang terkoneksi politik pada sektor *Agriculture* berjumlah 8 perusahaan dari 13 perusahaan. Hal ini memotivasi manajemen perusahaan untuk memanfaatkan koneksi politik dengan tujuan untuk memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

Dinc (2005) menunjukkan bahwa manfaat dari adanya koneksi politik yaitu adanya akses *political capital*, subsidi pemerintah, kontrak pemerintah maupun kebijakan pajak. Perusahaan menggunakan manfaat dari adanya koneksi politik untuk meningkatkan kinerja, sehingga memberikan sinyal kepada pemegang saham bahwa kondisi keuangan perusahaan terlihat baik. Bram *et al.* (2015) menunjukkan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik memiliki peranan penting dalam mengubah strategi manajemen laba dari berbasis akrual ke berbasis riil karena sulit terdeteksi oleh pihak luar perusahaan.

Perusahaan sektor *Agriculture* yang memanfaatkan akrual diskresioner dalam mengelola laba memiliki dampak negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Scott (2009) menjelaskan bahwa penggunaan akrual diskresioner dalam mengelola laba memiliki aturan tersendiri, yaitu *accrual reverse*. Jika perusahaan mencatat akrual dalam jumlah tertentu sehingga mengakibatkan laba naik pada periode berjalan, maka pada periode berikutnya nilai akrual tersebut berbalik dan akan mengurangi laba periode berikutnya. Hal ini menyebabkan manajemen perusahaan untuk tidak berperilaku oportunistik dalam mengelola laba karena berdampak pada kinerja keuangan perusahaan periode berikutnya.

Pae (1999) dan Felthem dan Pae (2000) menunjukkan bahwa manajemen laba akrual tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaaan. Hal ini disebabkan karena kinerja keuangan yang diukur dengan *return on asset* merupakan salah satu ukuran kinerja keuangan perusahaan dalam kategori pengukuran arus kas yang dapat meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap suatu transaksi. Arus kas menunjukkan hasil yang dananya telah diterima tunai oleh perusahaan serta dibebani dengan beban yang bersifat tunai yang telah dikeluarkan oleh perusahaan.

Arus kas operasi abnormal merupakan proksi dari manajemen laba riil yang dilakukan oleh manajemen perusahaan melalui pengelolaan penjualan. Temuan ini tidak konsisten dengan temuan Cohen dan Zarowin (2010) yang menunjukkan bahwa pengelolaan penjualan mampu menurunkan kinerja keuangan perushaaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan tidak melakukan manajemen laba riil melalui arus kas operasi abnormal dengan cara mempercepat penjualan, sehingga tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Tabassum *et al.* (2015) menjelaskan bahwa sekitar 30-50 persen perusahaan manufaktur yang terdaftar di Karachi Stock Exchange (KSE) dengan kapitalisasi pasar tertinggi dari tahun 2004-2011 melakukan manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan. Hal ini menunjukkan adanya dampak negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan masa depan. Hasilnya menunjukkan bahwa manajemen perusahaan melakukan manipulasi laba riil pada tahun ini untuk melaporkan kinerja keuangan perusahaan, Akan tetapi, perusahaan akan menghadapi konsekuensi sebagai akibat dilakukannya manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan. Manajer menawarkan potongan harga dan persyaratan kredit yang lebih rendah kepada pelanggan untuk meningkatkan pendapatan. Akan tetapi, di masa depan manajemen perusahaan akan menanggung biaya dalam bentuk ROA, ROE, EPS dan PE ratio yang lebih rendah menyebabkan manajemen berusaha untuk memitigasi perilaku manajemen laba riil karena memiliki

dampak negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan periode berikutnya.

Perusahaan sektor industri *Agricultere* yang menggunakan tingkat utang yang tinggi akan menurunkan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang menggunakan utang yang semakin besar memiliki peningkatan risiko yang lebih besar. Besarnya rasio *leverage* membuat perusahaan menanggung biaya bunga yang semakin tinggi, sehingga akan berdampak pada menurunnya kinerja keuangan perusahaan.

Mendel *et al.* (2006) menunjukkan bahwa ketika rasio *leverage* tinggi, maka kinerja keuangan perusahaan semakin menurun. Adanya penggunaan dana yang berasal dari hutang menyebabkan perusahaan harus memenuhi kewajiban tetapnya. Artinya, ketika hutang perusahaan semakin meningkat dan jangka waktu pelunasannya semakin pendek, maka semakin besar beban tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan, sehingga beban tetap tersebut akan mengurangi kinerja keuangan perusahaan.

Semakin besar ukuran perusahaan sektor industri *Agriculture,* maka semakin rendah kinerja keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan karena ukuran perusahaan sektor industri *Agriculture* yang besar belum didukung dengan pengelolaan aset yang optimal. Selain itu, ukuran perusahaan tidak dapat digunakan sebagai jaminan bahwa perusahaan yang memiliki aset yang besar cenderung memiliki kinerja keuangan yang baik. Lin (2006) dan Wright *et al.* (2009) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan besar dengan total aset yang besar tidak menjamin bahwa kinerja keuangan perusahaan akan lebih baik.

Pertumbuhan penjualan merepresentasikan perubahan kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan sektor industri *Agriculture* menunjukkan bahwa semakin rendah kinerja keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan

penjualan sektor industri ini meningkatkan biaya yang lebih besar seperti biaya pemasaran, biaya gaji dan biaya bahan baku, sehingga kinerja keuangan perusahaan yang diharapkan tidak tercapai karena pertumbuhan penjualan tidak mampu menutupi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Ramezani *et al*. (2002) menjelaskan bahwa perusahaan yang memaksimalkan pertumbuhan penjualan bukan berarti bahwa perusahaan akan memaksimalkan profitabilitas. Hal ini disebabkan karena apabila perusahaan tidak mampu memitigasi piutang tidak tertagih maka akan meningkatkan beban penyisihan piutang tak tertagih, sehingga akan menurunkan kinerja keuanngan perusahaan.

B. Sektor *Basic Industry*

Berdasarkan kajian di atas maka sektor *Basic Industry* yang terkoneksi politik terutama koneksi politik dengan pemerintah (KPP) memanfaatkan hubungan tersebut untuk melakukan manajemen laba akrual terutama melalui diskresioner akrual (DA). Hal ini dibuktikan dengan jumlah perusahaan yang terkoneksi politik pada sektor *Basic Industry* berjumlah 25 perusahaan dari 52 perusahaan. Hal ini mencerminkan bahwa manajemen perusahaan menggunakan manfaat koneksi politik dengan tujuan untuk memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan bahwa tujuan perusahaan telah tercapai.

Perusahaan sektor *Basic Industry* yang terkoneksi politik lebih cenderung mengelola laba secara akrual karena memiliki keyakinan berlebih (*overconfidence*) atas manfaat dari adanya koneksi politik tersebut. Chaney, Faccio, dan Parsley (2011) menunjukkan bahwa ada tiga hal yang dilakukan oleh perusahaan yang terkoneksi politik. Pertama, perusahaan biasanya mengambil manfaat dari adanya hubungan politik dengan melakukan penggelapan atas pembayaran, menyembunyikan, mengaburkan,atau paling tidak melakukan penundaan pelaporan keuangan dengan tujuan untuk menyesatkan investor melalui *judgment*. Kedua, perusahaan yang terkoneksi politik akan merasa aman dari sanksi atau

hukuman jika perusahaan melaporkan kondisi keuangan perusahaan dengan kualitas rendah. Ketiga, perusahaan yang memiliki kualitas laba yang rendah lebih mungkin untuk membangun koneksi politik karena dapat memberikan manfaat yang menguntungkan bagi perusahaan.

Informasi yang sering digunakan oleh pemangku kepentingan eksternal terkait pengambilan keputusan bisnis adalah informasi laba karena laba merupakan ukuran kinerja keuangan secara periodik dalam suatu perusahaan (FASB, 1978). Hal ini menyebabkan manajer sebagai pengelola perusahaan berusaha untuk mengoptimalkan laba agar dapat menarik minat para pemegang saham. Oleh karena itu, manajemen perusahaan seringkali melakukan manajemen laba untuk tujuan tertentu.

Hung *et al*., (2012) menjelaskan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik memperoleh manfaat yang lebih berupa kemudahan dalam melakukan listing dipasar modal luar negeri jika dibandingkan perusahaan yang tidak terkoneksi politik. Teori Kelembagaan *(institutional theory)* menjelaskan bahwa keputusan yang diambil dalam organisasi dipengaruhi oleh organisasi lainnya termasuk pemerintah karena organisasi berada dalam lingkungan sosial (Meyer dan Rowan, 1977).

Pemerintah menerapkan aturan-aturan dan kebijakan yang harus dipatuhi oleh perusahaan dan pejabat pemerintah kebanyakan berasal partai politik sehingga secara tidak langsung keputusan pejabat itulah yang didengar.Kebijakan-kebijakan pemerintah yang masih kurang transparan dan kurang tegas dalam menerapkan aturan diantaranya mengenai pendanaan partai politik dan aturan yang terkait dengan perusahaan yang terkoneksi politik karena antara bisnis dan politik tidak bisa dipisahkan untuk memanfaatkan peluang dalam lingkungan bisnis.

Berdasarkan hasil revisi UU Parpol tahun 2008 batas sumbangan perusahaan atau badan usaha dalam waktu satu tahun anggaran sebesar empat milyar perperusahaan, tapi setelah direvisi UU Parpol tahun 2011, batas sumbangan naik

menjadi Tujuh setengah milyar perperusahaan hal ini dapat berpotensi semakin bertambah banyaknya dana kampanye yang berasal dari perusahaan yang menjadi donator dana kampanye terhadap kebijakan regulasi dan menguntungkan perusahaan dan berprilaku oportunistik untuk melakukan manajemen laba akrual dengan *diskresionary accrual*.

Fast *et al.* (2012) menjelaskan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik memiliki *overconfidence* atas pengambilan keputusan bisnis. Sehingga perusahan yang terkoneksi politik tidak bergeser dari manajemen laba berbasis akrual yang mudah dideteksi oleh regulator dan Auditor ke manajemen laba berbasis riil yang sulit terdeteksi. kajian ini tidak konsisten dengan penelitian Cohen dan Zarowin (2010); Cohen *et al.,(*2008); Ewert dan Wagenhofer (2005); Graham *et al., (*2005) menyatakan perusahaan yang terhubung secara politik lebih cenderung untuk menggunakan manajemen laba riilkarena sulit dideteksi oleh auditor maupun regulator dibandingkan manajemen laba akrual untuk memperoleh keuntungan atas hubungan koneksi politik.

Perusahaan yang terkoneksi politik berpengaruh negatif terhadap manajemen laba riil melalui abnormal *cash flow operational*. Perilaku manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan umumnya mulai bergeser dari manajemen laba berbasis akrual ke manajemen laba berbasis riil karena sulit terdeteksi oleh regulator, auditor maupun pemegang saham. Akan tetapi, perusahaan sektor *Basic Industry* memiliki kecenderungan untuk menggunakan manajemen laba berbasis akrual dibandingkan manajemen laba berbasis riil. Hal ini ditunjukkan dari koefisien regresi koneksi politik yang berpengaruh negatif terhadap manajemen laba riil.

Fast *et al*. (2012) menyimpulkan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik lebih mengarah kepada *overconfidence* atas pengambilan keputusan, sehingga perusahan yang terkoneksi politik tidak bergeser dari manajemen laba berbasis akrual yang mudah dideteksi oleh regulator dan Auditor ke manajemen laba berbasis riil yang sulit terdeteksi. kajian ini tidak konsisten

dengan penelitian Cohen dan Zarowin (2010); Cohen *et al.(*2008); Ewert dan Wagenhofer, (2005); Graham *et al., (*2005) yang menyatakan perusahaan yang terhubung secara politik lebih cenderung untuk menggunakan manajemen laba riil karena sulit dideteksi oleh auditor maupun regulator dibandingkan manajemenlaba akrual untuk memperoleh keuntungan atas hubungan koneksi politik.

Judge *et al.* (1977) menyatakan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik yang kuat dapat membantu sebuah perusahaan dalam memperoleh informasi yang ekslusif. Manajemen sebagai *agent* dan pemilik sebagai *principal* memiliki kepentingan yang berbeda-beda sehingga munculnya praktik manajemen laba riil. Teori agensi yang melatar belakangi tindakan manajemen laba ini memberikan gambaran bahwa terdapat konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham dengan tujuan untuk memaksimumkan kepentingannya masing-masing. Hal ini dikarenakan pemegang saham tidak dapat memonitor manajemen perusahaan secara langsung sehingga memungkinkan terjadinya tindakan manajemen laba.

Perusahaan sektor *Basic Industry* memanfaatkan akrual diskresioner dalam mengelola laba memiliki dampak negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini konsisten dengan Scott (2009) menjelaskan bahwa penggunaan akrual diskresioner dalam mengelola laba memiliki normanya sendiri, yaitu *accrual reverse*. Jika perusahaan mencatat akrual dalam jumlah tertentu sehingga mengakibatkan laba naik pada periode berjalan, maka pada periode berikutnya nilai akrual tersebut berbalik dan menjadikan nilai laba mengecil. Hal ini menyebabkan manajemen perusahaan untuk tidak berperilaku oportunistik dalam mengelola laba karena berdampak pada kinerja keuangan perusahaan periode berikutnya.

Pae (1999) dan Felthem dan Pae (2000) menunjukkan bahwa manajemen laba akrual tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaaan. Hal ini disebabkan karena kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan *return on equity* merupakan salah satu ukuran kinerja keuangan

perusahaan dalam kategori pengukuran arus kas yang dapat meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap suatu transaksi. Arus kas menunjukkan hasil yang dananya telah diterima tunai oleh perusahaan serta dibebani dengan beban yang bersifat tunai yang benar-benar sudah dikeluarkan oleh perusahaan.

Salah satu proksi manajemen laba riil adalah arus kas operasi abnormal yang dilakukan oleh manajemen perusahaan melalui pengelolaan penjualan. Temuan ini tidak konsisten dengan temuan Cohen dan Zarowin (2010) yang menunjukkan bahwa pengelolaan penjualan mampu menurunkan kinerja keuangan perusahaaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan tidak melakukan manajemen laba riil melalui arus kas operasi abnormal dengan cara mempercepat penjualan, sehingga tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Tabassum *et al*. (2015) menjelaskan bahwa sekitar 30-50 persen perusahaan manufaktur yang terdaftar di Karachi Stock Exchange (KSE) dengan kapitalisasi pasar tertinggi dari tahun 2004-2011 melakukan manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan. Hal ini menunjukkan adanya dampak negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan masa depan. Hasilnya menunjukkan bahwa manajemen perusahaan melakukan manipulasi laba riil pada tahun ini untuk melaporkan kinerja keuangan perusahaan, Akan tetapi, perusahaan akan menghadapi konsekuensi sebagai akibat dilakukannya manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan. Manajer menawarkan potongan harga dan persyaratan kredit yang lebih rendah kepada pelanggan untuk meningkatkan pendapatan. Akan tetapi, di masa depan manajemen perusahaan akan menanggung biaya dalam bentuk ROA, ROE, EPS dan PE rasio yang lebih rendah, sehingga mempengaruhi manajemen perusahaan untuk tidak bertindak dalam mengelola laba.

Perusahaan sektor industri *Basic Industry* yang menggunakan tingkat utang yang tinggi akan menurunkan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang menggunakan utang yang semakin besar

memiliki peningkatan risiko yang lebih besar. Besarnya rasio leverage membuat perusahaan menanggung biaya bunga yang semakin tinggi, sehingga akan berdampak pada menurunnya kinerja keuangan perusahaan.

Mendel *et al.* (2006) menunjukkan bahwa ketika rasio *leverage* tinggi, maka kinerja keuangan perusahaan semakin menurun. Adanya penggunaan dana yang berasal dari hutang menyebabkan perusahaan harus memenuhi kewajiban tetapnya. Artinya, ketika hutang perusahaan semakin meningkat dan jangka waktu pelunasannya semakin pendek, maka semakin besar beban tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan. Pada akhirnya beban tetap tersebut akan mengurangi kinerja keuangan perusahaan.

Ukuran perusahaan bukanlah faktor utama yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Artinya bahwa ukuran perusahaan bukanlah jaminan mutlak bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang baik. Hal ini disebabkan karena semakin besar perusahaan tersebut, maka akan membutuhkan biaya yang semakin tinggi untuk menjalankan aktivitas operasional perusahaan seperti biaya tenaga kerja, biaya pemeliharaan gedung, biaya administrasi dan umum, biaya kendaraan dan peralatan, sehingga mengurangi kinerja keuangan perusahaan.

Huang (2002) dan Talebria *et al.* (2010) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Semakin besar perusahaan, maka semakin besar pula biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh laba. Apabila manajemen perusahaan tidak bijaksana dalam mengelola aset perusahaan secara optimal, maka akan menciptakan efisiensi yang berdampak pada menurunnya kinerja keuangan perusahaan.

Pertumbuhan penjualan sektor *basic industry* menunjukkan bahwa peningkatan penjualan disertai dengan peningkatan biaya yang lebih besar, sehingga kinerja keuangan perusahaan yang semakin tinggi tidak tercapai. Hal ini menyebabkan para pemegang saham tidak dapat menerima

sinyal yang diberikan oleh perusahaan melalui pertumbuhan penjualan. Semakin tinggi atau semakin rendah jumlah pertumbuhan penjualan, maka tidak dapat memberikan sinyal kepada pemegang saham untuk melakukan investasi.

Rifai *et al.* (2013) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika adanya inefisiensi piutang dagang yang tidak tertagih, maka akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan karena basis pencatatan perusahaan masih menggunakan akrual.

C. Sektor *Consumer Goods*

Berdasarkan kajian di atas maka sektor *Consumer Goods* yang terkoneksi politik terutama koneksi politik dengan pemerintah (KPP) cenderung kurang memanfaatkan hubungan tersebut untuk melakukan manajemen laba akrual terutama melalui diskresioner akrual (DA). Hal ini dibuktikan dengan jumlah perusahaan yang terkoneksi politik pada sektor *Basic Industry* berjumlah 15 perusahaan dan tidak terkoneksi politik berjumlah 14 perusahaan. Adanya komposisi jumlah koneksi politik dan tidak terkoneksi politik yang hampir berimbang mempengaruhi keputusan manajemen untuk bertindak oportunis dalam mengelola laba dengan memanfaatkan hubungan koneksi politik. Penyebabnya ialah karena manajemen perusahaan memikirkan dampak negatif jangka panjang tindakan manajemen laba serta hilangnya kepercayaan publik karena manajemen laba mudah dideteksi oleh pihak luar perusahaan.

Chen *et al.* (2010) menjelaskan bahwa prediksi analis akan kurang akurat jika perusahaan memiliki hubungan politik dibandingkan perusahaan yang tidak terkoneksi politik. Hal ini berakibat bahwa munculnya asimetri informasi karena adanya hubungan koneksi politik, sehingga manajemen perusahaan cenderung tidak menggunakan manfaat dari adanya koneksi politik karena dapat mengorbankan kinerja jangka panjang perusahaan.

Sektor *Consumer Goods* yang terkoneksi politik terutama koneksi politik dengan pemerintah (KPP) cenderung kurang memanfaatkan hubungan tersebut untuk melakukan manajemen laba riil terutama melalui *abnormal cash flow from operation* (ACFO).

Perusahaan yang terkoneksi politik berpengaruh negatif terhadap manajemen laba riil melalui abnormal *cash flow operational*. Perilaku manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan umumnya mulai bergeser dari manajemen laba berbasis akrual ke manajemen laba berbasis riil karena sulit terdeteksi oleh regulator, auditor maupun pemegang saham. Adanya penerapan IFRS yang bertujuan untuk memitigasi perilaku diskresi manajemen perusahaan mempengaruhi manajemen perusahaan untuk bertindak mengelola laba, sehingga temuan dalam kajian ini membuktikan bahwa manajemen perusahaan yang terkoneksi politik tidak bergeser dari prilaku manajemen laba berbasis akrual ke manajemen laba berbasis riil melainkan perusahaan yang terkoneksi politik mampu memitigasi manajemen laba riil melalui *abnormal cash flow operational*.

Kajian ini tidak konsisten dengan penelitian Cohen dan Zarowin (2010); Cohen *et al., (*2008); Ewert dan Wagenhofer (2005); Graham *et al., (*2005) menyatakan perusahaan yang terhubung secara politik lebih cenderung untuk menggunakan manajemen laba riil karena sulit dideteksi oleh auditor maupun regulator dibandingkan manajemen laba akrual untuk memperoleh keuntungan atas hubungan koneksi politik.

Mulford dan Comiskey (2002) menjelaskan motivasi dilakukannya manajemen laba akrual yang berdampak pada kinerja perusahaan adalah ketika persyaratan hutang dijadikan sebagai tolok ukur dalam memonitor kinerja keuangan perusahaan. Misalnya, kreditur melakukan perjanjian kontrak dengan manajemen perusahaan bahwa suatu nilai tertentu untuk rasio akuntansi agar selalu baik, sehingga dapat memperoleh pinjaman. Jika manajemen perusahaan melanggar

perjanjian hutang, maka kreditur dapat meningkatkan suku bunga atau meminta pembayaran segera. Oleh karena itu, perjanjian hutang memberikan insentif bagi manajemen perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Konsisten dengan penelitian Christie (1990) menyimpulkan bahwa bahwa semakin dekat sebuah perusahaan melanggar perjanjian hutang, maka semakin besar kemungkinan manajemen perusahaan untuk mengadopsi pilihan akuntansi dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

Tabassum *et al.* (2015) menjelaskan bahwa sekitar 30-50 persen perusahaan manufaktur yang terdaftar di Karachi Stock Exchange (KSE) dengan kapitalisasi pasar tertinggi dari tahun 2004-2011 melakukan manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan. Hal ini menunjukkan adanya dampak negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan masa depan. Hasilnya menunjukkan bahwa manajemen perusahaan melakukan manipulasi laba riil pada tahun ini untuk melaporkan kinerja keuangan perusahaan, Akan tetapi, perusahaan akan menghadapi konsekuensi sebagai akibat dilakukannya manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan. Manajer menawarkan potongan harga dan persyaratan kredit yang lebih rendah kepada pelanggan untuk meningkatkan pendapatan. Akan tetapi, di masa depan manajemen perusahaan akan menanggung biaya dalam bentuk ROA, ROE, EPS dan PE ratio yang lebih rendah, sehingga mempengaruhi manajemen perusahaan dalam bertindak mengelola laba.

Perusahaan sektor *Consumer Goods* yang menggunakan tingkat hutang dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan belum dilakukan secara efektif dan efisien. Semakin tinggi rasio *leverage*, maka semakin tinggi risiko perusahaan sehingga menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang buruk. Perusahaan dengan komposisi hutang yang lebih besar dari modal menunjukkan kondisi perusahaan yang tidak sehat karena perusahaan sudah kurang berfokus untuk menghasilkan laba tetapi mengoptimalkan modal untuk menjamin hutang perusahaan.

Perusahaan sektor *consumer goods* dengan total aset yang semakin besar mencerminkan kemapanan perusahaan tersebut. Hal ini menunjukkan ukuran perusahaan yang semakin tinggi mampu meningkatkan skala ekonomi perusahaan dan memitigasi biaya pengumpulan dan pemrosesan informasi karena mampu membiayai keperluan internal perusahaan, sehingga tidak memerlukan tambahan biaya yang lebih besar untuk melakukan pengunngkapan informasi keuangan kepada pemegang saham. Dengan demikian, perusahaan melakukan optimalisasi ukuran perusahaan dalam memperoleh laba perusahaan.

Miyajima *et al.* (2003) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Semakin besar perusahaan yang dibutikan dengan semakin besarnya total aset, maka kinerja keuangan perusahaan akan semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen perusahaan mampu mengelola aset secara optimal sehingga menghasilkan profitabilitas yang tinggi yang berdampak pada meningkatnya kinerja keuangan perusahaan.

Pertumbuhan penjualan sektor *Consumer Goods*menunjukkan bahwa peningkatan penjualan disertai dengan peningkatan biaya yang lebih besar, sehingga kinerja keuangan perusahaan yang semakin tinggi tidak tercapai. Hal ini menyebabkan para pemegang saham tidak dapat menerima sinyal yang diberikan oleh perusahaan melalui pertumbuhan penjualan. Semakin tinggi atau semakin rendah jumlah pertumbuhan penjualan, maka tidak dapat memberikan sinyal kepada pemegang saham untuk melakukan investasi.

Rifai *et al.* (2013) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika adanya inefisiensi piutang dagang yang tidak tertagih, maka akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan karena basis pencatatan perusahaan masih menggunakan akrual.

D. Sektor *Infrastructure*

Sektor *Infrastructure* yang terkoneksi politik terutama koneksi politik dengan pemerintah (KPP) memanfaatkan hubungan tersebut untuk melakukan manajemen laba akrual terutama melalui diskresioner akrual (DA). Hal ini dibuktikan dengan jumlah perusahaan yang terkoneksi politik pada sektor *Basic Industry* berjumlah 21 perusahaan dari 26 perusahaan. Manajemen perusahaan memanfaatkan koneksi politik dengan tujuan untuk memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

Perusahaan yang terkoneksi politik lebih intens dalam mengelola laba secara akrual karena memiliki keyakinan berlebih (*overconfidence*) atas manfaat dari adanya koneksi politik tersebut. Hal ini dapat dilihat bahwa walaupun perusahaan telah mengadopsi IFRS yang membatasi manajemen perusahaan untuk memitigasi diskresi manajemen tetapi manajemen perusahaan yang terkoneksi politik masih intens dalam melakukan manajemen laba akrual.

Chaney *et al.* (2011) menjelaskan bahwa ada tiga hal yang dilakukan oleh perusahaan yang terkoneksi politik. Pertama, perusahaan biasanya mengambil manfaat dari adanya hubungan politik dengan melakukan penggelapan atas pembayaran, menyembunyikan, mengaburkan, atau paling tidak melakukan penundaan pelaporan keuangan dengan tujuan untuk menyesatkan investor melalui *judgment*. Kedua, perusahaan yang terkoneksi politik akan merasa aman dari sanksi atau hukuman jika perusahaan melaporkan kondisi keuangan perusahaan dengan kualitas rendah. Ketiga, perusahaan yang memiliki kualitas laba yang rendah lebih mungkin untuk membangun koneksi politik karena dapat memberikan manfaat yang menguntungkan bagi perusahaan.

Informasi yang sering digunakan oleh pemangku kepentingan eksternal terkait pengambilan keputusan bisnis adalah informasi laba karena laba merupakan ukuran kinerja keuangan secara periodik dalam suatu perusahaan (FASB, 1978). Hal ini menyebabkan manajer sebagai pengelola

perusahaan berusaha untuk mengoptimalkan laba agar dapat menarik minat para pemegang saham. Oleh karena itu, manajemen perusahaan seringkali melakukan manajemen laba untuk tujuan tertentu.

Perusahaan yang terkoneksi politik memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Hung *et al*. (2012) menunjukkan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik memperoleh manfaat yang lebih berupa kemudahan dalam melakukan listing dipasar modal luar negeri jika dibandingkan perusahaan yang tidak terkoneksi politik.

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang masih kurang transparan dan kurang tegas dalam menerapkan aturan diantaranya mengenai pendanaan partai politik dan aturan yang terkait dengan perusahaan yang terkoneksi politik karena antara bisnis dan politik tidak bisa dipisahkan untuk memanfaatkan peluang dalam lingkungan bisnis. Berdasarkan hasil revisi UU Parpol tahun 2008 batas sumbangan perusahaan atau badan usaha dalam waktu satu tahun anggaran sebesar empat milyar perperusahaan, tapi setelah direvisi UU Parpol tahun 2011, batas sumbangan naik menjadi Tujuh setengah milyar perperusahaan hal ini dapat berpotensi semakin bertambah banyaknya dana kampanye yang berasal dari perusahaan yang menjadi donator dana kampanye terhadap kebijakan regulasi dan menguntungkan perusahaan dan berprilaku oportunistik untuk melakukan manajemen laba akrual melalui *discretionary accrual*.

Fast *et al.* (2012) menjelaskan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik memiliki *overconfidence* atas pengambilan keputusan bisnis. Sehingga perusahan yang terkoneksi politik tidak bergeser dari manajemen laba berbasis akrual yang mudah dideteksi oleh regulator dan Auditor ke manajemen laba berbasis riil yang sulit terdeteksi. kajian ini tidak konsisten dengan penelitian Cohen dan Zarowin (2010); Cohen *et al*., *(*2008); Ewert dan Wagenhofer (2005); Graham *et al*., *(*2005) menyatakan perusahaanyang terhubung secara politik lebih cenderung untuk menggunakan manajemen laba riil karena sulit dideteksi oleh auditor maupun regulator dibandingkan

manajemen laba akrual untuk memperoleh keuntungan atas hubungan koneksi politik.

Sektor *Infrastructure* yang terkoneksi politik terutama koneksi politik dengan pemerintah (KPP) cenderung kurang memanfaatkan hubungan tersebut untuk melakukan manajemen laba riil terutama melalui *abnormal cash flow from operation* (ACFO).

Chen *et al.* (2010) menjelaskan bahwa prediksi analis akan kurang akurat jika perusahaan memiliki hubungan politik dibandingkan perusahaan yang tidak terkoneksi politik. Hal ini berakibat bahwa munculnya asimetri informasi karena adanya hubungan koneksi politik, sehingga manajemen perusahaan cenderung tidak menggunakan manfaat dari adanya koneksi politik karena dapat mengorbankan kinerja jangka panjang perusahaan.

Perusahaan sektor *Agriculture* yang memanfaatkan akrual diskresioner dalam mengelola laba memiliki dampak negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Scott (2009) menjelaskan bahwa penggunaan akrual diskresioner dalam mengelola laba memiliki normanya sendiri, yaitu *accrual reverse*. Jika perusahaan mencatat akrual dalam jumlah tertentu sehingga mengakibatkan laba naik pada periode berjalan, maka pada periode berikutnya nilai akrual tersebut berbalik dan menjadikan nilai laba mengecil. Hal ini menyebabkan manajemen perusahaan untuk tidak berperilaku oportunistik dalam mengelola laba karena berdampak pada kinerja keuangan perusahaan periode berikutnya.

Pae (1999) dan Felthem dan Pae (2000) menunjukkan bahwa manajemen laba akrual tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaaan. Hal ini disebabkan karena *return on asset* merupakan salah satu ukuran kinerja keuangan perusahaan dalam kategori pengukuran arus kas yang dapat meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap suatu transaksi. Arus kas menunjukkan hasil yang dananya telah diterima tunai oleh perusahaan serta

dibebani dengan beban yang bersifat tunai yang benar-benar sudah dikeluarkan oleh perusahaan.

Arus kas operasi abnormal merupakan proksi dari manajemen laba riil yang dilakukan oleh manajemen perusahaan melalui pengelolaan penjualan. Temuan ini tidak konsisten dengan temuan Cohen dan Zarowin (2010) yang menunjukkan bahwa pengelolaan penjualan mampu menurunkan kinerja keuangan perushaaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan tidak melakukan manajemen laba riil melalui arus kas operasi abnormal dengan cara mempercepat penjualan, sehingga tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Tabassum *et al.* (2015) menjelaskan bahwa sekitar 30-50 persen perusahaan manufaktur yang terdaftar di Karachi Stock Exchange (KSE) dengan kapitalisasi pasar tertinggi dari tahun 2004-2011 melakukan manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan. Hal ini menunjukkan adanya dampak negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan masa depan. Hasilnya menunjukkan bahwa manajemen perusahaan melakukan manipulasi laba riil pada tahun ini untuk melaporkan kinerja keuangan perusahaan, Akan tetapi, perusahaan akan menghadapi konsekuensi sebagai akibat dilakukannya manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan. Manajer menawarkan potongan harga dan persyaratan kredit yang lebih rendah kepada pelanggan untuk meningkatkan pendapatan. Akan tetapi, di masa depan manajemen perusahaan akan menanggung biaya dalam bentuk ROA, ROE, EPS dan PE ratio yang lebih rendah.

Perusahaan sektor *Consumer Goods* yang menggunakan tingkat hutang dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan belum dilakukan secara efektif dan efisien. Semakin tinggi rasio *leverage*, maka semakin tinggi risiko perusahaan sehingga menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang buruk. Perusahaan dengan komposisi hutang yang lebih besar dari modal menunjukkan kondisi perusahaan yang tidak sehat karena perusahaan sudah kurang berfokus untuk menghasilkan

laba tetapi mengoptimalkan modal untuk menjamin hutang perusahaan.

Semakin besar ukuran perusahaan sektor industri *Infrastructure,* maka semakin rendah kinerja keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan karena ukuran perusahaan sektor industri *Infrastructure* yang besar belum didukung dengan pengelolaan aset yang optimal. Selain itu, ukuran perusahaan tidak dapat digunakan sebagai jaminan bahwa perusahaan yang memiliki aset yang besar cenderung memiliki kinerja keuangan yang baik. Lin (2006) dan Wright *et al*. (2009) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan besar dengan total aset yang besar tidak menjamin bahwa kinerja keuangan perusahaan akan lebih baik.

Pertumbuhan penjualan sektor *infrastructure* menunjukkan bahwa peningkatan penjualan disertai dengan peningkatan biaya yang lebih besar, sehingga kinerja keuangan perusahaan yang semakin tinggi tidak tercapai. Hal ini menyebabkan para pemegang saham tidak dapat menerima sinyal yang diberikan oleh perusahaan melalui pertumbuhan penjualan. Semakin tinggi atau semakin rendah jumlah pertumbuhan penjualan, maka tidak dapat memberikan sinyal kepada pemegang saham untuk melakukan investasi.

Rifai *et al*. (2013) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika adanya inefisiensi piutang dagang yang tidak tertagih, maka akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan karena basis pencatatan perusahaan masih menggunakan akrual.

E. Sektor *Mining*

Sektor *Mining* yang terkoneksi politik terutama koneksi politik dengan pemerintah (KPP) cenderung kurang memanfaatkan hubungan tersebut untuk melakukan manajemen laba akrual terutama melalui diskresioner akrual (DA). Hal ini dibuktikan dengan jumlah perusahaan yang

terkoneksi politik pada sektor *Mining* berjumlah 13 perusahaan dan tidak terkoneksi politik berjumlah 14 perusahaan. Adanya komposisi jumlah koneksi politik dan tidak terkoneksi politik yang hampir berimbang mempengaruhi keputusan manajemen untuk bertindak oportunis dalam mengelola laba dengan memanfaatkan hubungan koneksi politik. Penyebabnya ialah karena manajemen perusahaan memikirkan dampak negatif jangka panjang tindakan manajemen laba serta hilangnya kepercayaan publik karena manajemen laba mudah dideteksi oleh pihak luar perusahaan.

Chen *et al.* (2010) menjelaskan bahwa prediksi analis akan kurang akurat jika perusahaan memiliki hubungan politik dibandingkan perusahaan yang tidak terkoneksi politik. Hal ini berakibat bahwa munculnya asimetri informasi karena adanya hubungan koneksi politik, sehingga manajemen perusahaan cenderung tidak menggunakan manfaat dari adanya koneksi politik karena dapat mengorbankan kinerja jangka panjang perusahaan.

Berdasarkan kajian di atas maka sektor *Consumer Goods* yang terkoneksi politik terutama koneksi politik dengan pemerintah (KPP) cenderung kurang memanfaatkan hubungan tersebut untuk melakukan manajemen laba riil terutama melalui *abnormal cash flow from operation* (ACFO).

Perusahaan yangterkoneksi politik berpengaruh negatif terhadap manajemen laba riil melalui abnormal *cash flow operational*. Perilaku manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan umumnya mulai bergeser dari manajemen laba berbasis akrual ke manajemen laba berbasis riil karena sulit terdeteksi oleh regulator, auditor maupun pemegang saham. Adanya penerapan IFRS yang bertujuan untuk memitigasi perilaku diskresi manajemen perusahaan mempengaruhi manajemen perusahaan untuk bertindak mengelola laba, sehingga temuan dalam kajian ini membuktikan bahwa manajemen perusahaan yang terkoneksi politik tidak bergeser dari prilaku manajemen laba berbasis akrual ke manajemen laba berbasis riil melainkan perusahaan yang

terkoneksi politik mampu memitigasi manajemen laba riil melalui *abnormal cash flow operational*.

Perusahaan sektor *Agriculture* yang memanfaatkan akrual diskresioner dalam mengelola laba memiliki dampak negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Scott (2009) menjelaskan bahwa penggunaan akrual diskresioner dalam mengelola laba memiliki normanya sendiri, yaitu *accrual reverse*. Jika perusahaan mencatat akrual dalam jumlah tertentu sehingga mengakibatkan laba naik pada periode berjalan, maka pada periode berikutnya nilai akrual tersebut berbalik dan menjadikan nilai laba mengecil. Hal ini menyebabkan manajemen perusahaan untuk tidak berperilaku oportunistik dalam mengelola laba karena berdampak pada kinerja keuangan perusahaan periode berikutnya.

Pae (1999) dan Felthem dan Pae (2000) menunjukkan bahwa manajemen laba akrual tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaaan. Hal ini disebabkan karena *return on asset* merupakan salah satu ukuran kinerja keuangan perusahaan dalam kategori pengukuran arus kas yang dapat meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap suatu transaksi. Arus kas menunjukkan hasil yang dananya telah diterima tunai oleh perusahaan serta dibebani dengan beban yang bersifat tunai yang benar-benar sudah dikeluarkan oleh perusahaan.

Arus kas operasi abnormal merupakan proksi dari manajemen laba riil yang dilakukan oleh manajemen perusahaan melalui pengelolaan penjualan. Temuan ini tidak konsisten dengan temuan Cohen dan Zarowin (2010) yang menunjukkan bahwa pengelolaan penjualan mampu menurunkan kinerja keuangan perushaaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan tidak melakukan manajemen laba riil melalui arus kas operasi abnormal dengan cara mempercepat penjualan, sehingga tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Tabassum *et al.* (2015) menjelaskan bahwa sekitar 30-50 persen perusahaan manufaktur yang terdaftar di Karachi Stock

Exchange (KSE) dengan kapitalisasi pasar tertinggi dari tahun 2004-2011 melakukan manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan. Hal ini menunjukkan adanya dampak negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan masa depan. Hasilnya menunjukkan bahwa manajemen perusahaan melakukan manipulasi laba riil pada tahun ini untuk melaporkan kinerja keuangan perusahaan, Akan tetapi, perusahaan akan menghadapi konsekuensi sebagai akibat dilakukannya manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan. Manajer menawarkan potongan harga dan persyaratan kredit yang lebih rendah kepada pelanggan untuk meningkatkan pendapatan. Akan tetapi, di masa depan manajemen perusahaan akan menanggung biaya dalam bentuk ROA, ROE, EPS dan PE ratio yang lebih rendah.

Perusahaan sektor industri *Mining* yang menggunakan tingkat utang yang tinggi akan menurunkan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang menggunakan utang yang semakin besar memiliki peningkatan risiko yang lebih besar. Besarnya rasio leverage membuat perusahaan menanggung biaya bunga yang semakin tinggi, sehingga akan berdampak pada menurunnya kinerja keuangan perusahaan.

Mendel *et al.* (2006) menunjukkan bahwa ketika rasio *leverage* tinggi, maka kinerja keuangan perusahaan semakin menurun. Adanya penggunaan dana yang berasal dari hutang menyebabkan perusahaan harus memenuhi kewajiban tetapnya. Artinya, ketika hutang perusahaan semakin meningkat dan jangka waktu pelunasannya semakin pendek, maka semakin besar beban tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan. Pada akhirnya beban tetap tersebut akan mengurangi kinerja keuangan perusahaan.

Perusahaan sektor *mining* dengan total aset yang semakin besar mencerminkan kemapanan perusahaan tersebut. Hal ini menunjukkan ukuran perusahaan yang semakin tinggi mampu meningkatkan skala ekonomi perusahaan dan memitigasi biaya pengumpulan dan pemrosesan informasi karena mampu

membiayai keperluan internal perusahaan, sehingga tidak memerlukan tambahan biaya yang lebih besar untuk melakukan pengunngkapan informasi keuangan kepada pemegang saham. Dengan demikian, perusahaan melakukan optimalisasi ukuran perusahaan dalam memperoleh laba perusahaan.

Miyajima *et al.* (2003) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Semakin besar perusahaan yang dibutikan dengan semakin besarnya total aset, maka kinerja keuangan perusahaan akan semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen perusahaan mampu mengelola aset secara optimal sehingga menghasilkan profitabilitas yang tinggi yang berdampak pada meningkatnya kinerja keuangan perusahaan.

Pertumbuhan penjualan sektor *mining* menunjukkan bahwa peningkatan penjualan disertai dengan peningkatan biaya yang lebih besar, sehingga kinerja keuangan perusahaan yang semakin tinggi tidak tercapai. Hal ini menyebabkan para pemegang saham tidak dapat menerima sinyal yang diberikan oleh perusahaan melalui pertumbuhan penjualan. Semakin tinggi atau semakin rendah jumlah pertumbuhan penjualan, maka tidak dapat memberikan sinyal kepada pemegang saham untuk melakukan investasi.

Rifai *et al.* (2013) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika adanya inefisiensi piutang dagang yang tidak tertagih, maka akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan karena basis pencatatan perusahaan masih menggunakan akrual.

F. Sektor *Miscellaneous*

Sektor *miscellameous* yang terkoneksi politik terutama koneksi politik dengan pemerintah (KPP) memanfaatkan hubungan tersebut untuk melakukan manajemen laba akrual terutama melalui diskresioner akrual (DA). Hal ini dibuktikan dengan jumlah perusahaan yang terkoneksi politik pada sektor *Basic Industry* berjumlah 23 perusahaan dari 33 perusahaan.

Manajemen perusahaan memanfaatkan koneksi politik dengan tujuan untuk memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

Perusahaan yang terkoneksi politik lebih intens dalam mengelola laba secara akrual karena memiliki keyakinan berlebih (*overconfidence*) atas manfaat dari adanya koneksi politik tersebut. Hal ini dapat dilihat bahwa walaupun penerapan IFRS telah membatasi manajemen perusahaan untuk memitigasi diskresi manajemen tetapi manajemen perusahaan yang terkoneksi politik masih intens dalam melakukan manajemen laba akrual. Chaney *et al.* (2011) menunjukkan bahwa ada tiga hal yang dilakukan oleh perusahaan yang terkoneksi politik. Pertama, perusahaan biasanya mengambil manfaat dari adanya hubungan politik dengan melakukan penggelapan atas pembayaran, menyembunyikan, mengaburkan atau paling tidak melakukan penundaan pelaporan keuangan dengan tujuan untuk menyesatkan investor melalui *judgment*. Kedua, perusahaan yang terkoneksi politik akan merasa aman dari sanksi atau hukuman jika perusahaan melaporkan kondisi keuangan perusahaan dengan kualitas rendah. Ketiga, perusahaan yang memiliki kualitas laba yang rendah lebih mungkin untuk membangun koneksi politik karena dapat memberikan manfaat yang menguntungkan bagi perusahaan.

Informasi yang sering digunakan oleh pemangku kepentingan eksternal terkait pengambilan keputusan bisnis adalah informasi laba karena laba merupakan ukuran kinerja keuangan secara periodik dalam suatu perusahaan (FASB, 1978). Hal ini menyebabkan manajer sebagai pengelola perusahaan berusaha untuk mengoptimalkan laba agar dapat menarik minat para pemegang saham. Oleh karena itu, manajemen perusahaan seringkali melakukan manajemen laba untuk tujuan tertentu.

Perusahaan yang terkoneksi politik memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Hung *et al*., (2012) menunjukkan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik memperoleh manfaat yang lebih berupa

kemudahan dalam melakukan listing dipasar modal luar negeri jika dibandingkan perusahaan yang tidak terkoneksi politik.

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang masih kurang transparan dan kurang tegas dalam menerapkan aturan diantaranya mengenai pendanaan partai politik dan aturan yang terkait dengan perusahaan yang terkoneksi politik karena antara bisnis dan politik tidak bisa dipisahkan untuk memanfaatkan peluang dalam lingkungan bisnis. Berdasarkan hasil revisi UU Parpol tahun 2008 batas sumbangan perusahaan atau badan usaha dalam waktu satu tahun anggaran sebesar empat milyar perperusahaan, tapi setelah direvisi UU Parpol tahun 2011, batas sumbangan naik menjadi Tujuh setengah milyar perperusahaan hal ini dapat berpotensi semakin bertambah banyaknya dana kampanye yang berasal dari perusahaan yang menjadi donator dana kampanye terhadap kebijakan regulasi dan menguntungkan perusahaan dan berprilaku oportunistikuntuk melakukan manajemen laba akrual dengan *discretionary accrual*.

Fast *et al.* (2012) menjelaskan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik memiliki *overconfidence* atas pengambilan keputusan bisnis. Sehingga perusahan yang terkoneksi politik tidak bergeser dari manajemen laba berbasis akrual yang mudah dideteksi oleh regulator dan Auditor ke manajemen laba berbasis riil yang sulit terdeteksi. kajian ini tidak konsisten dengan penelitian Cohen dan Zarowin (2010); Cohen *et al. (*2008); Ewert dan Wagenhofer (2005); Graham *et al.(*2005) yang menyatakan perusahaan yang terhubung secara politik lebih cenderung untuk menggunakan manajemen laba riil karena sulit dideteksi oleh auditor maupun regulator dibandingkan manajemen laba akrual untuk memperoleh keuntungan atas hubungan koneksi politik.

Sektor *miscellaneous* yang terkoneksi politik terutama koneksi politik dengan pemerintah (KPP) cenderung kurang memanfaatkan hubungan tersebut untuk melakukan manajemen laba riil terutama melalui *abnormal cash flow from operation* (ACFO).

Perusahaan yangterkoneksi politik berpengaruh negatif terhadap manajemen laba riil melalui abnormal *cash flow operational*. Perilaku manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan umumnya mulai bergeser dari manajemen laba berbasis akrual ke manajemen laba berbasis riil karena sulit terdeteksi oleh regulator, auditor maupun pemegang saham. Adanya penerapan IFRS yang bertujuan untuk memitigasi perilaku diskresi manajemen perusahaan mempengaruhi manajemen perusahaan untuk bertindak mengelola laba, sehingga temuan dalam kajian ini membuktikan bahwa manajemen perusahaan yang terkoneksi politik tidak bergeser dari prilaku manajemen laba berbasis akrual ke manajemen laba berbasis riil melainkan perusahaan yang terkoneksi politik mampu memitigasi manajemen laba riil melalui *abnormal cash flow operational*

Perusahaan sektor *Miscellaneous* yang memanfaatkan akrual diskresioner dalam mengelola laba memiliki dampak negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Scott (2009) menjelaskan bahwa penggunaan akrual diskresioner dalam mengelola laba memiliki normanya sendiri, yaitu *accrual reverse*. Jika perusahaan mencatat akrual dalam jumlah tertentu sehingga mengakibatkan laba naik pada periode berjalan, maka pada periode berikutnya nilai akrual tersebut berbalik dan menjadikan nilai laba mengecil. Hal ini menyebabkan manajemen perusahaan untuk tidak berperilaku oportunistik dalam mengelola laba karena berdampak pada kinerja keuangan perusahaan periode berikutnya.

Pae (1999) dan Felthem dan Pae (2000) menunjukkan bahwa manajemen laba akrual tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaaan. Hal ini disebabkan karena return on asset merupakan salah satu ukuran kinerja keuangan perusahaan dalam kategori cash flow measures yang dapat meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap suatu transaksi. Cash flow menunjukkan hasil yang dananya telah diterima tunai oleh perusahaan serta

dibebani dengan beban yang bersifat tunai yang benar-benar sudah dikeluarkan oleh perusahaan.

Arus kas operasi abnormal merupakan proksi dari manajemen laba riil yang dilakukan oleh manajemen perusahaan melalui pengelolaan penjualan. Temuan ini tidak konsisten dengan temuan Cohen dan Zarowin (2010) yang menunjukkan bahwa pengelolaan penjualan mampu menurunkan kinerja keuangan perushaaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan tidak melakukan manajemen laba riil melalui arus kas operasi abnormal dengan cara mempercepat penjualan, sehingga tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Tabassum *et al.* (2015) menjelaskan bahwa sekitar 30-50 persen perusahaan manufaktur yang terdaftar di Karachi Stock Exchange (KSE) dengan kapitalisasi pasar tertinggi dari tahun 2004-2011 melakukan manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan. Hal ini menunjukkan adanya dampak negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan masa depan. Hasilnya menunjukkan bahwa manajemen perusahaan melakukan manipulasi laba riil pada tahun ini untuk melaporkan kinerja keuangan perusahaan, Akan tetapi, perusahaan akan menghadapi konsekuensi sebagai akibat dilakukannya manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan. Manajer menawarkan potongan harga dan persyaratan kredit yang lebih rendah kepada pelanggan untuk meningkatkan pendapatan. Akan tetapi, di masa depan manajemen perusahaan akan menanggung biaya dalam bentuk ROA, ROE, EPS dan PE ratio yang lebih rendah.

Perusahaan sektor industri *Miscellaneous* yang menggunakan tingkat utang yang tinggi akan menurunkan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang menggunakan utang yang semakin besar memiliki peningkatan risiko yang lebih besar. Besarnya rasio leverage membuat perusahaan menanggung biaya bunga yang semakin tinggi, sehingga akan berdampak pada menurunnya kinerja keuangan perusahaan.

Mendel *et al.* (2006) menunjukkan bahwa ketika rasio *leverage* tinggi, maka kinerja keuangan perusahaan semakin menurun. Adanya penggunaan dana yang berasal dari hutang menyebabkan perusahaan harus memenuhi kewajiban tetapnya. Artinya, ketika hutang perusahaan semakin meningkat dan jangka waktu pelunasannya semakin pendek, maka semakin besar beban tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan. Pada akhirnya beban tetap tersebut akan mengurangi kinerja keuangan perusahaan.

Ukuran perusahaan bukanlah faktor utama yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Artinya bahwa, ukuran perusahaan bukanlah jaminan mutlak bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang baik. Hal ini disebabkan karena semakin besar perusahaan tersebut, maka akan membutuhkan biaya yang semakin tinggi untuk menjalankan aktivitas operasional perusahaan seperti biaya tenaga kerja, biaya pemeliharaan gedung, biaya administrasi dan umum, biaya kendaraan dan peralatan, sehingga mengurangi kinerja keuangan perusahaan.

Huang (2002) dan Talebria *et al.* (2010) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Semakin besar perusahaan, maka semakin besar pula biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh laba. Apabila manajemen perusahaan tidak bijaksana dalam mengelola aset perusahaan secara optimal, maka akan menciptakan efisiensi yang berdampak pada menurunnya kinerja keuangan perusahaan.

Pertumbuhan penjualan merupakan tolok ukur perubahan kekayaan perusahaan. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan, maka kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba akan semakin tinggi. Tingkat pertumbuhan penjualan yang semakin tinggi mencerminkan perusahaan mampu melakukan produktivitas dan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan penjualan, sehingga perusahaan mampu untuk menghasilkan laba yang semakin tinggi.

Kouser *et al.* (2012) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola penjualan secara efektif, sehingga mempengaruhi tingginya kinerja keuangan perusahaan.

G. Sektor *Property* Dan *Real Estate*

Sektor *propert* dan *real estate* yang terkoneksi politik terutama koneksi politik dengan pemerintah (KPP) memanfaatkan hubungan tersebut untuk melakukan manajemen laba akrual terutama melalui diskresioner akrual (DA). Hal ini dibuktikan dengan jumlah perusahaan yang terkoneksi politik pada sektor *propert* dan *real estate* berjumlah 32 perusahaan dari 40 perusahaan. Manajemen perusahaan memanfaatkan koneksi politik dengan tujuan untuk memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

Perusahaan yang terkoneksi politik lebih intens dalam mengelola laba secara akrual karena memiliki keyakinan berlebih (*overconfidence*) atas manfaat dari adanya koneksi politik tersebut. Hal ini dapat dilihat bahwa walaupun penerapan IFRS telah membatasi manajemen perusahaan untuk memitigasi diskresi manajemen tetapi manajemen perusahaan yang terkoneksi politik masih intens dalam melakukan manajemen laba akrual.

Chaney *et al*. (2011) menunjukkan bahwa ada tiga hal yang dilakukan oleh perusahaan yang terkoneksi politik. Pertama, perusahaan biasanya mengambil manfaat dari adanya hubungan politik dengan melakukan penggelapan atas pembayaran, menyembunyikan, mengaburkan,atau paling tidak melakukan penundaan pelaporan keuangan dengan tujuan untuk menyesatkan investor melalui *judgment*. Kedua, perusahaan yang terkoneksi politik akan merasa aman dari sanksi atau hukuman jika perusahaan melaporkan kondisi keuangan perusahaan dengan kualitas rendah. Ketiga, perusahaan yang memiliki kualitas laba yang rendah lebih

mungkin untuk membangun koneksi politik karena dapat memberikan manfaat yang menguntungkan bagi perusahaan.

Informasi yang sering digunakan oleh pemangku kepentingan eksternal terkait pengambilan keputusan bisnis adalah informasi laba karena laba merupakan ukuran kinerja keuangan secara periodik dalam suatu perusahaan (FASB, 1978). Hal ini menyebabkan manajer sebagai pengelola perusahaan berusaha untuk mengoptimalkan laba agar dapat menarik minat para pemegang saham. Oleh karena itu, manajemen perusahaan seringkali melakukan manajemen laba untuk tujuan tertentu.

Perusahaan yang terkoneksi politik memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Hung *et al*., (2012) menunjukkan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik memperoleh manfaat yang lebih berupa kemudahan dalam melakukan listing dipasar modal luar negeri jika dibandingkan perusahaan yang tidak terkoneksi politik.

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang masih kurang transparan dan kurang tegas dalam menerapkan aturan diantaranya mengenai pendanaan partai politik dan aturan yang terkait dengan perusahaan yang terkoneksi politik karena antara bisnis dan politik tidak bisa dipisahkan untuk memanfaatkan peluang dalam lingkungan bisnis. Berdasarkan hasil revisi UU Parpol tahun 2008 batas sumbangan perusahaan atau badan usaha dalam waktu satu tahun anggaran sebesar empat milyar perperusahaan, tapi setelah direvisi UU Parpol tahun 2011, batas sumbangan naik menjadi Tujuh setengah milyar perperusahaan hal ini dapat berpotensi semakin bertambah banyaknya dana kampanye yang berasal dari perusahaan yang menjadi donator dana kampanye terhadap kebijakan regulasi dan menguntungkan perusahaan dan berprilaku oportunistik untuk melakukan manajemen laba akrual dengan *diskresionary accrual*.

Fast *et al.* (2012) menjelaskan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik memiliki *overconfidence* atas pengambilan keputusan bisnis. Sehingga perusahan yang terkoneksi politik tidak bergeser dari manajemen laba berbasis akrual yang mudah

dideteksi oleh regulator dan Auditor ke manajemen laba berbasis riil yang sulit terdeteksi. kajian ini tidak konsisten dengan penelitian Cohen dan Zarowin (2010); Cohen *et al., (*2008); Ewert dan Wagenhofe (2005); Graham *et al., (*2005) menyatakan perusahaan yang terhubung secara politik lebih cenderung untuk menggunakan manajemen laba riil karena sulit dideteksi oleh auditor maupun regulator dibandingkan manajemen laba akrual untuk memperoleh keuntungan atas hubungan koneksi politik.

Sektor *Basic Industry* yang terkoneksi politik terutama koneksi politik dengan pemerintah (KPP) cenderung kurang memanfaatkan hubungan tersebut untuk melakukan manajemen laba riil terutama melalui *abnormal cash flow from operation* (ACFO).

Perusahaan yang terkoneksi politik berpengaruh negatif terhadap manajemen laba riil melalui abnormal *cash flow operational*. Perilaku manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan umumnya mulai bergeser dari manajemen laba berbasis akrual ke manajemen laba berbasis riil karena sulit terdeteksi oleh regulator, auditor maupun pemegang saham. Selain itu dengan adanya penerapan *International Reporting Standar* (IFRS) maka akan meningkatkan transparansi dan komparibilitas pelaporan keuangan karena mampu memitigasi diskresi manajemen perusahaan. Akan tetapi, hasil temuan dalam kajian ini membuktikan bahwa manajemen perusahaan yang terkoneksi politik tidak bergeser dari prilaku manajemen laba berbasis akrual ke manajemen laba berbasis riil melainkan perusahaan yang terkoneksi politik mampu memitigasi manajemen laba riil melalui *abnormal cash flow operational.* Hal ini disebabkan karena koneksi politik antara manajemen perusahaan dengan pemerintah memiliki keyakinan yang berlebih (*overconfidence*) atas pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kebijakan perusahaan. Hasil kajian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh fast *et al*. (2012) bahwa perusahaan yang terkoneksi politik mengarah kepada *overconfidence* atas pengambilan keputusan, sehingga perusahan

yang terkoneksi politik tidak bergeser dari manajemen laba berbasis akrual yang mudah dideteksi oleh regulator dan Auditor ke manajemen laba berbasis riil yang sulit terdeteksi. kajian ini tidak konsisten dengan penelitian Cohen dan Zarowin (2010); Cohen *et al., (*2008); Ewert dan Wagenhofer (2005); Graham *et al., (*2005) menyatakan perusahaan yang terhubung secara politik lebih cenderung untuk menggunakan manajemen laba riil karena sulit dideteksi oleh auditor maupun regulator dibandingkan manajemen laba akrual untuk memperoleh keuntungan atas hubungan koneksipolitik.

Perusahaan sektor *Trade, Service and Investment* yang memanfaatkan akrual diskresioner dalam mengelola laba memiliki dampak negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Scott (2009) menjelaskan bahwa penggunaan akrual diskresioner dalam mengelola laba memiliki normanya sendiri, yaitu *accrual reverse*. Jika perusahaan mencatat akrual dalam jumlah tertentu sehingga mengakibatkan laba naik pada periode berjalan, maka pada periode berikutnya nilai akrual tersebut berbalik dan menjadikan nilai laba mengecil. Hal ini menyebabkan manajemen perusahaan untuk tidak berperilaku oportunistik dalam mengelola laba karena berdampak pada kinerja keuangan perusahaan periode berikutnya.

Pae (1999) dan Felthem dan Pae (2000) menunjukkan bahwa manajemen laba akrual tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaaan. Hal ini disebabkan karena return on asset merupakan salah satu ukuran kinerja keuangan perusahaan dalam kategori pengukuran arus kas yang dapat meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap suatu transaksi. Arus kas menunjukkan hasil yang dananya telah diterima tunai oleh perusahaan serta dibebani dengan beban yang bersifat tunai yang benar-benar sudah dikeluarkan oleh perusahaan.

Arus kas operasi abnormal merupakan proksi dari manajemen laba riil yang dilakukan oleh manajemen perusahaan melalui pengelolaan penjualan. Temuan ini tidak konsisten dengan temuan Cohen dan Zarowin (2010) yang

menunjukkan bahwa pengelolaan penjualan mampu menurunkan kinerja keuangan perushaaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan tidak melakukan manajemen laba riil melalui arus kas operasi abnormal dengan cara mempercepat penjualan, sehingga tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Tabassum *et al.* (2015) menjelaskan bahwa sekitar 30-50 persen perusahaan manufaktur yang terdaftar di Karachi Stock Exchange (KSE) dengan kapitalisasi pasar tertinggi dari tahun 2004-2011 melakukan manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan. Hal ini menunjukkan adanya dampak negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan masa depan. Hasilnya menunjukkan bahwa manajemen perusahaan melakukan manipulasi laba riil pada tahun ini untuk melaporkan kinerja keuangan perusahaan, Akan tetapi, perusahaan akan menghadapi konsekuensi sebagai akibat dilakukannya manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan. Manajer menawarkan potongan harga dan persyaratan kredit yang lebih rendah kepada pelanggan untuk meningkatkan pendapatan. Akan tetapi, di masa depan manajemen perusahaan akan menanggung biaya dalam bentuk ROA, ROE, EPS dan PE ratio yang lebih rendah.

Jones *et al.* (2009) menjelaskan bahwa penggunaan hutang dapat meningkatkan tingkat pengembalian hasil bagi pemegang saham, akan tetapi dapat juga merugikan pemegang saham. Hal ini mencerminkan bahwa ketika perusahaan mampu mengelola hutang dengan efektif, maka akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan memiliki koefisien parameter sebesar 0,191; nilai t_{hitung} sebesar 2,631; dan p-*value* sebesar 0,009. Karena nilai $t_{hitung} > t_{kiritis}$ atau p-*value*< 0.05, maka penulis menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan terutama melalui *return on equity*. Koefisien parameter menunjukkan angka positif yaitu 0,191. Artinya, ketika ukuran perusahaan meningkat sebesar 1 satuan,

maka kinerja keuangan melalui *return on asset* meningkat sebesar 0,191 satuan.

Perusahaan sektor *property and real estate* dengan total aset yang semakin besar mencerminkan kemapanan perusahaan tersebut. Hal ini menunjukkan ukuran perusahaan yang semakin tinggi mampu meningkatkan skala ekonomi perusahaan dan memitigasi biaya pengumpulan dan pemrosesan informasi karena mampu membiayai keperluan internal perusahaan, sehingga tidak memerlukan tambahan biaya yang lebih besar untuk melakukan pengunngkapan informasi keuangan kepada pemegang saham. Dengan demikian, perusahaan melakukan optimalisasi ukuran perusahaan dalam memperoleh laba perusahaan.

Miyajima *et al.* (2003) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Semakin besar perusahaan yang dibutikan dengan semakin besarnya total aset, maka kinerja keuangan perusahaan akan semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen perusahaan mampu mengelola aset secara optimal sehingga menghasilkan profitabilitas yang tinggi yang berdampak pada meningkatnya kinerja keuangan perusahaan.

Pertumbuhan penjualan sektor *property and real estate*menunjukkan bahwa peningkatan penjualan disertai dengan peningkatan biaya yang lebih besar, sehingga kinerja keuangan perusahaan yang semakin tinggi tidak tercapai. Hal ini menyebabkan para pemegang saham tidak dapat menerima sinyal yang diberikan oleh perusahaan melalui pertumbuhan penjualan. Semakin tinggi atau semakin rendah jumlah pertumbuhan penjualan, maka tidak dapat memberikan sinyal kepada pemegang saham untuk melakukan investasi.

Rifai *et al.* (2013) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika adanya inefisiensi piutang dagang yang tidak tertagih, maka akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan karena basis pencatatan perusahaan masih menggunakan akrual.

H. Sektor *Trade*, *Service* dan *Investment*

Sektor *Trade, Service dan Investment* yang terkoneksi politik terutama koneksi politik dengan pemerintah (KPP) tidak mempengaruhi manajemen perusahaan untuk bertindak oportunis dalam mengelola laba. Berdasarkan kajian di atas maka sektor *Mining* yang terkoneksi politik terutama koneksi politik dengan pemerintah (KPP) cenderung kurang memanfaatkan hubungan tersebut untuk melakukan manajemen laba akrual terutama melalui diskresioner akrual (DA). Walaupun perusahaan terkoneksi politik pada sektor *Trade, Service dan Investment* berjumlah 55 perusahaan, akan tetapi tidak mempengaruhi manajemen dalam mengelola laba berdasarkan akrual. Penyebabnya ialah karena manajemen perusahaan memikirkan dampak negatif jangka panjang tindakan manajemen laba serta hilangnya kepercayaan publik karena manajemen laba mudah dideteksi oleh pihak luar perusahaan.

Chen *et al.* (2010) menjelaskan bahwa prediksi analis akan kurang akurat jika perusahaan memiliki hubungan politik dibandingkan perusahaan yang tidak terkoneksi politik. Hal ini berakibat bahwa munculnya asimetri informasi karena adanya hubungan koneksi politik, sehingga manajemen perusahaan cenderung tidak menggunakan manfaat dari adanya koneksi politik karena dapat mengorbankan kinerja jangka panjang perusahaan.

Sektor *Trade, Service dan Investment* yang terkoneksi politik terutama koneksi politik dengan pemerintah (KPP) cenderung kurang memanfaatkan hubungan tersebut untuk melakukan manajemen laba riil terutama melalui *abnormal cash flow from operation* (ACFO).

Dinc (2005) menunjukkan bahwa manfaat dari adanya koneksi politik yaitu adanya akses *political capital*, subsidi pemerintah, kontrak pemerintah maupun kebijakan pajak. Perusahaan menggunakan manfaat dari adanya koneksi politik untuk meningkatkan kinerja, sehingga memberikan sinyal kepada pemegang saham bahwa kondisi keuangan perusahaan

terlihat baik. Bram *et al.* (2015) menunjukkan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik memiliki peranan penting dalam mengubah strategi manajemen laba dari berbasis akrual ke berbasis riil karena sulit terdeteksi oleh pihak luar perusahaan.

Chaney *et al.* (2011) menjelaskan bahwa ada tiga hal yang dilakukan oleh perusahaan yang terkoneksi politik. Pertama, perusahaan biasanya mengambil manfaat dari adanya hubungan politik dengan melakukan penggelapan atas pembayaran, menyembunyikan, mengaburkan, atau paling tidak melakukan penundaan pelaporan keuangan dengan tujuan untuk menyesatkan investor melalui *judgment*. Kedua, perusahaan yang terkoneksi politik akan merasa aman dari sanksi atau hukuman jika perusahaan melaporkan kondisi keuangan perusahaan dengan kualitas rendah. Ketiga, perusahaan yang memiliki kualitas laba yang rendah lebih mungkin untuk membangun koneksi politik karena dapat memberikan manfaat yang menguntungkan bagi perusahaan.

Perusahaan sektor *Trade, Service dan Investment* yang memanfaatkan akrual diskresioner dalam mengelola laba memiliki dampak negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Scott (2009) menjelaskan bahwa penggunaan akrual diskresioner dalam mengelola laba memiliki normanya sendiri, yaitu *accrual reverse*. Jika perusahaan mencatat akrual dalam jumlah tertentu sehingga mengakibatkan laba naik pada periode berjalan, maka pada periode berikutnya nilai akrual tersebut berbalik dan menjadikan nilai laba mengecil. Hal ini menyebabkan manajemen perusahaan untuk tidak berperilaku oportunistik dalam mengelola laba karena berdampak pada kinerja keuangan perusahaan periode berikutnya.

Pae (1999) dan Felthem dan Pae (2000) menunjukkan bahwa manajemen laba akrual tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaaan. Hal ini disebabkan karena return on asset merupakan salah satu ukuran kinerja keuangan perusahaan dalam kategori cash flow measures yang dapat meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap suatu transaksi. Cash flow menunjukkan hasil

yang dananya telah diterima tunai oleh perusahaan serta dibebani dengan beban yang bersifat tunai yang benar-benar sudah dikeluarkan oleh perusahaan.

Arus kas operasi abnormal merupakan proksi dari manajemen laba riil yang dilakukan oleh manajemen perusahaan melalui pengelolaan penjualan. Temuan ini tidak konsisten dengan temuan Cohen dan Zarowin (2010) yang menunjukkan bahwa pengelolaan penjualan mampu menurunkan kinerja keuangan perushaaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan tidak melakukan manajemen laba riil melalui arus kas operasi abnormal dengan cara mempercepat penjualan, sehingga tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Tabassum *et al.* (2015) menjelaskan bahwa sekitar 30-50 persen perusahaan manufaktur yang terdaftar di Karachi Stock Exchange (KSE) dengan kapitalisasi pasar tertinggi dari tahun 2004-2011 melakukan manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan. Hal ini menunjukkan adanya dampak negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan masa depan. Hasilnya menunjukkan bahwa manajemen perusahaan melakukan manipulasi laba riil pada tahun ini untuk melaporkan kinerja keuangan perusahaan, Akan tetapi, perusahaan akan menghadapi konsekuensi sebagai akibat dilakukannya manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan. Manajer menawarkan potongan harga dan persyaratan kredit yang lebih rendah kepada pelanggan untuk meningkatkan pendapatan. Akan tetapi, di masa depan manajemen perusahaan akan menanggung biaya dalam bentuk ROA, ROE, EPS dan PE ratio yang lebih rendah.

Perusahaan sektor industri *trade, service, dan investment* yang menggunakan tingkat utang yang tinggi akan menurunkan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang menggunakan utang yang semakin besar memiliki peningkatan risiko yang lebih besar. Besarnya rasio leverage membuat perusahaan menanggung biaya bunga yang semakin tinggi, sehingga akan berdampak pada menurunnya kinerja keuangan perusahaan.

Mendel *et al.* (2006) menunjukkan bahwa ketika rasio *leverage* tinggi, maka kinerja keuangan perusahaan semakin menurun. Adanya penggunaan dana yang berasal dari hutang menyebabkan perusahaan harus memenuhi kewajiban tetapnya. Artinya, ketika hutang perusahaan semakin meningkat dan jangka waktu pelunasannya semakin pendek, maka semakin besar beban tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan. Pada akhirnya beban tetap tersebut akan mengurangi kinerja keuangan perusahaan.

Ukuran perusahaan bukanlah faktor utama yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Artinya bahwa, ukuran perusahaan bukanlah jaminan mutlak bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang baik. Hal ini disebabkan karena semakin besar perusahaan tersebut, maka akan membutuhkan biaya yang semakin tinggi untuk menjalankan aktivitas operasional perusahaan seperti biaya tenaga kerja, biaya pemeliharaan gedung, biaya administrasi dan umum, biaya kendaraan dan peralatan, sehingga mengurangi kinerja keuangan perusahaan.

Huang (2002) dan Talebria *et al.* (2010) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Semakin besar perusahaan, maka semakin besar pula biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh laba. Apabila manajemen perusahaan tidak bijaksana dalam mengelola aset perusahaan secara optimal, maka akan menciptakan efisiensi yang berdampak pada menurunnya kinerja keuangan perusahaan.

Pertumbuhan penjualan sektor *basic industry* menunjukkan bahwa peningkatan penjualan disertai dengan peningkatan biaya yang lebih besar, sehingga kinerja keuangan perusahaan yang semakin tinggi tidak tercapai. Hal ini menyebabkan para pemegang saham tidak dapat menerima sinyal yang diberikan oleh perusahaan melalui pertumbuhan penjualan. Semakin tinggi atau semakin rendah jumlah pertumbuhan penjualan, maka tidak dapat memberikan sinyal kepada pemegang saham untuk melakukan investasi.

Rifai *et al*. (2013) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika adanya inefisiensi piutang dagang yang tidak tertagih, maka akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan karena basis pencatatan perusahaan masih menggunakan akrual.

BAB 6 PENUTUP

Adanya dewan komisaris dan dewan direktur yang menjabat dipemerintahan menimbulkan peluang bagi perusahaan yang terkoneksi politik untuk berprilaku *oportunistik* dalam melakukan manajemen laba, baik manajemen laba akrual maupun manajemen laba riil untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, hal ini menjadi perhatian serius bagi perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian temuan penelitian yang berkaitan dengan koneksi politik terhadap aktivitas manajemen laba yang dilakukan perusahaan akan berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Hal ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori hipotesis mengenai perusahaan yang terkoneksi politik.

Proses aktivitas manajemen laba akrual dan manajemen laba riil tidak dapat digunakan sebagai mekanisme strategi manajemen untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dan penyelesaian permasalahan koneksi politik di Indonesia, dimana perusahaan yang terkoneksi politik sebanyak 64,33%. Fakta ini mengidentifikasikan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik masih dijadikan sebagai daya tarik investor untuk menanamkan modal dan sarana penyampaian informasi keuangan untuk masa yang akan datang khususnya untuk data sampel pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar modal Indonesia, Keberadaan perusahaan yang terkoneksi politik masih dirasa penting dalam menumbuhkan kepercayaan diri manajemen untuk pengambilan

kebijakan dan keputusan dalam perusahaan untuk meningkat kinerja keuangan perusahaan.

Implikasi Kebijakan akuntansi yang diambil oleh pihak perusahaan untuk melakukan manajemen laba akrual dan manajemen laba riiil dapat dilihat dari hasil kajian ini bagi manajemen perusahaan yang terkoneksi dengan politik dimana dewan komisaris atau dewan direksi terhubung dengan pemerintah yang berkontribusi kepada perusahaan, apabila manajemen perusahaan mengelola perusahaan dengan baik dan mencerminkan lingkungan politik yang bebas dari praktik manipulasi, maka akan berdampak positif pada kualitas kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, apabila manajemen perusahaan yang terkoneksi politik berperan aktif dalam menyusun strategi bersaing perusahaan, maka manajemen perusahaan akan memanfaatkan peluang dalam lingkungan bisnis dari hubungan politik.

Perusahaan yang terdaftar di pasar modal Indonesia yang terkoneksi politik memiliki persentase 64,33% menunjukkan bahwa investor masih memiliki ketertarikan untuk melakukan investasi di perusahaan yang terkoneksi politik karena mendapatkan kemudahan untuk memperoleh kontrak dalam memenangkan proyek dan mendapatkan informasi lebih awal mengenai kebijakan pemerintah atau peraturan peraturan terkait bisnis dari perusahaan.

Investor yaitu investor akan lebih selektif memilih emiten yang akan dijadikan tempat untuk melakukan investasi. Salah satu pertimbangan yang bisa diambil dari kajian ini adalah bahwa investor dapat melihat pengaruh dan kontribusi perusahaan yang terkoneksi politik. Sebagai bahan pertimbangan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik akan memperoleh beberapa manfaat karena dewan komisaris atau dewan direksi yang terkoneksi dengan pemerintah dapat berkontribusi kepada perusahan, apabila melakukan pengelolaan perusahaan dengan baik dan mencerminkan lingkungan politik yang bebas dari tindakan korupsi.

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang masih kurang transparan dan kurang tegas dalam menerapkan aturan diantaranya mengenai pendanaan partai politik dan aturan yang terkait dengan perusahaan yang terkoneksi politik karena antara bisnis dan politik tidak bisa dipisahkan untuk memanfaatkan peluang dalam lingkungan bisnis. Berdasarkan hasil revisi UU Parpol tahun 2008 batas sumbangan perusahaan atau badan usaha dalam waktu satu tahun anggaran sebesar empat milyar perperusahaan, tapi setelah direvisi UU Parpol tahun 2011.

Batas sumbangan naik menjadi Tujuh setengah milyar perperusahaan hal ini dapat berpotensi semakin bertambah banyaknya dana kampanye yang berasal dari perusahaan yang menjadi donator dana kampanye terhadap kebijakan regulasi dan menguntungkan perusahaan sehingga manajemen berprilaku oportunistik dengan menaikkan laba perusahaan dengan cara melakukan manajemen laba, sebagai Negara yang demokrasi partai politik yang diberikan kewenangan dapat menjalankan fungsinya sesuai harkat dan martabatnya yaitu menjadi wahana bagi warganegara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingan dihadapan penguasa dengan adil dan tidak memihak.Perubahan atas Undang-undang.

Manajemen laba masih sering dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Hal ini terjadi karena laba merupakan tolak ukur kinerja keuangan perusahaan dan menjadi perhatian utama pemangku kepentingan (Pemegang saham) dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dapat berbasis akrual maupun berbasis riil. Perilaku manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan mulai bergeser dari manajemen berbasis akrual ke manajemen berbasis riil karena sulit dideteksi oleh regulator pemegang saham maupun auditor. Selain itu dengan adanya penerapan *International Financial Reporting Standar (IFRS)* yang diadopsi oleh Indonesia memiliki implikasi positif dalam meningkatkan transparansi dan komparatif pelaporan keuangan yang dipercaya mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan karena memitigasi diskresi manajemen

perusahaan melalui berbagai macam alternatif akuntansi yang diperbolehkan. Akan tetapi, perilaku manajemen laba berbasis akrual masih terus meningkat pada perusahaan-perusahaan di Indonesia khususnya perusahaan yang terkoneksi politik. Hasil kajian ini menunjukan bahwa masih tingginya manajemen laba berbasis akrual yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terkoneksi politik. Oleh karena itu, perlu adanya standar yang ketat dan monitoring yang dilakukan oleh DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) dalam memitigasi perilaku manajemen laba akrual yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia terlebih khusus perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang terkoneksi politik.

DAFTAR PUSTAKA

Badertscher, B. A. 2011. Overvaluation and choice of alternative earnings management mechanisms. The Accounting Review, 86(5), 1491–1518.

Braam, G., Nandy. M., Witzel., U., Lodh., 2015. accrual-based and real earnings management and political connections. The International Journal of Accounting, 50(5) 111-141.

Budiarjo, Miriam. 1977. Dasar – dasar Ilmu Politik. Gramedia: Jakarta.

Chaney, P., Faccio, M., & Parsley, D. 2011. The quality of accounting information in politically connected firms. Journal of Accounting and Economics, 51(1–2), 58–76.

Cohen, D. A., Dey, A., & Lys, T. Z. 2008. Real and accrual-based earnings management in the pre-and post-Sarbanes–Oxley periods. The Accounting Review, 83(3), 757–787.

Cohen, D., & Zarowin, P. 2010. Accrual-based and real earnings management activities around seasoned equity offerings. Journal of Accounting and Economics, 50(1), 2–19.

Correia., M. 2014. Political connections and SEC enfoercement. Journal of Accounting and Economics. 57(5) 241-262.

Datta & Ganguli 2014. Political connections and firm value. The International Journal of Accounting.

Ding., Jia., Wu., Zhang 2014. Executive political connections and firms performance: comparative evidence from privately-controlled and state-owned enterprises. Journal of Accounting and Economics.

Do, P. Lee, k. & Nguyen. N 2012. political connections and firm value: evidence from the regression discountinuity design of close gubernatiorial elections. Journal of economics and business.

Ewert, R., & Wagenhofer, A. 2005. Economic effects of tightening accounting standards to restrict earnings management. The Accounting Review, 80, 1101–1124.

Faccio, M. 2006. Politically-connected firms. American Economic Review, 96(1), 369–386.

Faccio, M. 2010. Differences between politically connected and non-connected firms: A cross country analysis. Financial Management, 39(3), 905–927.

Faccio, M., Masulis, R., & McConnell, J. 2006. Political connections and corporate bailouts. Journal of Finance, 61(6), 2597–2635.

Fan, J. P. H., T. J. Wong, & Dong-Hua Chen. 2004. "Politically Connected CEOs, Corporate Governance, and Post-IPO Performance of China'S Partially Privatized Firms." www.afajof.org

Fan, J. P. H., T. J. Wong, & Tianyu Zhang. 2007. "Politically Connected CEOs, Corporate Governance, and Post-IPO Performance of China'S Newly Partially Privatized Firms." Journal of Financial Econommics 84. 330-357.

Fisman, R. 2001. Estimating the value of political connections. American Economic Review, 91(4), 1095–1102.

Goldman, E., Rocholl, J., & So, J. 2009. Do politically connected boards affect firm value. Review of Financial Studies, 22(6), 2331–2360.

Goldman, E., Rocholl, J., & So, J. 2013. Politically connected boards of directors and the allocation of procurement contracts. Review of Finance, 17(1), 1617–1648.

Graham, J., Harvey, R., & Rajgopal, S. 2005. The economic implications of corporate financial reporting. Journal of Accounting and Economics, 40(1–3), 3–73.

Gunarsih, Tri. 2004. "Masalah Keagenan dan Strategi Diversifikasi." KOMPAK, No.10, h.52 – 69.

Gunny, K. 2010. The relation between earnings management using real activities manipulation and future performance: Evidence from meeting earnings benchmarks. Contemporary Accounting Research, 27(3), 855–888.

Hasan, Jackowicz, Kowalewski, dan Kozlowski 2014. political connected firms in Poland and their access to banking financingHay, J. R., & Shleifer, A. (1998). Private enforcement of public laws: A theory of legal reform. The AmericanEconomic Review, 88(2), 398–403.

Jackowicz., N., Kozlowski., P. & Mielcars.K 2014. Political connections and operational performance of non-financial firms: new evidence from Poland. Journal of Accounting and Economics.

Jensen, M. C & W. H. Meckling. 1976. "Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." Journal of Financial Economics, Vol. 3, No. 4. h.305-360.

Khwaja, A., & Mian, A. 2005. Do lenders favor politically connected firms? Rent-seeking in an emerging financial market. Quarterly Journal of Economics, 120(4), 1371–1411.

Komari, Nurul & Faisal. 2006. "Analisis Hubungan Struktur Kepemilikan dan Komisaris Independen dengan Kompensasi Eksekutif." Jurnal Auditing dan Akuntansi, Vol.2, No.2. h.235 – 250.

Kothari, S. P., Leone, A. J., & Wasley, C. E. 2005. Performance matched discretionary accrual measures. Journal of Accounting and Economics, 39(1), 163–197.

Kothari, S. P., Mizik, N., & Roychowdhury, S. 2012. Managing for the moment: the role of real activity versus accruals earnings management in SEO valuation. Working paper.

Leuz, C., & Oberholzer-Gee, F. 2006. Political relationships, global financing, and corporate transparency: Evidence from Indonesia. Journal of Financial Economics, 81(2), 411–439.

Ozcan.P., Gunduz.,L. 2015. Political connectedness and business performance: evidence from turkish industry ranking. Journal of Accounting and Finance.

Pastor, L., & Veronesi, P. 2013. Political uncertainty and risk premia. Journal of Financial Economics, 110(3), 520–545.

Purwoto, Lukas. 2011. "Pengaruh Koneksi Politis, Kepemilikan Pemerintah, dan Keburaman Laporan Keuangan Terhadap Kesinkronan dan Risiko Crash Harga Saham." Ringkasan Disertasi pada Ujian Terbuka. Program Doktor Ilmu Ekonomi Manajemen UGM Yogyakarta.

Ramanna, K., & Roychowdhury, S. (2010). Elections and discretionary accruals: Evidence from 2004. Journal of Accounting Research, 48(2), 445–475.

Riahi-Belkaoui, A. 2004. Politically-connected firms: Are they connected to earnings opacity? Research in Accounting Regulation, 17(1), 25–38.

Roychowdhury, S. 2006. Earnings management through real activities manipulation. Journal of Accounting andEconomics, 42(3), 335–370.

Shleifer, A., & Vishny, R. W. 1994. Politicians and firms. Quarterly Journal of Economics, 109, 995–1025.

Su., N., & Fang., J. 2013. political connections and firms performance in Chinese companies. The International Journal of Accounting.

Vermonte, Philips J. 2012. "Mendanai Partai Politik: Problem dan Beberapa Alternatif Solusinya." Analisis CSIS, Vol. 41, No. 1, h.82-94.

Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. 1990. Positive accounting theory: A ten year perspective. The AccountingReview, 65(1), 131–156.

Wijantini. 2007. "A Test of The Relationship Between Political Connection And Indirect Costs of Financial Distress In

Indonesia." Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance, Vol. 3, No. 2, h.61-81.

Wulandari., T 2012. Analisis pengaruh political connection dan struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan. Diponegoro Journal of Accounting.

Xu, Lixin C, Tian Zhu, & Yi-Min Lin. 2002. "Political Control, Agency Problem, and Ownership Reform: evidence from China." Economics of Transition, Vol. 13, No. 1, h.1-24.

TENTANG PENULIS

Eva Herianti, merupakan Staff Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta. Lahir di Jakarta dan menyelesaikan pendidikan SD, SMP SMA di Kabupaten Solok Sumatra Barat. Melanjutkan Studi S1 Akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Jakarta dan menyelesaikan program Magister Akuntansi pada Universitas Persada Indonesia Y.A.I. kemudian menyelesaikan program Doktor pada Universitas Persada Indonesia Y.A.I. Aktif melaksanakan penelitian yang dipublikasikan di jurnal Internasional bereputasi dan jurnal nasional yang terakreditasi. Aktif sebagai anggota IAI KPD tahun 2020 sampai dengan 2022. Aktif menjadi pengurus di Kadin Training Center 2018 hingga sekarang.

Arna Suryani, merupakan staff pengajar dan sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi. Lahir di Pangkalpinang, menyelesaikan pendidikan SD, SMP dan SMA di Kota Sungailiat Bangka. Melanjutkan Studi S1 Akuntansi di Universitas Sriwijaya, dan menyelesaikan program Magister Akuntansi di Universitas Padjajaran, kemudian menyelesaikan program Doktor pada Universitas Persada Indonesia. Aktif dalam menghasilkan berbagai karya ilmiah seperti melakukan penelitian yang terpublikasi pada jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi juga menulis buku-buku ekonomi, manajemen dan keuangan. Penulis aktif menjadi narasumber. Diluar aktivitas akademik penulis juga aktif dalam berbagai organisai seperti ketua tim penasehat investasi provinsi Jambi,

sebagai wakil ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) wilayah Jambi, sebagai wakil ketua di Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) wilayah XC dan juga sebagai pengurus berbagai organisasi.

Amor Marundha, merupakan Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Lahir di Jakarta dan menyelesaikan pendidikan SD, SMP SMA di Jakarta Barat. Melanjutkan Studi S1 Akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Jakarta dan menyelesaikan program Magister Akuntansi pada Universitas Pancasila. kemudian menyelesaikan program Doktor pada Universitas Persada Indonesia Y.A.I. Aktif melaksanakan penelitian yang dipublikasikan di jurnal Internasional bereputasi dan jurnal nasional yang terakreditasi. Anggota IAI dan menjadi anggota Assosiasi Pengurus *Tax Center* seluruh Indonesia tahun 2020 hingga sekarang.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN
CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC00202322255, 18 Maret 2023
Pencipta		
Nama	:	**Eva Herianti, Arna Suryani dkk**
Alamat	:	Perumahan Taman Melati CA02, Rt 08/Rw 08, Duren Mekar, Bojongsari, Depok, Depok, JAWA BARAT, 16518
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	**Eva Herianti, Arna Suryani dkk**
Alamat	:	Perumahan Taman Melati CA02, Rt 08/Rw 08, Duren Mekar, Bojongsari, Depok, Depok, JAWA BARAT, 16518
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	**Buku**
Judul Ciptaan	:	**Koneksi Politik Dan Manajemen Laba**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	8 Februari 2023, di Purbalingga
Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	:	000455178

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.